



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II TAHUN 2025

BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH



Kata Pengantar



Yudi Noviandi, M.Sc. Tech., Apt
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dapat merampungkan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025.

Dokumen ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan tugas sesuai dengan DIPA 2025, dengan mengacu pada regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83

Tahun 2024 mengenai tata kelola SAKIP di lingkungan BPOM.

Pada triwulan ini, kami mencatat capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 106,07 dengan predikat “Istimewa,” meningkat signifikan dibandingkan Triwulan I yang hanya mencapai 98,30. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pelaksanaan program, efektivitas koordinasi lintas fungsi, serta pemulihan dari efisiensi anggaran yang sempat membatasi kegiatan di awal tahun.

Realisasi anggaran hingga akhir Triwulan II tercatat sebesar Rp 6.997.374.273 dari total pagu Rp 20.322.623.000, atau sebesar 34,43%. Meskipun masih tergolong rendah, capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif dan efisien. Beberapa kegiatan bahkan menunjukkan capaian output yang melampaui target meski dengan penggunaan anggaran yang minimal.

Capaian indikator strategis seperti pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berisiko, pendampingan UMKM, serta pelaksanaan program komunitas (Sekolah PJAS Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Aman Berbasis Komunitas) menunjukkan hasil yang sangat baik. Laboratorium pengujian juga mengalami peningkatan kapasitas melalui penambahan ruang lingkup dan metode analisis, meskipun masih menghadapi

tantangan teknis seperti keterlambatan reagen dan kerusakan alat. Selain itu, Balai Besar POM Banda Aceh juga telah memenuhi persyaratan pra evaluasi dan kini tengah melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka **penguatan Reformasi Birokrasi** guna meraih predikat **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** di tahun ini.

Beberapa indikator belum dapat disimpulkan atau masih menunggu penilaian di Triwulan IV, seperti Zona Integritas, AKIP, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Manajemen Risiko. Efisiensi anggaran juga menjadi perhatian, terutama pada kegiatan penindakan dan deteksi kejahatan yang meskipun capaian outputnya tinggi, realisasi anggarannya belum optimal.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut mendukung pelaksanaan tugas Balai Besar POM dalam memastikan produk obat dan makanan yang aman, berkualitas, serta bermanfaat. Semua ini diperkuat melalui strategi preventif, pengawasan, penindakan, dan internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi dengan semangat “KolaborAksi Siap WBBM”.

Kami berharap Laporan Kinerja ini menjadi acuan perencanaan strategis, penguatan tata kelola birokrasi, serta sumber informasi terpercaya pemangku kepentingan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita untuk mewujudkan masyarakat sehat dengan obat yang aman, bermutu dan berdaya saing menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Banda Aceh,



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (Balai Besar POM di Banda Aceh) telah disusun dan merupakan perwujudan akuntabilitas Balai Besar POM di Banda Aceh. Laporan ini memberikan uraian dan penjelasan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi dan penjelasan yang memadai atas capaian Sasaran Kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh pada tanggal 12 Februari 2025 telah menandatangani Perjanjian Kinerja yang memuat 25 (Dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IK) untuk mencapai 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di Triwulan II sebesar **106,07** dengan predikat **Istimewa**. Dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja dengan kategori **Sangat Baik**, 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori **Baik**, 8 (delapan) indikator kinerja dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan** dan 6 (enam) indikator kinerja yang belum ada penilaian (baru dinilai pada TW IV)

Pimpinan telah melakukan dialog kinerja kepada fungsi-fungsi di UPT sehingga kinerja organisasi dapat diukur dan dinilai dengan baik secara akuntabel.

CAPAIAN TUJUAN STRATEGIS

Pada Triwulan II Tahun 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Badan POM, yaitu meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, memperkuat sistem keamanan pangan nasional, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 106,07 dengan predikat “Istimewa” mencerminkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah melampaui target. Sebanyak 7 indikator dikategorikan “Sangat Baik”, 4 “Baik”, dan 8 belum dapat disimpulkan karena capaian melebihi 110% atau belum dinilai. Hal ini menunjukkan

efektivitas pelaksanaan program, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan pada aspek pelaporan dan pengelolaan data.

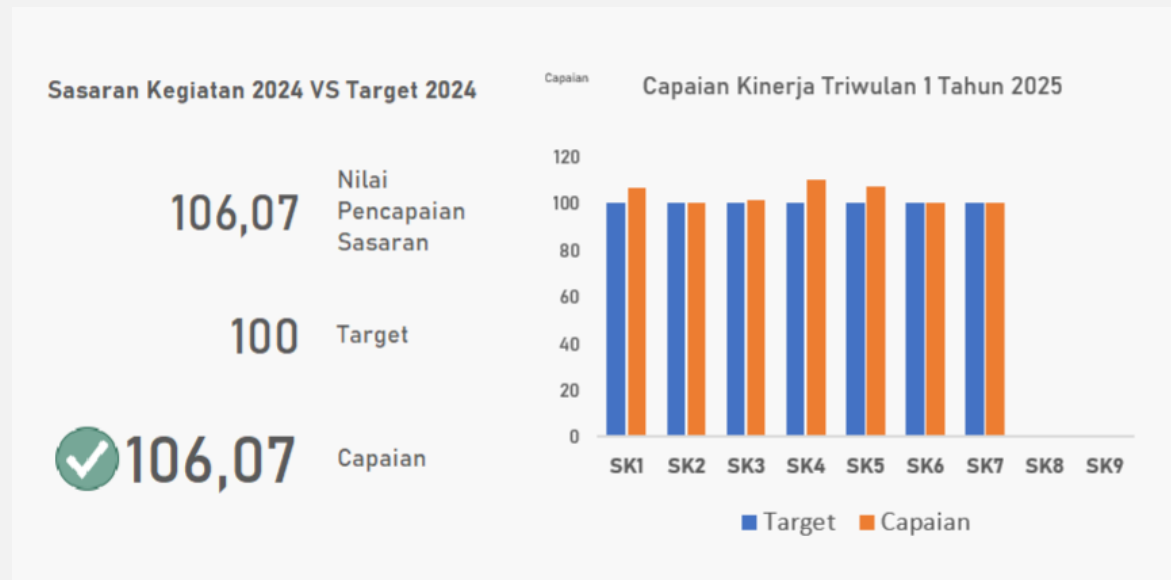
Capaian strategis terlihat pada indikator pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berisiko, dengan capaian di atas 100% pada hampir seluruh komoditi. Pendampingan UMKM juga menunjukkan hasil optimal, dengan capaian 107,14% meskipun realisasi anggaran nol akibat efisiensi. Program komunitas seperti Sekolah PJAS Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Aman Berbasis Komunitas berhasil melampaui target, menunjukkan keberhasilan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Laboratorium pengujian menunjukkan peningkatan kapasitas melalui penambahan ruang lingkup, metode analisis, dan pelatihan SDM, meskipun masih menghadapi kendala teknis seperti kerusakan alat dan keterlambatan reagen. Penindakan dan deteksi kejahatan obat dan makanan telah dilaksanakan sesuai target triwulan, namun capaian tahunan masih memerlukan intensifikasi.

Dari sisi tata kelola, indikator seperti Zona Integritas, AKIP, dan Indeks Pelayanan Publik belum dinilai, namun berbagai inovasi dan monitoring telah dilakukan untuk memperkuat reformasi birokrasi. Nilai Kinerja Anggaran menunjukkan realisasi 39,29%, mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan meskipun efisiensi belum optimal.

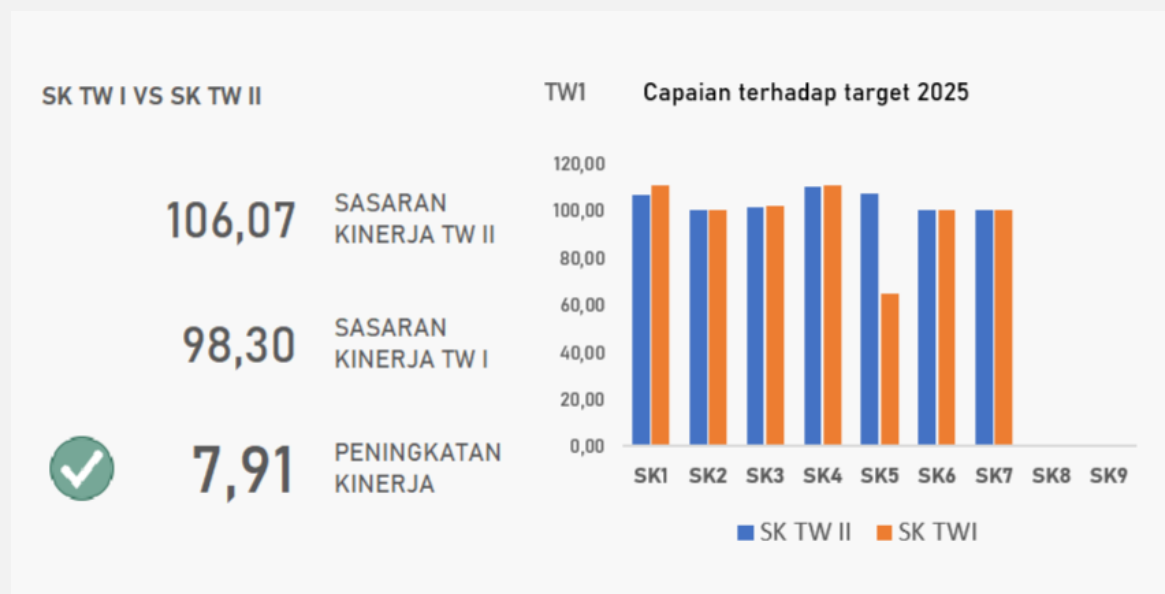
Secara keseluruhan, Balai Besar POM di Banda Aceh telah menunjukkan komitmen kuat dalam mencapai tujuan strategis melalui sinergi lintas sektor, inovasi program, dan penguatan sistem pengawasan. Ke depan, fokus diarahkan pada peningkatan efisiensi, validitas data, dan keberlanjutan program untuk memastikan capaian kinerja yang konsisten dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sebagai perbandingan, pada Triwulan I Tahun 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh mencatat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 98,30, yang berada dalam kategori “Baik.” Sementara pada Triwulan II, nilai NKO meningkat signifikan menjadi 106,07 dengan predikat “Istimewa.” Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam efektivitas pelaksanaan kegiatan, peningkatan

capaian indikator, serta pemulihan dari efisiensi anggaran yang sempat membatasi pelaksanaan program di awal tahun.



Bagan 1. Profil Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025

Perbaikan terlihat pada indikator strategis seperti pengawasan sampel berisiko, pendampingan UMKM, dan pelaksanaan program komunitas, yang pada Triwulan I masih terkendala oleh pembatasan operasional dan anggaran. Triwulan II menunjukkan bahwa relaksasi anggaran dan penguatan koordinasi antar tim kerja mampu mendorong pencapaian yang lebih optimal. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaporan dan efisiensi anggaran, tren peningkatan NKO ini menunjukkan arah yang positif menuju pencapaian target tahunan dan tujuan strategis organisasi.



Bagan 2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II terhadap Capaian Kinerja Triwulan II

SASARAN KEGIATAN 1 MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran ini mencakup pengawasan terhadap produk farmasi dan pangan olahan yang berisiko. Capaian NKO sebesar 106,07 dengan predikat “Istimewa” menunjukkan bahwa sebagian besar target telah tercapai. Indikator utama seperti persentase sampel farmasi berisiko yang ditindaklanjuti (111,71%), sampel PIRT (102,94%), dan pangan olahan (109,80%) menunjukkan performa sangat baik.

Namun, beberapa indikator seperti efektivitas pelaporan KTD/ESO dan pengawasan iklan belum dapat disimpulkan karena capaian melebihi 110% atau belum dinilai. Kendala teknis seperti keterlambatan reagen, kerusakan alat laboratorium, dan antrian pengujian menjadi tantangan yang perlu ditangani secara sistematis. Beberapa rekomendasi adalah Perkuat koordinasi lintas fungsi (inspeksi, pengujian, pelaporan), optimalkan pengadaan alat dan reagen dan revisi target indikator agar capaian >110% dapat dikategorikan.

Tabel 1. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2025

Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,67
---	--------

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
<i>Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	84,75	94,67	111,17
<i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i>	Nilai di TW IV	Nilai di TW IV	Nilai di TW IV
<i>Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	85,00	93,33	109,80
<i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT</i>	100	100	100
<i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	85,00	87,50	102,94
<i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>	78	80,63	103,37
<i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	93,00	100	107,53
<i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	85,00	100	117,65
<i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	96,75	99,72	103,07
<i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	85,00	100	117,65
<i>Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i>	85,8	101,38	118,16

SASARAN KEGIATAN 2 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Capaian indikator sebesar 100% menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi telah dilaksanakan sesuai target. Dua dari empat sarana telah diperiksa, termasuk satu sarana yang direkomendasikan untuk pencabutan izin karena tidak lagi beroperasi. Upaya peningkatan kinerja yaitu dengan memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha agar produk fortifikasi memenuhi standar..

Tabel 2. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Tahun 2025

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,00		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
<i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	50	50	100,00

SASARAN KEGIATAN 3 MENGUATNYA LABORATORIUM PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Nilai pemenuhan laboratorium terhadap standar kemampuan mencapai 101,54%, menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi aspek ruang lingkup, peralatan, kompetensi SDM, dan metode analisis. Penambahan ruang lingkup dan metode analisis serta pelatihan internal menjadi faktor pendukung utama.

Kendala yang dihadapi meliputi kerusakan alat, keterlambatan reagen, dan antrian pengujian. Strategi clock-off dan peminjaman reagen dari instansi lain menjadi solusi sementara.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan di periode berikutnya diantaranya adalah melanjutkan verifikasi metode analisis dan membuat pelatihan SDM, mempercepat pengadaan suku cadang dan reagen, serta meningkatkan efisiensi penggunaan alat laboratorium.

Tabel 3. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2025

Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	101,54		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
<i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i>	71,50	72,60	101,54

SASARAN KEGIATAN 4 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT

Efektivitas KIE mencapai 114,20%, menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami informasi terkait obat dan makanan. Inovasi seperti “Sanger Ureung Aceh” dan podcast “Berbisik BPOM” menjadi daya tarik tersendiri.

Namun, capaian >110% membuat indikator tidak dapat disimpulkan secara formal. Survei efektivitas KIE menunjukkan indeks sangat efektif (>95%).

Pengelolaan risiko pada kegiatan KIE Balai Besar POM di Banda Aceh dilakukan melalui penyebarluasan informasi strategis kepada media dan masyarakat guna mencegah pemberitaan negatif yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Risiko kelemahan pengendalian dinilai tidak signifikan, dengan efektivitas pengendalian yang tetap efektif. Aktivitas pengendalian dilakukan melalui laporan efektivitas KIE per triwulan, serta pemantauan terhadap atribut pengendalian untuk memastikan capaian indikator tetap terjaga.

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 4 Tahun 2025

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	127,72		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
<i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i>	86,54	98,83	114,20
<i>Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i>	60,00	70,00	116,67
<i>Jumlah desa pangan aman</i>	50,00	70,00	140,00
<i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>	50,00	70,00	140,00

SASARAN KEGIATAN 5 MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Capaian indikator sebesar 107,14% menunjukkan keberhasilan pendampingan terhadap UMKM dalam memperoleh sertifikat CPPOB, CPOTB, dan CPKB. Kolaborasi dengan OTA, SKPD, dan perbankan menjadi strategi utama.

Kegiatan pendampingan dilakukan secara daring dan hybrid karena efisiensi anggaran. Pelaku usaha menunjukkan komitmen tinggi dalam mengikuti proses sertifikasi. Keberhasilan ini didorong oleh sinergi strategis antara Balai Besar POM di Banda Aceh, Orang Tua Asuh (OTA), SKPD daerah, dan pelaku usaha. Pendekatan hybrid dalam pelaksanaan bimtek serta pendampingan intensif melalui desk CAPA memungkinkan fleksibilitas dan efektivitas, meskipun anggaran mengalami efisiensi. Kompetensi petugas yang ditingkatkan melalui pelatihan fasilitator CPPOB, CPOTB, dan CPKB turut memperkuat kualitas pendampingan. Respons positif dan komitmen tinggi dari pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam percepatan proses sertifikasi. Efisiensi anggaran yang tetap menghasilkan capaian optimal menunjukkan bahwa strategi kolaboratif dan adaptif dapat menjadi model pembinaan UMKM yang berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu produk serta kepatuhan terhadap regulasi.

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 5 Tahun 2025

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	107,14		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
<i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan</i>	42,00	45,00	107,14

SASARAN KEGIATAN 6 TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Pada Triwulan II Tahun 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh berhasil mencapai indikator kinerja penindakan kejahatan dengan capaian 100% dari target 42%, menunjukkan pelaksanaan penyidikan berjalan efektif. Realisasi berasal dari dua perkara aktif: satu perkara kosmetik yang telah mencapai tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU), dan satu perkara obat-obat tertentu yang berada pada tahap I.

Selain itu, terdapat satu perkara carry-over dari tahun 2020 yang juga berada pada tahap I.

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 6 Tahun 2024

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT				100,00		
Indikator Kinerja				Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				42,00	42,00	100,00

Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi intensif dengan Korwas PPNS Polda Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh, serta penerapan sistem reminder internal untuk memastikan batas waktu pelaporan dipatuhi. Penyusunan rencana kegiatan penyelesaian pemberkasan dan pelaksanaan operasi penindakan seperti Operasi Pangea turut mempercepat proses penyidikan.

Namun, jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 92,5%, capaian baru mencapai 45,41%, sehingga dikategorikan “Perlu Upaya Keras” untuk semester berikutnya.

Risiko utama yang dihadapi adalah tidak ditemukannya barang bukti saat operasi, yang diantisipasi melalui investigasi awal berbasis media sosial dan observasi lapangan. Laporan kinerja ini menjadi bahan evaluasi interim untuk memastikan target akhir tahun dapat tercapai.

Ke depan, Balai Besar POM di Banda Aceh merencanakan intensifikasi operasi investigasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan strategi penindakan berbasis intelijen dan pengaduan masyarakat. Komitmen terhadap ketepatan waktu, akurasi pelaporan, dan integritas proses penyidikan menjadi kunci keberhasilan indikator ini.

SASARAN KEGIATAN 7 TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Pada Triwulan II Tahun 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh mencatat capaian 100% untuk indikator deteksi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, sesuai target triwulan dan dikategorikan “Baik.” Capaian ini berasal dari ketepatan pelaporan analisis penelusuran siber, sementara dua komponen lainnya—analisis kerawanan dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal—belum terlaksana karena belum ada arahan dari pusat dan jadwal penyusunan analisis baru akan dilakukan pada Triwulan IV.

Risiko utama yang dihadapi adalah keterlambatan pelaporan hasil patroli siber, yang telah diantisipasi melalui pengingat internal dan pengawasan ketua tim. Dukungan teknis dari tim IT serta koordinasi dengan PUSDATIN BPOM RI turut menjaga kelancaran pelaporan melalui sistem digital.

Untuk meningkatkan kinerja, Balai Besar POM merencanakan pelaporan berkala, penguatan analisis kejahatan, dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal agar target tahunan dapat dipenuhi secara optimal.

Tabel 7. Capaian Sasaran Kegiatan 7 Tahun 2025

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT			100,00
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
<i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>			
	50,00	50,00	100,00

SASARAN KEGIATAN 8 LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan 8, yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) Balai Besar POM di Banda Aceh, belum dinilai karena penilaian dilakukan pada akhir tahun. Meski belum tersedia capaian kuantitatif, berbagai upaya peningkatan kualitas layanan telah

dilaksanakan, termasuk pemutakhiran data pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pembenahan sarana prasarana, serta penguatan aspek konsultasi dan pengaduan.

Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan 8 Tahun 2025

Layanan Publik UPT yang prima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
	Dinilai	Dinilai	Dinilai
<i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>	pada	pada	pada
	TW IV	TW IV	TW IV

Risiko yang teridentifikasi adalah terganggunya layanan akibat pelanggaran kontrak kerja oleh petugas pelayanan. Pengendalian dilakukan melalui kontrak kerja yang jelas dan monitoring berkala. Realisasi anggaran masih sangat rendah (0,30%), sehingga efisiensi belum dapat dinilai.

SASARAN KEGIATAN 9 TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Sasaran Kegiatan 9 belum ada penilaian pada triwulan II dengan didukung 4 (empat) indikator kinerja.

Selama Triwulan II Tahun 2025, empat indikator dalam Sasaran Kegiatan 9—yakni Zona Integritas (ZI), Akuntabilitas Kinerja (AKIP), Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Risiko—belum memperoleh penilaian karena evaluasinya dijadwalkan pada Triwulan IV. Meski belum tersedia capaian numerik, Balai Besar POM di Banda Aceh telah menjalankan berbagai inisiatif untuk memperkuat tata kelola, seperti pemantauan reformasi birokrasi, pengembangan inovasi layanan, dan evaluasi internal yang berkesinambungan.

Tabel 9. Capaian Sasaran Kegiatan 9 Tahun 2025

Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV

Risiko yang muncul mencakup kurangnya tindak lanjut atas rekomendasi, ketidaktepatan data kinerja, serta metode pengumpulan data yang belum seragam. Untuk mengatasinya, dilakukan penguatan koordinasi, penjadwalan pelaporan yang ketat, dan pemanfaatan platform digital untuk konsistensi data.

Realisasi anggaran masih minim, sehingga efisiensi belum tercapai. Fokus peningkatan diarahkan pada konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan rencana aksi, dan penguatan sistem akuntabilitas agar tata kelola organisasi semakin transparan, responsif, dan berdaya saing.

REALISASI ANGGARAN

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mengalokasikan Anggaran DIPA tahun 2025 TW II sebesar Rp20.322.633.000 yang telah dibelanjakan dengan **realisasi anggaran 34,43 persen** sebesar Rp 6.997.374.273 dan berhasil memperoleh

Nilai Kinerja Organisasi 106,07 dengan kategori **Istimewa**. Banyak output menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik, namun realisasi anggaran masih sangat rendah. Hal ini karena efisiensi tahun 2025 berlangsung hingga bulan April sehingga realisasi output dan anggaran Triwulan II masih di bawah 50 persen. Perlu melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penguatan koordinasi antar unit untuk meningkatkan realisasi anggaran.

EFISIENSI ANGGARAN

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mengalokasikan Anggaran DIPA tahun 2025 sebesar Rp. 20.322.633.000 yang telah dibelanjakan dengan **realisasi anggaran 34,43 persen** sebesar Rp 6.997.374.273 dengan perolehan **Nilai Kinerja Organisasi 106,07** kategori **Istimewa**. Realisasi anggaran tersebut memiliki capaian output kegiatan di Triwulan II sebesar 35,96 persen sehingga memiliki **tingkat efisiensi TE sebesar 0,04**.

HIGHLIGHT KINERJA

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan beberapa kegiatan selama triwulan II tahun 2025 guna mendukung perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan.



Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BPOM melalui Direktorat Registrasi Obat Bahan Alam dan Kosmetik telah **mengembangkan sistem pendaftaran produk yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS)**. "Penyederhanaan proses registrasi ini harus diiringi dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk.



BPOM Aceh menghadiri kegiatan Launching Pemberian Makan Bergizi Bersama Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Anak Balita Gizi Kurang serta Pelayanan Kesehatan Puskesmas Keliling di Gampong pada 17 April 2025. Kegiatan yang dipusatkan di Kompleks Masjid Al-Furqan, Gampong Beurawe ini bertujuan untuk **meningkatkan status gizi ibu hamil dan balita, serta memperkuat layanan kesehatan** dasar langsung di tingkat gampong sebagai upaya nyata percepatan penurunan angka stunting di Kota Banda Aceh.



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh bersama anggota Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) Aceh menggelar inovasi bertajuk "Sanger Ureueng Aceh" pada 24 April 2025. Melalui pendekatan yang menyenangkan dan edukatif di warkop, ruang nongkrong favorit masyarakat Aceh, kegiatan ini mengusung semangat Tribakti Pangan Aman, yang mencakup tiga aksi utama: **pemantauan sederhana, pengujian cepat, serta edukasi** langsung kepada masyarakat

dan pelaku usaha makanan dan minuman.





Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh menyelenggarakan kegiatan Advokasi Program Prioritas Nasional (Pro PN) yang mencakup Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari hingga 30 April 2025 di Kota Banda Aceh. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk **menggalang dukungan dan memperkuat komitmen** Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh serta lintas sektor terkait dalam mendukung implementasi program keamanan pangan di seluruh titik rantai pangan sesuai peran masing-masing.



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh menyelenggarakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa 08 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Balai Desa Alue Naga, Kota Banda Aceh, sebagai bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Nasional (PRO PN) “Desa Pangan Aman” yang bertujuan untuk **meningkatkan kapasitas masyarakat desa** dalam menjaga keamanan pangan demi mendukung upaya penurunan stunting. Melalui kegiatan ini, BPOM Aceh berharap para kader yang telah dilatih dapat menjadi agen perubahan di

desanya masing-masing. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, para kader diharapkan mampu mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan serta berkontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan pangan yang aman dan sehat.



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh melaksanakan Sosialisasi SAPA Sekolah pada 09 Mei 2025 di Aula SMP Negeri 10 Banda Aceh. Melalui kegiatan ini, diharapkan SAPA Sekolah dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang **membudayakan keamanan pangan di lingkungan pendidikan** dan melalui pembekalan kepada komunitas sekolah, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak, serta lahirnya generasi cerdas yang sadar pangan aman sejak dini.





Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh melaksanakan Bimbingan Teknis Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan Olahan secara hybrid pada 16 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi langkah awal dari proses pendampingan UMKM setelah dilakukan penetapan target pelaku usaha pangan olahan yang akan didampingi. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan **dengan pendampingan secara intensif di sarana** produksi masing-masing, hingga pelaku usaha berhasil memperoleh Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda bersama SAKA POM menggelar kegiatan inovatif bertajuk “Sanger Ureueng Aceh”, pada 15 Mei 2025. Kegiatan ini menyasar lima warung kopi di wilayah Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaannya, BPOM Aceh juga membuka pojok konsultasi sebagai ruang interaksi dua arah dengan masyarakat, untuk **memberikan informasi, menjawab pertanyaan, serta mendampingi proses registrasi produk**, khususnya bagi pelaku UMKM lokal.



BPOM Aceh turut hadir dan memberikan dukungan pada peluncuran Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik (MPP), MPP Care, dan One Stop Service (OSS) khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 19 Mei 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung MPP Kota Banda Aceh ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah daerah untuk **menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi**, khususnya bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Melalui sistem layanan terpadu ini, masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses berbagai informasi serta menghubungi instansi terkait tanpa harus berpindah-pindah tempat atau bingung dengan prosedur yang rumit.





Balai Besar POM di Banda Aceh menyelenggarakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa pada 08 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Balai Desa Alue Naga, Kota Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk **meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam menjaga keamanan pangan** demi mendukung upaya penurunan stunting. Melalui kegiatan ini, BPOM Aceh berharap para kader yang telah dilatih dapat menjadi

agen perubahan di desanya masing-masing.



SAPA Sekolah yang digelar pada 09 Mei 2025 di Aula SMP Negeri 10 Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan Program Prioritas Nasional (PRO PN) yang bertujuan untuk **meningkatkan pemahaman dan pengetahuan komunitas sekolah** tentang pentingnya pengawasan dan pengawalan keamanan pangan di lingkungan pendidikan, khususnya di tingkat SD dan SMP.



Bersama SAKA POM, Balai Besar POM di Banda Aceh menggelar kegiatan inovatif bertajuk “Sanger Ureueng Aceh” pada 15 Mei 2025 yang menyoroti 5 (lima) warung kopi di Banda Aceh. Melalui kegiatan ini diharapkan **memperkuat kolaborasi masyarakat, pelaku usaha dan lintas sektor** dalam mendukung kemandirian dan pertumbuhan UMKM Aceh.





Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh bersama bersama Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) menggelar kegiatan inovatif bertajuk “Sanger Ureueng Aceh” pada 02 Juni 2025. Kegiatan merujuk 5 warung kopi di wilayah Aceh Besar. Dalam kegiatan ini, juga dibuka pojok konsultasi. Pengunjung bisa mendapatkan informasi, mengajukan pertanyaan, dan berkonsultasi terkait proses registrasi produk, terutama bagi pelaku

UMKM lokal.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
HIGHLIGHT KINERJA.....	xvi
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4.2. Analisis Lingkungan Strategis Internal	9
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	22
BAB III	30
AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30
1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	179



1.3	Pemanfaatan Informasi Kinerja	193
1.4	Realisasi Anggaran	193
a.	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2025	193
b.	Tingkat Efisiensi berdasarkan Sasaran Kegiatan	194

BAB IV 204

PENUTUP 204

4.1	Kesimpulan.....	204
4.2	Saran	206

L A M P I R A N..... 209



DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi	14
Table 2. Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh.....	18
Table 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025	20
Table 4. Kategori Capaian Indikator Kinerja	27
Table 5. Nilai Predikat Sasaran Kegiatan	31
Table 6. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	34
Table 7. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya.....	36
Table 8. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025	36
Table 9. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	40
Table 10. Target dan Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	42
Table 11. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025	43
Table 12. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	45
Table 13. Target dan Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	46
Table 14. Perbandingan realisasi TW II dengan Triwulan sebelumnya	48
Table 15. Perbandingan realisasi TW II dengan target tahun 2025	48
Table 16. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	52
Table 17. Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	54
Table 18. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya.....	55
Table 19. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target 2025	55
Table 20. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	57



<i>Table 21. Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti</i>	58
Table 22. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya	60
<i>Table 23. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025</i>	60
<i>Table 24. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	63
<i>Table 25. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>	64
Table 26. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya	66
<i>Table 27. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>	66
<i>Table 28. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	69
<i>Table 29. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	71
Table 30. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya	73
<i>Table 31. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan target tahun 2025</i>	74
<i>Table 32. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	75
<i>Table 33. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	77
Table 34. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya	78
<i>Table 35. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025</i>	78
<i>Table 36. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	80
<i>Table 37. Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	82
Table 38. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya	85
<i>Table 39. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025</i>	85
<i>Table 40. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	88



<i>Table 41. Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	90
<i>Table 42. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya.....</i>	91
<i>Table 43. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025</i>	92
<i>Table 44. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	94
<i>Table 45. Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi</i>	95
<i>Table 46. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya.....</i>	98
<i>Table 47. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025</i>	99
<i>Table 48. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	101
<i>Table 49. Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	103
<i>Table 50. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya.....</i>	104
<i>Table 51. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025</i>	104
<i>Table 52. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	106
<i>Table 53. Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i>	108
<i>Table 54. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya.....</i>	109
<i>Table 55. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025</i>	109
<i>Table 56. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	114
<i>Table 57. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i>	116
<i>Table 58. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya.....</i>	117
<i>Table 59. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025</i>	118
<i>Table 60. Kategori Hasil Tingkat Efektifitas KIE.....</i>	119
<i>Table 61. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	120



<i>Table 62. Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....</i>	<i>121</i>
<i>Table 63. Bobot Progres Tahapan Program Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan</i>	<i>123</i>
<i>Table 64. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya</i>	<i>123</i>
<i>Table 65. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025</i>	<i>124</i>
<i>Table 66. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>125</i>
<i>Table 67. Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh</i>	<i>126</i>
<i>Table 68. Bobot Progres Tahapan Program Desa Pangan Aman.....</i>	<i>127</i>
<i>Table 69. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya.....</i>	<i>128</i>
<i>Table 70. Perbandingan Realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025</i>	<i>128</i>
<i>Table 71. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>129</i>
<i>Table 72. Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh</i>	<i>130</i>
<i>Table 73. Bobot Progres Tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas</i>	<i>132</i>
<i>Table 74. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya.....</i>	<i>132</i>
<i>Table 75. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025</i>	<i>133</i>
<i>Table 76. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>134</i>
<i>Table 77. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan</i>	<i>135</i>
<i>Table 78. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya</i>	<i>138</i>
<i>Table 79. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025</i>	<i>138</i>
<i>Table 80. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>142</i>
<i>Table 81. Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.....</i>	<i>144</i>



Table 82. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya	145
Table 83. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025	145
Table 84. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	147
Table 85. Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	148
Table 86. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025	149
Table 87. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	151
Table 88. Realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik UPT	152
Table 89. Kategori nilai Indeks Pelayanan Publik.....	153
Table 90. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025	154
Table 91. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	155
Table 92. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	156
Table 93. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025	157
Table 94. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	162
Table 95. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	163
Table 96. Kategori Penilaian SAKIP	163
Table 97. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024	164
Table 98. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025	165
Table 99. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	167
Table 100. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	168
Table 101. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025	169
Table 102. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	173
Table 103. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	175
Table 104. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025	176
Table 105. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	177



Table 106. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan	195
Table 107. Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025	198



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh.....	4
Gambar 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pegawai	10
Gambar 3. Gambar Bangunan Balai Besar POM di Banda Aceh.....	11
Gambar 4. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	12
Gambar 5 NKO Balai Besar POM di Banda Aceh s.d Triwulan II Tahun 2025	30





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan

Menghadapi tantangan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh adalah:

- a. Pemantauan dan Pengawasan: Pemantauan dan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Aceh dengan luas wilayah dan jangkauan yang jauh bisa menjadi tugas yang rumit bila tidak didukung dengan komitmen yang kuat dari lintas sektor terkait di Kab/Kota.
- b. Peredaran Obat dan Makanan Ilegal secara *online*: Maraknya peredaran Obat dan Makanan yang diperjual belikan secara *online* melalui media sosial dan banyak diminati oleh golongan muda, menjadi tantangan serius yang memerlukan konsistensi dalam pengawasannya melalui peningkatan *siber patrol* dan informasi dari masyarakat.



- c. Kepatuhan pelaku usaha: Memastikan produk yang dihasilkan dan pendistribusian yang dilakukan oleh pelaku usaha berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku guna melindungi masyarakat dari produk obat, dan makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan atau tidak memenuhi standar.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk mencapai tujuan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh ini, sangat dibutuhkan adanya kerjasama dan komitmen yang kuat antara BPOM, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawal Obat dan Makanan aman di Provinsi Aceh.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698-23926, Fax. (0651) 22735, 22845. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Aceh sebagai berikut:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM.
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM.
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan Tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas





UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

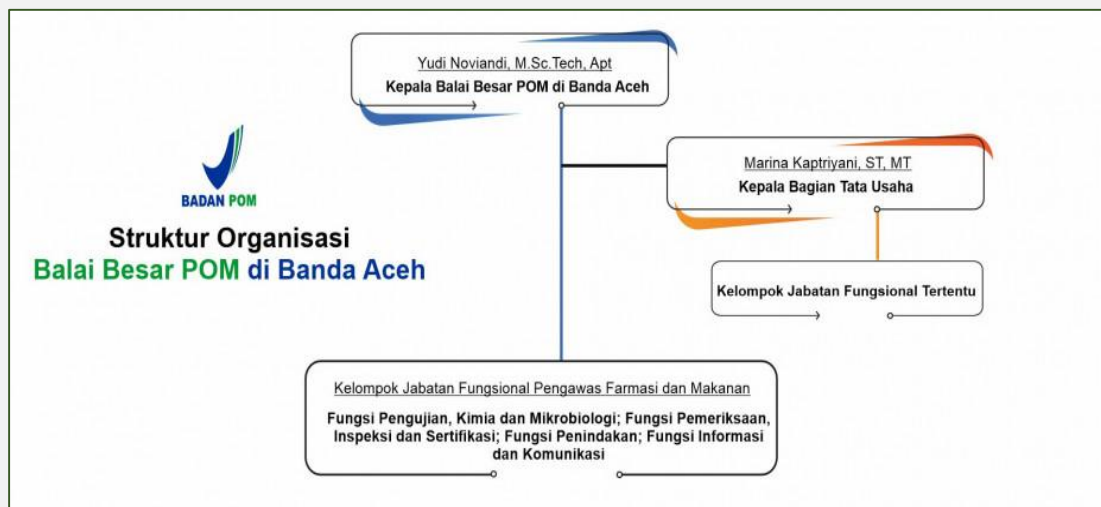
Fungsi

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada peran Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai Lembaga Pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.



1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 Fungsi serta kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Fungsi Pengujian, mempunyai tugas dan fungsi:
 - Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
 - Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
- b. Fungsi Pemeriksaan, mempunyai tugas dan fungsi:
 - Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan



kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.

- Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi produk obat dan makanan.
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan terdiri dari:
 - Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
 - Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

c. Fungsi Penindakan, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. Fungsi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang



pengawasan Obat dan Makanan.

- Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
 - Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi, komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan system pengawasan full spectrum mulai dari premarket hingga post market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas





sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Kapasitas Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu:

1. Strategi Pencegahan: melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
2. Strategi pengawasan: melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilitasi database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko, dan perkuatan implementasi regulasi.
3. Strategi penindakan: difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.4.1. Permasalahan Utama



Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh antara lain:

1. Percepatan penanganan Stunting

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*. BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penjualan Produk Obat dan Makanan secara online

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun, aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming-iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara online namun motto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. Kemudahan dalam melakukan pengecekan terhadap produk saat ini dapat dilakukan dengan





memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile, yang dapat diakses secara online Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan patroli siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

3. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan tahun 2025 berusaha memperoleh predikat Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) dengan tetap konsisten melaksanakan kegiatan dan anggaran secara akuntabel dan berorientasi pelayanan prima.

4. Regionalisasi Laboratorium Pengujian

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengujian laboratorium, telah diterapkan sistem regionalisasi laboratorium, konsep regionalisasi laboratorium ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 199 Tahun 2023 tentang Tim Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Konsep dasar dari regionalisasi laboratorium adalah pengelompokan laboratorium berdasarkan region dan spesialisasi pengujian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Model ini tetap mengutamakan validitas dan kecepatan dalam hal pelaksanaan pengujian yang tentunya akan mempercepat tindak lanjut yang perlu dilakukan.

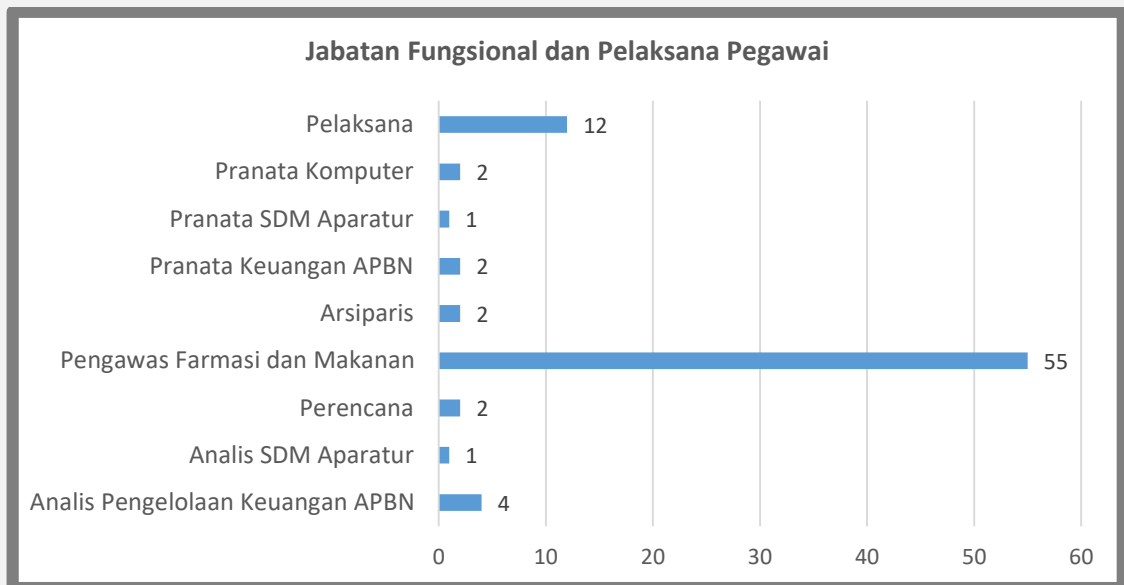
1.4.2. Analisis Lingkungan Strategis Internal

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh saat ini adalah 83 orang yang terdiri atas 70 PNS dan 13 PPPK. Sebanyak 55 orang menduduki jabatan fungsional farmasi dan makanan (PFM), 14 orang jabatan fungsional tertentu lainnya dan 12 orang pelaksana, Pegawai Pemerintah Non



Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 4 orang, tenaga outsourcing 16 orang, sehingga total pegawai berjumlah 111 orang.



*Gambar 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pegawai
Balai Besar POM di Banda Aceh*

Untuk mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik.

b. Sumber Daya Lainnya

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri dari 2 gedung kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai Besar POM di Banda Aceh seluas 3.262 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 3.169 m², listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 KVA, 10 unit kendaraan dinas. Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi, peralatan dan instrumen modern seperti PCR, AAS, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatografi Gas, GC-MS, Spectrofotometer, Elisa Reader dan lain-lain. Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu yang telah tersertifikasi yaitu: ISO 9001:2015, dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya.





Gambar 3. Gambar Bangunan Balai Besar POM di Banda Aceh

c. Keunggulan Balai Besar POM di Banda Aceh

Keunggulan Balai Besar POM di Banda Aceh dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari fasilitas, peran strategis, maupun kontribusinya terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Berikut beberapa keunggulannya:

➤ Fasilitas Laboratorim

Banda Aceh memiliki fasilitas laboratorium pengujian yang lengkap untuk menguji keamanan dan mutu produk sediaan farmasi, pangan olahan, kosmetik, suplemen kesehatan, produk bahan berbahaya. Alat laboratorium ini memungkinkan mendeteksi bahan berbahaya dan memverifikasi kandungan produk secara akurat.

➤ Wilayah Strategis

Balai Besar POM di Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi Aceh mampu menjangkau wilayah paling barat Indonesia dan sangat strategis untuk mengawasi distribusi produk dari dalam maupun luar negeri (termasuk produk impor dari negara tetangga).

➤ Pelayanan Cepat dan Responsif

Pelayanan yang diberikan berupa pengujian sampel secara cepat dan layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat yang dilakukan secara aktif, baik secara langsung maupun lewat media sosial.

➤ Aktif dalam Edukasi dan Sosialisasi

Seperti yang diketahui, Balai Besar POM di Banda Aceh aktif dalam sosialisasi keamanan pangan di sekolah, edukasi kepada pelaku UMKM tentang Cara



Produksi Pangan yang Baik (CPPOB) maupun pendampingan sertifikasi produk.

➤ Pendampingan UMKM

Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM agar produknya aman untuk dikonsumsi, mendapatkan izin edar serta berdaya saing di pasar lokal dan nasional.

➤ Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Melakukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindag dan instansi terkait untuk menjaga peredaran produk yang aman dan legal di masyarakat.

1.4.3. Eksternal

a. Kondisi geografis dan Demografis



Gambar 4. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara 010 58' 37,2"-060 04' 33,6" LU dan 940 57' 57,6"-980 17' 13,2" BT. dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah: Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia. Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas wilayah 56.770,81 km². Seiring dengan perkembangan organisasi untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 (dua) LOKA POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018





tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan terbentuknya 2 (dua) LOKA POM tersebut, sehingga luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km².

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana pada BAB VIII ketentuan peralihan Pasal 29 Poin C disebutkan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan sebelum peraturan Badan ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan program dan kegiatan tersebut berakhir. Maka terhitung 1 Januari 2024 pelaksanaan program dan kegiatan telah mengacu pada ketentuan dalam PerBPOM tersebut dengan cakupan wilayah pengawasan dari 3 (tiga) UPT BPOM di wilayah Provinsi Aceh (yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut:

- **Balai Besar POM di Banda Aceh**

Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 9 Kabupaten dan 4 Kota (13 Kab/Kota). Dari 13 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, 1 (satu) Kota merupakan daerah kepulauan yaitu Kota Sabang.

- **Loka POM Aceh Selatan**

Cakupan pengawasan Loka Aceh Selatan adalah 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simeulue (merupakan pulau terluar).

- **Loka POM Aceh Tengah**



Untuk Loka Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 5 (lima) Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Nagan Raya.

b. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh meliputi industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, dan industri pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 1. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	27	Sarana
2.	Apotek	661	Sarana
3.	Toko Obat	416	Sarana
4.	Klinik	355	Sarana
5.	Rumah Sakit	64	Sarana
6.	Puskesmas	214	Sarana
7.	GFK	14	Sarana
8.	Distribusi Makanan	2266	Sarana
9.	Distribusi Kosmetik dan Salon	2887	Sarana
10.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	2824	Sarana
TOTAL SARANA DISTRIBUSI		9728	Sarana
Sarana Produksi			
1.	Industri Farmasi	0	Sarana
2.	Industri Obat Tradisional	0	Sarana
3.	UMOT	12	Sarana
4.	UKOT	9	Sarana
5.	Industri Kosmetik	10	Sarana
6.	Industri Makanan (MD)	141	Sarana
7.	PIRT	2273	Sarana
TOTAL SARANA PRODUKSI		2445	Sarana





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029. Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang dihadapi di masa depan, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai Unit Pelaksana Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas dan fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi Aceh diharapkan mampu melihat perubahan lingkungan yang dinamis dan mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi Badan POM 2025-2029 yaitu:

VISI

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi dalam memberikan standar tertinggi regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.



MISI

Misi Balai Besar POM di Banda Aceh sama dengan Misi BPOM 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

- 1) **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.** Tujuan ini menegaskan komitmen Balai Besar POM di Banda Aceh dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas
- 2) **Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.** Tujuan ini untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
- 3) **Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.** Tujuan ini menggaris bawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh berupaya memfasilitasi





lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

- 4) **Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.** Tujuan ini menekankan peran Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- 5) **Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.** Tujuan ini merupakan komitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan dalam memberikan layanan publik yang prima.

Pada penyusunan Renstra periode tahun 2020-2025, BPOM menggunakan pendekatan Balance Corecard dengan pendekatan perspektif baik dari Stakeholders Perspective, Internal Process Perspective maupun Learning and Growth Perspective. Namun, pada penyusunan Renstra 2025-2029 direvisi sesuai dengan pedoman maupun Permen PPN Nomor 10 tahun 2023. Perumusan Sasaran Strategis sekarang disesuaikan berdasarkan Logical Framework yang menggambarkan cascading/penjenjangan kinerja BPOM mulai dari level sasaran strategis, sasaran program hingga sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh disusun berdasarkan logical frame work BPOM yang merupakan cascading dari sasaran strategis BPOM hingga level Rincian Output pada UPT.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025.



Table 2. Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		Persentase PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.3
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00
3.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.00
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54



		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	90.3
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5
7.	Terlaksananya kegiatan Deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
8.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.2

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja pada tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM



di Banda Aceh Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		Persentase PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.3
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase Fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00
3.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.00



4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	90.3
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5
7.	Terlaksananya kegiatan Deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
8.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.2

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.



2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan pada triwulan berikutnya. Pada Bulan Mei 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan revisi target bulanan pada RHPK (Rencana Hasil Pelaksanaan Kegiatan) indikator Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	618,898,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	43,550,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	318,123,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	23,662,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	23,662,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		25	25	25	25	50	50	50	75	75	75	75	5,069,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			71	71	71	71.5	71.5	71.5	72	72	72	73	2,992,448,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	272,181,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				40	50	60	62.5	77.5	87.5	97.5	100	10	436,427,000
		03 - Jumlah desa pangan aman				25	25	50	50	60	70	90	100	4	709,656,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	50	50	75	100	100	100	100	1	140,558,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	8	18	28	38	42	47	57	67	77	82	90.3	48,359,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	14	22	31	42	51	68	71	74	82	92.5	473,984,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	73,305,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT											4.7	112,285,000	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM											90.25	482,100,000	
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM											82.78	106,030,000	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM											5	12,090,091,000	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM											3.2	22,640,000	
Total														20,121,623,000	

Banda Aceh, 05 June 2025

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh



Yudi Novianti

2.5 Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Table 4. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$< 110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90$	
Kurang	$< 60\%$	

Kategori capaian indikator kinerja tabel di atas digunakan untuk penilaian pada point a BAB III dan tabel capaian kinerja di bawah untuk digunakan pada penilaian point c di BAB III.

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$).	

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran kegiatan digunakan pembobotan untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):



Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$\text{NPS 2} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS 3} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3}}{3}$$

$$\text{NPS 4} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3} + 1\text{NPI 4}}{4}$$

$$\text{NPS 5} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3} + 1\text{NPI 4} + 1\text{NPI 5}}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebagai berikut: Menunjuk 1 orang petugas penanggungjawab data di Balai Besar POM di Banda Aceh yang disahkan oleh SK Kepala BPOM.

1. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh.
2. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada aplikasi Sigarang secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai.
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI (Capaian Output), monev Bappenas, RHPK dan Aplikasi e-performance.
4. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance.
5. Reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana



penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara berkala untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.





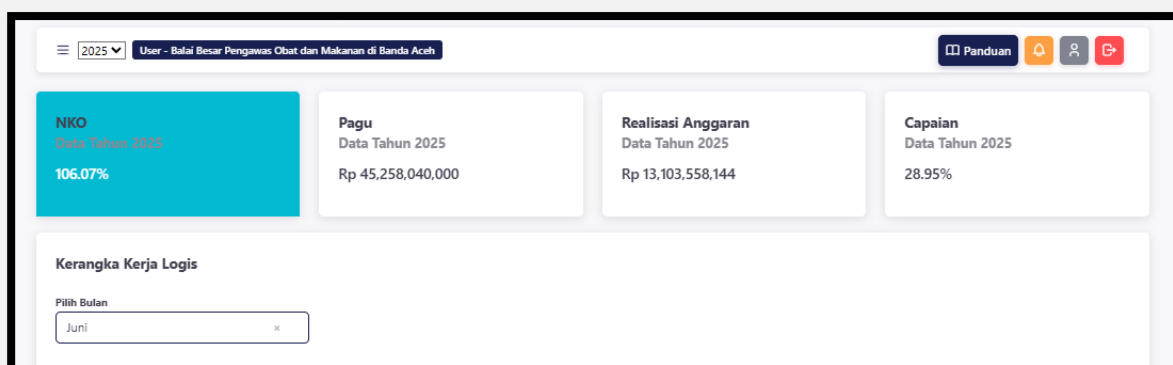
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Indikator Kinerja Periodik tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dengan membuat format matriks tindak lanjutnya.

Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan II di Tahun 2025 berhasil meraih Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) dengan capaian 106.07% dengan predikat Istimewa, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan cukup efektif dan efisien. Namun, masih perlunya evaluasi terhadap beberapa indikator yang menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dan upaya-upaya strategis untuk peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.



Gambar 5 NKO Balai Besar POM di Banda Aceh s.d Triwulan II Tahun 2025





Table 5. Nilai Predikat Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target TW II	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian Dinormalisasi (%)	Kategori
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 106.07 dengan Predikat Istimewa								
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 110.67 dengan kategori Sangat Baik	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75	94.67	117.99	110.00	Tidak dapat disimpulkan 
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Nilai di TW IV				
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	93.33	109.80	109.80	Sangat Baik 
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	Baik 
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.50	102.94	102.94	Sangat Baik 
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78.00	80.63	103.37	103.37	Sangat Baik 
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	100	107.53	107.53	Sangat Baik 
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65	110.00	Tidak dapat disimpulkan 

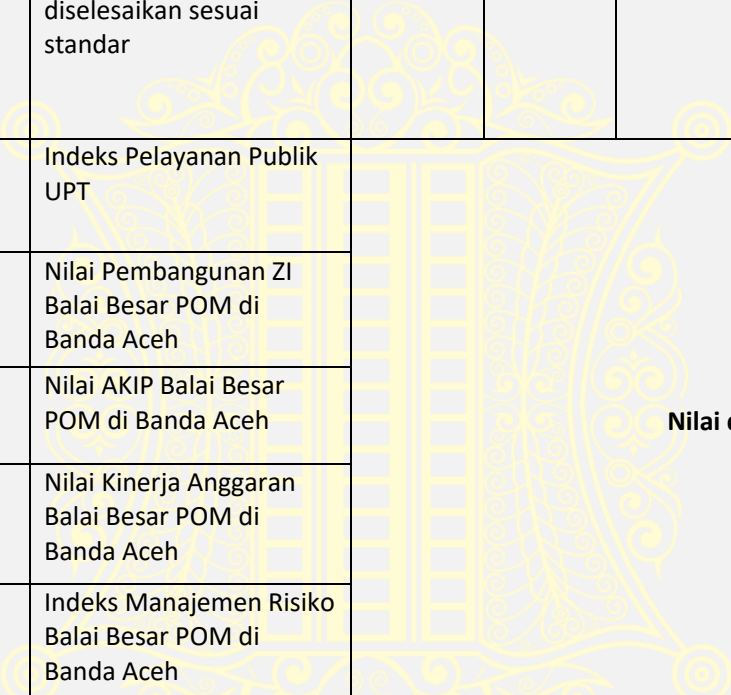




Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target TW II	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian Dinormalisasi (%)	Kategori
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.72	103.07	103.07	Tidak dapat disimpulkan 
		IKSK 10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65	110.00	Tidak dapat disimpulkan 
		IKSK 11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8	101.38	118.16	110.00	Tidak dapat disimpulkan 
SK2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK 12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50.00	50.00	100.00	100.00	Baik 
SK3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK 13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.50	72.6	101.54	101.54	Sangat Baik 
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK 14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	98.83	114.20	110.00	Tidak dapat disimpulkan 
		IKSK 15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	60.00	70.00	116.67	110.00	Tidak dapat disimpulkan 
		IKSK 16	Jumlah Desa pangan aman	50.00	70.00	140	110.00	Tidak dapat disimpulkan 
		IKSK 17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	50.00	70.00	140	110.00	Tidak dapat disimpulkan 
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK 18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	42.00	45.00	107.14	107.14	Sangat Baik 





Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target TW II	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian Dinormalisasi (%)	Kategori
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK 19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42.00	42.00	100.00	100.00	Baik 
SK7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK 20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50,00	100.00	100.00	Baik 
SK8	Layanan Publik UPT yang prima	IKSK 21	Indeks Pelayanan Publik UPT	 Nilai di TW IV				
SK9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK 22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh					
		IKSK 23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh					
		IKSK 24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh					
		IKSK 25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh					

Dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja dengan kategori **Sangat Baik**, 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori **Baik**, 8 (delapan) indikator kinerja dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan** dan 6 (enam) indikator kinerja yang belum ada penilaian (baru dinilai pada TW IV).



SASARAN KEGIATAN I

Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 11 (sebelas) IKU yang dapat dicapai dengan sangat baik dan melampaui target.

Indikator Kinerja

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025

Table 6. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75	94.67	111.719 	Tidak dapat disimpulkan

Sediaan farmasi berisiko yang dimaksud dalam indikator ini meliputi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling dan dilakukan pengujian berdasarkan analisis risiko. Sampel dipilih berdasarkan analisis risiko dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus: $(A+B+C+D) / 4$

$$\frac{(A+B+C+D)}{4} \times 100\%$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- Persentase sampel Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- Persentase sampel Obat Bahan Alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- Persentase sampel Suplemen Kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- Persentase sampel Kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan





Kriteria sampel Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 1). Kesesuaian perencanaan sampling mencakup kesesuaian dengan target sampel, rentak kategori sampel dan rentak kategori kelas terapi. 2). Kesesuaian pelaksanaan sampling mencakup kesesuaian dengan rentak periode/waktu sampling dan ketentuan evaluasi penandaan. 3). Kesesuaian pelaksanaan pengujian mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai pedoman sampling yang berlaku. 4). Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir dan waktu pelaporan sesuai pedoman sampling. 5). Kesesuaian pelaporan monitoring penarikan.

Kriteria sampel Obat Bahan Alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 1). Pemenuhan target pengawasan mencakup jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai dengan pedoman sampling. 2). Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan. 3). Kesesuaian parameter uji. 4). Akurasi dalam penentuan kesimpulan. 5). Tanggapan atas surat tindak lanjut.

Kriteria sampel Suplemen Kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 1). Pemenuhan target pengawasan mencakup jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai dengan pedoman sampling. 2). Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan. 3). Kesesuaian parameter uji. 4). Akurasi dalam penentuan kesimpulan. 5). Tanggapan atas surat tindak lanjut.

Kriteria sampel Kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 1). Pemenuhan target pengawasan mencakup jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai dengan pedoman sampling. 2). Kesesuaian pelaksanaan sampling. 3). Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan. 4). Ketepatan dalam penentuan kesimpulan. 5). Tanggapan atas surat tindak lanjut.

Selama TW II, jumlah sampel sediaan farmasi yang disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh yang masuk ke laboratorium sendiri maupun ke laboratorium regional dengan total sebanyak 290 sampel terdiri dari 72 sampel obat, 78 sampel Obat Bahan Alam, 24 sampel suplemen kesehatan, 116 sampel kosmetik dan telah



selesai ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah dari hasil pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan persentase 94.67% dari target 84.75%. Sementara jumlah sampel obat yang masuk ke laboratorium baik yang disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh maupun yang disampling balai regional sebanyak 92 sampel dan keseluruhan dapat diuji parameternya sesuai ketentuan. Capaian persentase indikator ini pada TW II sebesar 111.71% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 7. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75	100	94.67	117.99	111.71

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 menurun apabila dibandingkan dengan triwulan I namun masih dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Penurunan realisasi pada triwulan II dikarenakan terdapat penurunan pada indikator kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan komoditi sampel obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik sehingga persentase tiap komoditi menurun dari 100% menjadi 92.26%, 90.71% dan 95.73% dengan persentase masing-masing bobot sebesar 25%.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 8. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75	100	117.99 ▲	Tercapai/ melampaui





Perbandingan realisasi kinerja sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II terhadap target tahun 2025 sebesar 94.67% sudah melampaui target renstra tahun 2025 yaitu 84.75%. Capaian indikator kinerja ini sebesar 111.71% dengan kategori Tercapai/Melampaui. Berdasarkan capaian ini, dengan rencana kerja yang baik, Balai Besar POM di Banda Aceh optimis akan tetap dapat mencapai target renstra tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator persentase sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk triwulan II dengan nilai 94.67%. Sampel yang disampling selama triwulan II sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang disusun pada awal tahun dikarenakan pada bulan April terjadi relaksasi anggaran sampling sehingga target jumlah sampling kembali ke target awal tidak mengikuti target efisiensi seperti selama triwulan I. Sampel sediaan farmasi telah disampling selama triwulan II sebanyak 290 sampel. Seluruh sampel yang disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang telah direncanakan dan dilakukan pemeriksaan terkait kondisi produk, penandaan label, ketepatan waktu pengambilan, pengujian, pelaporan dan tanggapan atas surat tindak lanjut.

Komoditi obat yang disampling selama triwulan II sebanyak 72 sampel yang dikirim ke balai tujuan regional dan diuji di laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh. Lokasi sampling komoditi obat selama triwulan II tidak terbatas hanya di kota Banda Aceh seperti selama efisiensi anggaran pada triwulan I, sampling juga dilakukan di kabupaten Pidie, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Kota Langsa melalui perjalanan dinas sampling di kabupaten / kota provinsi Aceh.

Kendala pengujian yang dialami laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh selama TW II adalah reagensia prekursor yang terlambat datang karena perubahan aturan pengadaan reagensia prekursor, suku cadang dan perawatan alat rusak akibat efisiensi anggaran sehingga pengujian harus diclock off dalam waktu tertentu. Cara





mengatasi kendala tersebut dengan meminjam reagensia prekursor (HCl) dengan Fakultas Farmasi Unsyiah dan Balai Besar POM di Medan. Laboratorium juga berkomunikasi dengan penyampling jenis sampel yang dapat diuji kepada balai penyampling seluruh anggota regional Medan sesuai dengan kemampuan laboratorium dan menerapkan sistem clock off untuk alat yang rusak yaitu KCKT dan GCMS. Dengan penerapan sistem ini maka sampel yang masuk ke laboratorium baik dari balai sendiri maupun balai regional, keseluruhannya dapat diuji parameternya sesuai ketentuan pada pedoman sampling pengujian. Dengan demikian target realisasi pada kriteria kesesuaian pelaksanaan pengujian yaitu kesesuaian parameter uji sesuai pedoman sampling terealisasi 100%. Kendala pemenuhan target pada kriteria kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir dan waktu pelaporan sesuai pedoman sampling hampir tidak ada. Hal ini disebabkan seluruh sampel yang disampling dilaporkan tepat waktu baik oleh balai sendiri ataupun balai regional, sehingga dapat terealisasi 100%.

Komoditi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu selama triwulan II sebanyak 102 sampel (78 sampel obat bahan alam dan 24 sampel suplemen kesehatan) dari target 252 sampel (terdiri dari obat bahan alam 187 sampel, obat kuasi 14 sampel dan suplemen kesehatan 51 sampel). Lokasi sampling secara luring tidak terbatas hanya di kota Banda Aceh, telah dilakukan sampling di wilayah selain kota Banda Aceh melalui perjalanan dinas sampling. Pembelian sampel secara daring melalui e-commerce dari daerah Aceh Timur, Aceh Utara, Langsa, Bireuen dan Aceh Besar. Penetapan daerah tersebut sebagai lokasi sampling daring berdasarkan analisis kajian risiko yang merupakan wilayah rawan peredaran sampel Tanpa Izin Edar (TIE).

Kendala pengujian yang dialami laboratorium obat bahan alam dan suplemen kesehatan Balai Besar POM di Banda Aceh selama TW II adalah kerusakan alat yaitu pecahnya bagian dari alat AAS yaitu Graphite Tube sehingga pengujian Identifikasi dan Penetapan Kadar Logam Pb, Cd, dan As tidak dapat dilakukan. Dari 3 kckt yang tersedia hanya 1 yang dapat digunakan. Tidak tersedianya reagen yaitu *Hexane-1-1-*





sulfonic acid sodium salt sehingga tidak dapat melakukan pengujian Identifikasi dan Penetapan Kadar Vitamin C. Ferrule GCMS sudah tidak tersedia sehingga pengujian dengan alat GCMS juga terkendala. Pengujian sampel selesai 100% namun membutuhkan waktu yang lebih lama karena antrian alat dan sampel yang diduga TMS memerlukan pengujian ulang. Untuk selanjutnya laboratorium merencanakan akan membuat perencanaan pembelian suku cadang dan menjadwalkan maintenance alat dengan teknisi serta menggunakan metode analisa dengan instrumen yang bervariasi untuk meminimalkan antrian dan penggunaan instrumen lain.

Komoditi kosmetik yang disampling triwulan II sebanyak 116 sampel. Lokasi sampling secara luring selama triwulan II tidak terbatas hanya di kota Banda Aceh, telah dilakukan sampling di wilayah selain kota Banda Aceh melalui perjalanan dinas sampling. Pembelian sampel secara daring juga dilakukan melalui platform e-commerce seperti shopee di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Kendala pengujian yang dialami laboratorium Kosmetika Balai Besar POM di Banda Aceh selama TW II adalah ketidaktersediaan reagen asam klorida (HCl) dan grafit tube sehingga tidak bisa melakukan pengujian parameter uji logam timbal (Pb), Arsen (As) dan Merkuri (Hg), Ferrule GCMS tidak tersedia sehingga pengujian dengan alat GCMS juga terkendala dan akhirnya dilakukan *clockoff* sample. Pada bulan Juni, sudah dilakukan pemesanan reagensia dan sparepart tersebut namun proses terhambat administrasi yang membutuhkan dokumen tertentu dan ekspedisi lebih lama karena jarak. Pengujian sampel selesai 100% namun membutuhkan waktu yang lebih lama karena antrian alat, dimana HPLC yang *existing* 2 buah untuk 6 penguji dengan Metode analisa yang digunakan rata-rata 20 metode analisa/bulan. Sering kali analisa dengan instrumen tidak berhasil dalam sekali uji, bisa terjadi pengulangan sampai 2-3 kali karena peak pecah, Peak tidak bisa terpisah ditambah kondisioning kolom yang lama dengan harapan memperoleh peak yang bagus dan memenuhi persyaratan (Tailing faktor, Resolusi, Teoritical PLate) sehingga membutuhkan waktu pengujian lebih lama.



e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan selama triwulan II untuk mencapai target indikator ini antara lain:

1. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan sampling setelah adanya relaksasi anggaran sesuai dengan Pedoman Sampling dengan kembali menjadi target awal.
2. Koordinasi yang efektif antara ketua tim inspeksi dengan ketua tim pengujian terkait sampling baik di lingkungan Balai Besar POM Banda Aceh, regional Medan dan Lab Pengujian Produk Biologi P3OMN.
3. Petugas secara konsisten melakukan sampling dan pengujian sediaan farmasi sesuai dengan renlak terbaru (buka blokir), pedoman sampling dan definisi operasional indikator kinerja.

f. Upaya peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada indikator ini dengan dilakukan antara lain:

1. Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk bulan selanjutnya.
2. Melakukan koordinasi intensif antara bidang inspeksi dan pengujian serta dengan laboratorium regional terkait pelaksanaan sampling dan pengujian menghindari risiko sampel tidak dapat diuji dan terlambat pelaporan sesuai Pedoman Sampling dikarenakan adanya instrumen rusak maupun reagen yang belum tersedia.
3. Selalu aktif melakukan monitoring dan evaluasi terkait waktu pelaporan sampel dan tindak lanjut hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat melalui SIPT.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 9. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	613.168.000	158.684.077	25.88	111.71	Efisien





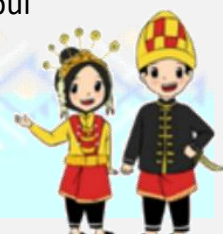
Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran triwulan II sebesar 25.88% merupakan realisasi anggaran berdasarkan anggaran buka blokir dari efisiensi anggaran yang terjadi selama triwulan II. Realisasi anggaran belum optimal dikarenakan pengadaan reagen dan belanja sampel juga belum maksimal pada triwulan II. Walaupun anggaran yang dikelola selama triwulan II belum optimal, target indikator ini tetap dapat dicapai. Dengan demikian anggaran tahun 2025 yang tersedia sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai acuan dalam monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025-2029, sehingga laporan kinerja interim triwulan II akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja pada triwulan berikutnya hingga mencapai target pada akhir tahun baik pada persentase sampel obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik berisiko dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Laporan ini juga digunakan untuk menyusun rencana kerja yang lebih optimal pada triwulan berikutnya sehingga setiap proses tahapan pada capaian indikator kinerja akan selalu tercapai. Kendala dalam indikator ini meliputi kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan komoditi sampel obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik perlu menjadi perhatian khusus sehingga tidak menghambat pencapaian indikator ini pada triwulan selanjutnya.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul



sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Risiko terkait Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan terkait dengan operasional baik mengenai Sarana Prasarana, Perencanaan, maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif, dan risiko selama triwulan II belum terdapat perubahan dari triwulan sebelumnya.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 10. Target dan Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM diperoleh menggunakan formula:

$$\frac{A}{B} \times 100\%$$

Kriteria nilai A dan B yaitu:

- A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans, Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon





terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dibandingkan dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan yaitu tahun 2025. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Pada Triwulan II tahun 2025 nilai KTD/ESO belum ada dan akan diperoleh pada Triwulan IV.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Nilai realisasi akan ada di TW IV.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 11. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum ada pada triwulan II dan akan diperoleh pada triwulan IV. Balai Besar POM di Banda Aceh akan tetap melakukan proses memberikan KIE kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan optimis mencapai target pada tahun 2025. Pada triwulan II ini telah terdapat lima sarana yang membuat laporan KTD/ESO atau 11,11 persen dari target 26 persen yang ditetapkan di tahun 2025. ini menggambarkan bahwa kegiatan pelaporan telah berjalan.





d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO akan dinilai pada TW IV. Namun begitu, Setiap bulan dilakukan pendampingan kepada sarana pelayanan farmasi untuk melakukan pelaporan KTD/ESO. pendampingan ini dimaksudkan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh sarana dalam pelaporan. Selain itu, dibangun komunikasi secara intensif dengan membuat grup WA untuk kanal komunikasi yang cepat dan dan efektif.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Selanjutnya untuk menunjang kinerja, maka ada beberapa aksi yang telah dilakukan, yaitu:

1. Melakukan Kegiatan Pelaksanaan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM di periode interim Triwulan I. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di catchment area Balai Besar POM di Banda Aceh yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.
2. Jumlah peserta KIE yang diundang adalah 45 peserta. yang terdiri dari 20 Rumah Sakit, 17 Puskesmas dan 8 Klinik. Kepada peserta telah diberikan akun e-MESO yang digunakan untuk pelaporan KTD/ESO.
3. Pemahaman peserta diukur dengan nilai pre-test dan post-test. Seluruh peserta memenuhi syarat mendapatkan sertifikat dengan nilai post-test minimal 70.
4. Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan pemantauan pelaporan KTD/ESO dari seluruh sarana pelayanan kesehatan yang telah mengikuti KIE mulai April – Desember 2025.



- 
5. Membuat kanal komunikasi menggunakan saluran Whatsapp group untuk komunikasi yang efektif dan efisien.

f. Upaya peningkatan kinerja

Setiap bulan dilakukan monitoring kepada sarana yang telah mengikuti KIE pelaporan KTD/ESO dan dilakukan pendampingan. Untuk memudahkan komunikasi, dibuatkan grup komunikasi menggunakan kanal WA.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 12. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	43.550.000	680.000	1.56	N/A	N/A

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia.

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Kinerja ini baru ditetapkan di tahun 2025 sehingga belum ada Laporan Kinerja di tahun sebelumnya yang digunakan sebagai bahan atau referensi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja. Informasi upaya peningkatan kinerja yang dipaparkan di laporan kinerja triwulan I telah digunakan sebagai informasi kinerja bagi pelaksanaan kegiatan di triwulan II.

Rekomendasi di laporan kinerja triwulan I adalah melakukan monitoring dan evaluasi dan telah dilaksanakan di triwulan II. Sarana yang telah mengikuti KIE pelaporan KTD/ESO telah membuat laporan sebagian yaitu 5 (lima) sarana.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja



Masih rendahnya jumlah laporan KTD/ESO yang diterima dari sarana pelayanan kesehatan menjadi risiko yang diidentifikasi di tahun 2025 ini. Penyebab yang telah diidentifikasi adalah kurangnya kesadaran dan keaktifan petugas sarana pelayanan kesehatan terkait pelaporan KTD/ESO dan sarana pelayanan kesehatan telah mempunyai sistem pelaporan KTD/ESO secara mandiri yang belum semuanya terintegrasi dengan e-MESO Badan POM. Untuk mengendalikan risiko tersebut, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan KIE Farmakovigilans di triwulan I pada 25 Maret 2025 dan akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan KTD/ESO oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah dilakukan KIE sepanjang April hingga Desember 2025.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 13. Target dan Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	93.33	109.80 	Sangat Baik

Pangan Olahan berisiko yang dimaksud dalam indikator ini adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko, diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

- A. Kesesuaian target sampel UPT;
- B. Kesesuaian parameter uji;





- C. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
- D. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
- E. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- F. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya.

Kerangka Sampling dalam indikator ini meliputi:

1. Sampel pangan berdasarkan proporsi sampling, dilakukan pada kategori pangan 1 sampai 16 (kecuali kategori pangan 10 telur dan produk-produk telur) dan BTP. Penetapan proporsi berdasarkan kriteria pembobotan data produk beredar, trend temuan produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS), temuan produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Label, kategori risiko produk, risiko konsumsi pada kelompok konsumen tertentu (antara lain: anak, balita, ibu hamil dan menyusui, lansia) dan munculnya isu baru pada pangan (seperti Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP), etilen glikol/dietilen glikol (EG/DEG), penggunaan BTP yang belum diatur, isu residu pestisida, dll), serta berdasarkan kajian mendalam Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan terhadap implementasi pedoman sampling.
2. Sampel pangan fortifikasi, dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional percepatan perbaikan gizi masyarakat. Sampling pangan fortifikasi merupakan sampling yang bertujuan untuk memonitor implementasi fortifikasi pada pangan fortifikasi, meliputi sampel garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, yang diambil di sarana produksi dan peredaran.
3. Sampel Kemasan Pangan, pengambilan sampel terhadap produk pangan terdaftar di peredaran dengan fokus pada kemasan yang digunakan. Kemasan yang disampling merupakan bagian integral dari produk pangan yang bersangkutan, sehingga tidak memiliki proporsi khusus. Sampel kemasan pangan merupakan bagian dari sampel pada kategori pangannya, seperti ikan dalam kaleng, air minum dalam kemasan (AMDK) berbahan PC, maupun AMDK berbahan PET. Tujuan sampling ini adalah untuk memastikan keamanan kemasan pangan yang digunakan serta kepatuhannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku
4. Sampel Kajian, dilakukan terhadap produk pangan olahan dan dilakukan



pengujian terhadap parameter uji kajian. Sampel ini bertujuan untuk mengawal kebutuhan penyusunan kebijakan/regulasi terhadap isu terkini dan posisi Indonesia pada forum internasional.

Selama TW II, telah dilakukan sampling pangan olahan berbasis risiko sebanyak 138 sampel dan sebanyak 122 sampel diterima dari Loka Aceh Tengah dan Aceh Selatan. Seluruh sampel masuk ke laboratorium untuk diuji sesuai parameter uji pada Pedoman Sampling dan sampel yang telah selesai uji dilaporkan ke pusat melalui SIPT dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan dengan persentase 93,33% dari target 85%. Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 109, 80% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan triwulan sebelumnya

Table 14. Perbandingan realisasi TW II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	93.46	93.33	109.95	109.80

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 menurun apabila dibandingkan dengan triwulan I, tetapi masih dalam kategori sangat baik. Sedikit penurunan pada realisasi TW II dikarenakan terdapat penurunan ketepatan waktu pelaporan dan sampling dari 34,62% menjadi 33.33% dengan persentase bobot sebesar 10%.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 15. Perbandingan realisasi TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	93.33	109.80 ▲	Tercapai/ Melampaui





Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap target tahun 2025 sudah mencapai dan melewati target. Capaian indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 109,80%. Berdasarkan Capaian di TW II ini Balai Besar POM di Banda Aceh optimis akan tetap dapat mencapai target tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk TW II. Target awal DIPA untuk sampel pangan olahan berbasis risiko adalah sebanyak 302 sampel. Pada TW I terdapat efisiensi anggaran, sedangkan mulai TW II, terdapat relaksasi untuk pengawasan produk pangan olahan kembali menjadi target semula. Selama TW II sebanyak 108 sampel pangan olahan telah disampling berdasarkan analisis risiko. Percepatan pelaksanaan sampling selama TW II dilakukan dengan menyesuaikan kembali rencana pelaksanaan sampling Balai dengan Laboratorium Regional. Seluruh sampel yang disampling dilakukan pemeriksaan terkait kondisi produk, penandaan label, nomor izin edar, dan kedaluarsa untuk menentukan apakah sampel dapat diteruskan ke laboratorium pengujian ataupun tidak. Lokasi Sampling selama TW II tidak terbatas hanya pada kota Banda Aceh seperti pada TW I dikarenakan efisiensi anggaran, tetapi sampling juga sudah dilakukan melalui perjalanan dinas sampling dikabupaten / kota selain Banda Aceh.

Untuk kesesuaian parameter uji, pada TW 2 masih dengan strategi yang sama dengan saat TW 1 sampling disesuaikan dengan kondisi baku dan reagen yang tersedia di laboratorium dengan berpedoman pada Pedoman Sampling 2025 sehingga dapat memenuhi semua parameter wajib yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi masih berupa pengadaan yang masih indent karena proses import dari penyedia yaitu pengadaan untuk Aflatoksin BG, Aflatoksin M1, Ochratoxin, Deoksivalenol, 3 MCPD, Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH), Beta Karoten, dan Sianida. Agar kesesuaian





parameter uji dapat terpenuhi tetap akan dilakukan koordinasi dengan tim sampling terkait kelengkapan parameter uji untuk proses selanjutnya.

Karena sampel yang diuji telah memenuhi semua parameter yang telah ditetapkan pada Pedoman Sampling, maka pengambilan keputusan berdasarkan hasil uji sudah sesuai. Adapun hal-hal yang perlu diantisipasi agar tidak terjadi kesalahan pengambilan Kesimpulan Pengujian diantaranya adalah:

1. Ketepatan pemilihan Metode Analisa.
2. Ketepatan proses pengujian terkait metode analisa, baku pembandingan, reagen, instrumen, serta analisa hasil pengujian dengan instrumen.
3. Kesesuaian kompetensi penguji dengan jenis pengujian.
4. Ketepatan pengisian hasil uji pada Lembar Catatan Pengujian (LCP) oleh penguji dan verifikasi oleh Ketua Tim.
5. Ketepatan pengisian hasil uji pada SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) baik dari penguji maupun Ketua Tim.
6. Pada sampel TMS telah dilakukan analisa dengan menjalankan analisa HULS (Hasil Uji diluar Spesifikasi) sesuai prosedur sehingga kesalahan penarikan kesimpulan dapat diminimalisir.

Total sampel yang diterima sampai dengan bulan Juni adalah 138 Sampel dengan kesesuaian waktu pelaporan sebanyak 46 sampel, sehingga realisasi ketepatan waktu pelaporan 33,33% disebabkan: Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian pada TW 2 sampai dengan kesesuaian waktu pelaporan sebanyak 46 sampel, sehingga realisasi ketepatan waktu pelaporan 33,33% disebabkan:

1. Antrian waktu pengujian Mikrobiologi untuk sampel bulan April dan Mei karena pengujian mikro mengutamakan uji OBASKK dan Kos untuk mencapai 15 HK.
2. Pengujian Mikrobiologi Pangan dilakukan 5 plo sehingga membutuhkan alat gelas dan alat yang lebih banyak dan antri pada penggunaan inkubator.
3. Antrian HPLC karena di Lab. Kimia ada 3 HPLC, tapi 1 HPLC rusak dan perlu perbaikan.
4. Untuk sampel bulan Juni pada saat pengisian RHPK sampel Bulan Juni belum selesai masih dalam proses uji sehingga waktu pelaporan bulan Juni belum dihitung pada





RHPK bulan Juni.

5. Beberapa sampel yang menggunakan ICP OES terkendala penyelesaiannya terutama sampel Fortifikasi Garam perlu perlakuan khusus pada uji logam Pb, namun ketika akan diujikan instrumen ICP OES rusak.

Hingga TW II terdapat 6 sampel pangan olahan terdaftar yang Tidak Memenuhi Syarat dari hasil pengujian parameter kimia maupun parameter mikro. Tindak lanjut yang dilakukan berupa pembinaan kepada sarana distribusi pangan olahan untuk selalu menjaga mutu pangan yang diedarkan, sedangkan tindak lanjut terkait mutu produk pangan olahan yang terdaftar di Badan POM akan ditindaklanjuti oleh pusat. Tindak lanjut untuk produk TMS dengan sarana produksi berlokasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh dilakukan dengan pemeriksaan sarana produksi tersebut untuk memastikan pemenuhan aspek - aspek CPPOB diterapkan secara konsisten. Komitmen dari petugas, penguji dan ketua tim kerja terkait indikator kinerja ini sangat diperlukan untuk pemenuhan setiap tahapan sesuai pedoman agar dapat mencapai nilai maksimal sehingga target yang ditetapkan dapat selalu dicapai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan selama TW II untuk mencapai target ini antara lain:

1. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan sampling setelah adanya relaksasi anggaran sesuai dengan Pedoman Sampling dengan kembali menjadi target awal.
2. Penetapan waktu sampling, dimana sampel sudah harus masuk ke Laboratorium kurang dari 5 hari kerja sejak sampel disampling oleh petugas.
3. Pemeriksaan sampel disertai komitmen petugas sampling dalam melakukan penginputan data sampel sesuai dengan Pedoman Sampling.
4. Monitoring dan evaluasi aktif petugas dan ketua tim terkait hasil uji sampel yang telah selesai dilakukan pengujian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan.
5. Monitoring dan evaluasi terkait kompetensi penguji, sehingga kesalahan hasil uji dapat dihindari dan ketepatan waktu uji juga dapat dipenuhi.
6. Berkoordinasi dengan PPK dan teknisi instrumen terkait kondisi instrumen





laboratorium HPLC, ICP OES , yang mengalami kerusakan sehingga dapat segera teratasi.

f. Upaya peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan koordinasi intensif antara bidang pemeriksaan dengan pengujian, dan juga dengan Laboratorium regional terkait pelaksanaan sampling dan pengujian menghindari risiko sampel tidak dapat diuji dan terlambat pelaporan sesuai Pedoman Sampling dikarenakan adanya instrumen rusak maupun reagen yang belum tersedia.
3. Selalu aktif melakukan monitoring dan evaluasi terkait waktu pelaporan sampel dan tindak lanjut hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat.
4. Untuk menghindari kesalahan pada pemilihan Parameter Uji maka dimulai dari ketepatan pemilihan Kategori sampel
5. Berkoordinasi dengan tim sampling terkait sarana prasarana pengujian agar Pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling
6. Ketelitian dalam pemilihan Kesimpulan Hasil Uji pada SIPT.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 16. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	325.667.000	91.866.126	28.21	109.80	Efisien

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran TW II sebesar 28.21% merupakan realisasi anggaran berdasarkan anggaran





buka blokir dari efisiensi anggaran yang terjadi selama TW II. Realisasi anggaran belum optimal dimana pengadaan reagen dan belanja sampel juga belum maksimal pada TW II ini. Walaupun anggaran yang dikelola selama TW II belum optimal, target indikator ini tetap dapat dicapai. Dengan demikian anggaran tahun 2025 yang tersedia sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh dan juga untuk melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini merupakan indikator baru pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025 - 2029, sehingga laporan kinerja interim ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja ini hingga mencapai target pada akhir tahun mulai dari tahap kesesuaian target sampling, penetapan parameter pengujian, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu sampling, ketepatan waktu pelaporan serta tindak lanjut sesuai pedoman. Setiap proses tahapan pada indikator ini menjadi poin nilai yang sangat perlu diperhatikan agar indikator ini dapat selalu tercapai dengan kategori sangat baik. Kendala dalam ketepatan waktu sampling perlu menjadi perhatian khusus agar tidak menghambat pencapaian indikator ini selanjutnya.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Risiko terkait Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan terkait dengan operasional baik mengenai Sarana Prasarana, Perencanaan,



maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif, dan risiko selama TW II belum terdapat perubahan dari risiko TW sebelumnya.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 17. Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	Baik 

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus:

% sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar}}{\text{Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM}} \times 100\%$$

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Sesuai standar yang dimaksud dalam indikator ini adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:





1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Hingga TW II, terdapat 3 sampel KLB yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar. Sampel yang diterima telah diuji sesuai dengan kajian epidemiologis laporan KLB KP yang diterima, walaupun kondisi sampel yang diterima tidak sesuai standar Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan.

Dengan demikian capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar adalah 100% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 18. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	100	-	100

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 19. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100 ▲	Tercapai/ Melampaui

Hingga TW II tahun 2025 terdapat 3 sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar berdasarkan kajian epidemiologi dengan capaian 100%. Untuk TW selanjutnya tidak dapat dipastikan apakah sampel KLB keracunan pangan akan ada penambahan





sampel atau tidak, namun demikian, apabila terdapat penambahan sampel KLB KP akan diupayakan diuji sesuai standar sehingga target tahun 2025 tetap dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi terhadap target dari indikator persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar dikarenakan tidak adanya sampel terkait KLB keracunan pangan baik dari lintas sektor dinas kesehatan maupun hasil penelusuran yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh terkait adanya informasi KLB keracunan pangan.

Tim pemeriksaan maupun tim pengujian selalu siap apabila terdapat sampel KLB KP yang diterima dari dinas kesehatan kabupaten/kota dengan memprioritaskan penginputan data, pengujian (ketersediaan reagen, baku dan instrumen) serta pelaporan sesuai ketentuan, sehingga apabila pada tw berikutnya terdapat sampel KLB Keracunan Pangan, target pada indikator ini dapat tercapai 100%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian terkait indikator persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar selama TW II adalah 100 %, adapun beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

1. Koordinasi dan komunikasi aktif petugas Balai Besar POM di Banda Aceh dengan tim gerak cepat KLB Keracunan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia.
3. Kompetensi petugas yang menangani sampel KLB Keracunan Pangan.

f. Upaya peningkatan kinerja

Untuk tetap dapat mencapai target kinerja pada triwulan selanjutnya, diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja antara lain:





1. Meningkatkan kompetensi dalam menangani KLB KP dengan menugaskan Katim Pengujian Pangan dan Penyelia Mikrobiologi mengikuti Bimbingan Teknis Penanganan KLB Keracunan Pangan yang diadakan oleh BPOM pada tanggal 9-11 Juli 2025 secara daring.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi agar informasi Penanganan KLB KP sesuai standar sesuai tugas Lintas Sektor terkait yaitu Dinas Kesehatan dan BPOM.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 20. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	22.755.000	5.603.946	24.63	100	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran telah efisien. Ketersediaan anggaran ini sangat diperlukan untuk ketersediaan sumber daya seperti reagen yang diperlukan untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan apabila terdapat sampel KLB keracunan pangan di kemudian hari sehingga sepenuhnya diharapkan dapat mendukung pencapaian indikator ini.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan/Dinas Kesehatan untuk menindak lanjuti hasil pengujian terhadap sampel KLB keracunan pangan. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya Balai Besar POM di Banda Aceh juga menjadi informasi yang sangat bermanfaat agar capaian terhadap indikator ini dapat selalu terpenuhi apabila terdapat sampel KLB Keracunan Pangan. Informasi epidemiologi yang jelas sangat diperlukan agar sampel KLB KP dapat diuji sesuai dengan standar yang ditetapkan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja





Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh khususnya sampel KLB Keracunan Pangan yang utama adalah terkait koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar sampel yang dikirimkan sudah memenuhi unsur penetapan KLB dan masih layak untuk dilakukan pengujian, sehingga dapat mengurangi dan mengatasi kendala lain yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan memenuhi target yang ditetapkan.

Selama TW II terdapat 3 sampel KLB yang diterima dari Dinas Kesehatan Aceh Besar. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Sampai saat ini, resiko yang mungkin menghambat pencapaian indikator ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 21. Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.5	102.94 	Sangat Baik

Pada indikator ini, sampel PIRT yang disampling mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga dan terdiri dari 11 kategori pangan. Penetapan proporsi per kategori untuk PIRT yang disampling ditentukan dengan risk-based bersama pakar sebagaimana telah dilakukan untuk pangan MD/ML, berdasarkan beberapa aspek:

1. PIRT yang beredar, dimana sampling dilakukan dengan mempertimbangkan peredaran produk yang akan dikonsumsi masyarakat.
2. Potensi risiko untuk produk asal hewan dan ikan yang rentan terhadap kontaminasi bakteri patogen, seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Pengolahan





yang tidak higienis atau penyimpanan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko ini.

3. Rekam jejak temuan produk Tidak Memenuhi Syarat Rekam dimana merupakan pendekatan spesifik di masing-masing wilayah. Rekam jejak temuan ini mengidentifikasi produk yang memiliki potensi risiko lebih tinggi. Data yang digunakan pada kategori ini mengacu pada data rekam jejak pengujian nasional.
4. Produk yang berpotensi dengan BTP maksimum level BTP adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan tertentu, seperti pengawetan, penambah rasa, atau pewarna. Pada produk PIRT penggunaan BTP seringkali dilakukan tanpa penimbangan sehingga berpotensi melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan.
5. Potensi penggunaan Bahan Berbahaya/Bahan yang tidak diizinkan pada pangan Potensi penggunaan bahan berbahaya atau bahan yang tidak diizinkan digunakan pada pangan merupakan isu dalam keamanan pangan, terutama untuk produk PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Penggunaan bahan berbahaya dalam pangan, contohnya penambahan formalin pada produk perikanan, sedangkan untuk bahan yang tidak diizinkan pada pangan contohnya penggunaan bahan kimia obat (BKO) pada produk kopi.
6. Potensi terhadap target konsumen tertentu Potensi terhadap konsumen tertentu dimaksudkan pada produk PIRT yang dikonsumsi untuk kalangan usia yang rentan, contohnya untuk produk dalam kategori pangan gula, kembang gula/ permen dan coklat seringkali dikonsumsi oleh konsumen anak-anak.

Hingga TW II, telah dilakukan sampling pangan PIRT berbasis risiko sebanyak 28 sampel dan sebanyak 21 sampel dari Loka Aceh Tengah dan Aceh Selatan. Sampel yang masuk ke laboratorium untuk diuji sesuai parameter uji pada Pedoman Sampling yang telah selesai dilaporkan ke pusat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan persentase sebesar 87.50% dari target 85%. Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 102,94% dengan kategori Sangat Baik.



b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 22. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88.18	87.50	103.74	102.94

Realisasi TW II lebih rendah dari TW I, terjadi penurunan realisasi yang juga mempengaruhi capaian indikator kinerja walaupun masih dalam kategori Sangat Baik. Penurunan ini dikarenakan waktu pengambilan sampel yang tidak sesuai ketentuan dan penurunan pada ketepatan pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim pusat.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 23. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.50	102.94 ▲	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target tahun 2025 dengan kategori Sangat Baik. Pemenuhan setiap tahapan untuk pencapaian indikator ini harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi yang efektif. Untuk itu perlu komitmen dan strategi yang lebih baik lagi agar Balai Besar POM di Banda Aceh mampu mempertahankan dan memenuhi target 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)





Capaian indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk TW II. Target awal DIPA untuk sampel PIRT berisiko adalah sebanyak 28 sampel dan telah disampling dan telah diuji seluruhnya. Seluruh sampel yang disampling dilakukan pemeriksaan terkait kondisi produk, penandaan label, nomor izin edar, dan kedaluarsa untuk menentukan apakah sampel dapat diteruskan ke laboratorium pengujian ataupun tidak. Sampling produk PIRT yang dilakukan tidak terbatas pada produk PIRT yang diproduksi dari wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh, tetapi juga produk PIRT dari wilayah lain yang banyak beredar di wilayah Balai Besar POM di Banda Aceh.

Berdasarkan data evaluasi tim pusat, ketepatan waktu pengambilan sampel tidak memenuhi bobot maksimal yang ditetapkan yaitu hanya sebesar 39,29% dimana 11 sampel yang disampling pada TW I dibandingkan dengan target setahun sebanyak 28 sampel. Sebanyak 17 sampel yang disampling selama TW II sudah tidak dihitung masuk dalam ketepatan waktu pengambilan sampel. dikarenakan seharusnya seluruh sampel PIRT sebanyak 28 sampel sudah harus selesai disampling pada TW I, tetapi pada TW I terjadi efisiensi anggaran sehingga hanya 11 sampel yang tersampling pada bulan Januari, sedangkan pada Februari dan Maret sudah tidak dilakukan sampling produk PIRT. Sampling yang dilakukan terhadap produk PIRT tidak terbatas pada wilayah kota Banda Aceh tetapi juga dilakukan sampling dari kabupaten / kota lainnya di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Berdasarkan Surat dari Plt. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan no T-PW.04.03.54.07.25.1104 tanggal 2 Juli 2025 mengenai Evaluasi Pengawasan PIRT TW I TA 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh terdapat 1 sampel yang tidak memenuhi Kelengkapan Parameter Uji dan 2 sampel yang tidak Memenuhi Pengujian sesuai Pedoman Sampling (1 sampel tidak lengkap Parameter Uji dan 1 sampel salah Kategori Sampel). Karena jumlah ini akumulasi maka sampai dengan TW 2 untuk Kelengkapan Parameter Uji yang memenuhi adalah 27 sampel dan Ketepatan Pengambilan Kesimpulan adalah 26 sampel. Untuk Ketepatan waktu pelaporan yaitu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya pada TW 2 sampel yang telah selesai uji sebanyak 28 sampel dengan ketepatan waktu Pelaporan ada 16 sampel.





Adapun kendala pada penyelesaian pengujian sampel adalah:

1. Antrian waktu pengujian Mikrobiologi untuk sampel bulan April dan Mei karena pengujian mikro mengutamakan uji OBASKK dan Kos untuk mencapai 15 HK.
2. Pengujian Mikrobiologi Pangan dilakukan 5 plo sehingga membutuhkan alat gelas dan alat yang lebih banyak dan antri pada penggunaan inkubator.
3. Antrian HPLC karena di Lab. Kimia ada 3 HPLC, tapi 1 HPLC rusak dan perlu perbaikan.

Hingga TW II hanya terdapat 1 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat dari hasil pengujian parameter kimia maupun parameter mikro. Tindak lanjut telah diberikan kepada unit pelaksana Teknis di Tangerang dikarenakan produk PIRT yang TMS merupakan produksi dari sarana PIRT yang berada di wilayah kerja UPT Tangerang. Koordinasi dengan lintas sektor khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapat Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan juga telah dilakukan dengan memberi informasi terkait sampel PIRT yang telah disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh agar tidak dilakukan sampling ulang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapat dana untuk sampling dan uji produk PIRT.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini antara lain:

1. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan buka blokir anggaran yang sebelumnya terdampak efisiensi.
2. Koordinasi tim pemeriksaan dengan tim penguji terkait ketersediaan sumber daya termasuk reagen dan peralatan untuk menghindari sampel tidak dapat diuji sesuai ketentuan pada Pedoman Sampling.
3. Penetapan waktu sampling, dimana sampel sudah harus masuk ke Laboratorium maksimal 5 hari kerja terhitung dari waktu sampling dilakukan oleh petugas.
4. Monitoring dan evaluasi aktif petugas dan ketua tim terkait hasil uji sampel yang telah selesai dilakukan pengujian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan.
5. Untuk menghindari kesalahan pada pemilihan Parameter Uji maka dimulai dari ketepatan pemilihan Kategori sampel.



6. Berkoordinasi dengan tim sampling terkait sarana prasarana pengujian agar Pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling.
7. Ketelitian dalam pemilihan Kesimpulan Hasil Uji pada SIPT.

f. Upaya peningkatan kinerja

Untuk tetap dapat mencapai target indikator ini hingga akhir tahun, diperlukan upaya-upaya peningkatan antara lain:

1. Komitmen dan kepatuhan tim pemeriksaan dalam melakukan sampling sesuai waktu yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antara tim pemeriksaan dan pengujian sampling PIRT untuk menghindari sampel yang tidak dapat diuji sesuai pedoman, serta mengurangi kesalahan dalam penetapan parameter pengujian dan pengambilan kesimpulan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 24. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	22.755.000	5.603.946	24.63	102.94	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran sebesar 24.63% untuk belanja pengadaan sampel dan reagen. Dengan demikian anggaran tahun 2025 sudah mendukung pencapaian indikator Persentase PIRT yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan penggunaan anggaran akan lebih dioptimalkan lagi realisasinya pada TW berikutnya untuk ketersediaan sumber daya reagen dan peralatan.

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja





Sampel PIRT yang telah dilakukan sampling dan pengujian hingga TW II terdapat 1 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat hasil uji mikrobiologi. Tidak terdapat sampel PIRT yang disampling tidak memiliki izin edar, rusak, maupun kadaluarsa. Tindak lanjut terhadap sampel TMS telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan UPT terkait dimana sarana produksi produk PIRT tersebut berada, dan akan dipantau tindak lanjutnya kembali. Koordinasi dengan lintas sektor terkait sampling produk PIRT dan pembinaan sarana produksi PIRT juga terus dilakukan agar produk-produk PIRT yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang aman dan bermutu.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Selama TW II, pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian produk PIRT pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh terutama berhubungan dengan operasional baik mengenai sarana prasarana, perencanaan, maupun pelaporan secara terpadu melalui SIPT. Risiko yang teridentifikasi telah dimitigasi dengan efektif sehingga dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat tercapai dan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 25. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78.00	80.63	103.37 	Sangat Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus:





$$\frac{(A + B)}{2}$$
$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$
$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku Kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha (badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penertiban keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Selama triwulan II tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan lintas sektor sebanyak 68 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan sebanyak 52 pelaku usaha dan lintas sektor yang memberikan respon tindak lanjut/feedback. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku



kepentingan dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 103.37% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 26. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	75.96	80.63	101.28	103.37

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan I. Koordinasi yang baik dan berkelanjutan antara petugas dengan pelaku usaha dan lintas sektor terkait untuk memberikan respon terhadap tindak lanjut/feedback yang diberikan akan terus ditingkatkan sehingga indikator kinerja ini tercapai sesuai target tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 27. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.3	80.63	96.79 ▲	Akan Tercapai

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025. Monitoring dan evaluasi terhadap surat keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan lintas sektor harus selalu





dilakukan secara efektif untuk pemenuhan pencapaian indikator ini. Perlu upaya komitmen dan strategi yang lebih baik agar Balai Besar POM di Banda Aceh mampu memenuhi target tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sudah mencapai target yang ditetapkan pada triwulan II. Stakeholder atau pemangku kepentingan yang dimaksud pada indikator ini terdiri dari pelaku usaha dan lintas sektor. Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan meliputi sarana distribusi obat, pelayanan kefarmasian, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, produksi dan distribusi pangan olahan. Selama triwulan II jumlah surat yang dikirimkan ke sarana sediaan farmasi dan pangan olahan sebanyak 65 surat (komoditi obat 50 surat; obat tradisional dan suplemen kesehatan 1 surat; kosmetik 11 surat; produksi pangan olahan 3 surat) dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 49 surat (komoditi obat 34 surat; obat tradisional dan suplemen kesehatan 1 surat; kosmetik 12 surat; produksi pangan olahan 2 surat). Terdapat beberapa surat yang dikirimkan kepada pelaku usaha selama triwulan I dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha pada triwulan II. Beberapa pelaku usaha tidak dapat dihubungi pada saat menyampaikan surat tindak lanjut dan kurangnya pemahaman pelaku usaha dan penanggung jawab dalam membuat CAPA sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menindaklanjuti permintaan CAPA. Upaya yang akan dilakukan yaitu dengan menghubungi dan mendatangi sarana yang akan diberikan surat tindak lanjut secara intensif dengan cara menghubungi melalui WA. Pada sarana produksi, komunikasi aktif akan terus dilakukan petugas dengan pelaku usaha agar dapat mengetahui kendala dan kemajuan pembuatan CAPA serta memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi whatsapp dan telepon maupun tatap muka langsung ke kantor Balai Besar POM di Banda Aceh.





Monitoring terkait pembuatan CAPA kepada setiap APJ sarana yang mendapatkan surat TL melalui WA, telepon maupun email setelah 1 minggu surat diterima sarana. Keputusan hasil inspeksi sarana distribusi makanan, kosmetika dan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan dilakukan pembuatan penyelesaian CAPA di sarana langsung dengan melengkapi dokumen tindak lanjut dengan BA Pemusnahan, BA Serah Terima, Surat Pernyataan dan Lembaran Penilaian CAPA. Sehingga capaian persentase keputusan hasil inspeksi untuk sarana distribusi ini bisa diupayakan dengan optimal. Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor selama triwulan II sebanyak 3 surat yang ditindaklanjuti dari total 3 surat yang dikirim oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh. Surat diberikan kepada instansi terkait sarana sediaan farmasi komoditi obat sebanyak 2 surat dan komoditi pangan sebanyak 1 surat. Sampai dengan triwulan II terdapat 1 surat yang belum ditindaklanjuti oleh lintas sektor pada komoditi obat. Pimpinan instansi terkait lama memberikan respon terhadap surat tindak lanjut yang dikirim. Untuk dapat terus meningkatkan serta mempertahankan capaian terhadap indikator ini petugas akan melakukan komunikasi aktif dan intensif dengan lintas sektor/instansi terkait baik kepada pimpinan maupun tim teknis secara formal maupun informal agar capaian indikator ini tercapai dan meningkat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah:

1. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA pelaku usaha secara intensif komunikasi melalui Whatsapp, email dan telepon maupun tatap muka langsung di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh.
2. Monitoring dan evaluasi oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh terhadap rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha apakah sudah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan atau tidak sesuai timeline yang





diberikan melalui menghubungi atau mendatangi sarana yang akan diberikan surat tindak lanjut.

3. Advokasi dan koordinasi berkesinambungan kepada lintas sektor secara intensif baik kepada pimpinan atau tim teknis instansi terkait tentang pentingnya memberikan feedback terhadap hasil pemeriksaan.

f. Upaya peningkatan kinerja

Untuk tetap dapat mencapai target indikator ini hingga akhir tahun, diperlukan upaya-upaya peningkatan antara lain:

1. Komitmen dan kepatuhan tim pemeriksaan untuk menghubungi sarana yang diberikan surat tindak lanjut secara intensif melalui *whatsapp*/telepon.
2. Memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi *whatsapp*, telepon dan tatap muka langsung ke kantor.
3. Koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antara petugas dengan lintas sektor instansi terkait.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 28. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	101.637.500	3.380.015	3.39	103.37	Efisien

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran triwulan II sebesar 3.39% merupakan realisasi anggaran berdasarkan anggaran buka blokir dari efisiensi anggaran yang terjadi selama triwulan II. Dengan demikian anggaran tahun 2025 sudah mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang





ditindaklanjuti oleh stakeholder, penggunaan anggaran akan lebih dioptimalkan lagi realisasi pada triwulan berikutnya.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025, pencapaian indikator ini telah tercapai sesuai target triwulan II. Capaian ini akan terus ditingkatkan dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi surat tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti pelaku usaha dan lintas sektor dengan melakukan komunikasi aktif untuk meminta respon yang ditindaklanjuti secara administratif. Dengan meningkatnya capaian indikator ini merupakan perwujudan dari kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi, demikian juga dengan lintas sektor, dengan koordinasi yang baik diharapkan kedepannya semakin aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Komunikasi aktif pelaku usaha dan koordinasi dengan lintas sektor yang semakin baik diharapkan tetap dapat dipertahankan agar Indikator ini tetap akan dicapai pada sesuai target akhir tahun 2025.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Capaian kinerja indikator ini selama triwulan II telah mencapai target dengan kategori sangat baik sebesar 103.37%, yang mencerminkan bahwa risiko - risiko yang ada pada indikator ini telah dikendalikan dengan efektif. Faktor risiko eksternal terkait kurangnya kepatuhan pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan telah dikendalikan dengan memberikan sanksi yang lebih tegas, kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam menindaklanjuti CAPA dikendalikan dengan pemberian bimbingan pembuatan CAPA, serta peran petugas yang aktif dalam melakukan monitoring pelaku usaha dan lintas sektor yang belum menindaklanjuti rekomendasi telah dimitigasi dengan baik. Kemungkinan risiko ini akan muncul kedepannya tetaplah ada, walaupun demikian, berbagai strategi dan upaya pengendalian yang lebih efektif juga akan dilakukan agar resiko-resiko akibat kurangnya kepatuhan pelaku usaha dan stakeholder dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan dapat diminimalisir.



7. **Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 29. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	100	107.53 	Sangat Baik

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terdiri dari perhitungan:

$$= \frac{\% \text{ Sarprod Obat} + \% \text{ Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan} + \% \text{ Sarprod Kosmetik}}{3}$$

Beberapa kategori dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Persentase Sarana produksi Obat = $A+B+C / 3$

Keterangan :

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan}}{\text{Jumlah sasaran dan cakupan target renlak}} \times 100\%$$
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun}}{\text{Jumlah target tahunan}} \times 100\%$$

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

- 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
- 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
- 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
- 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
- 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
- 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Persentase Sarprod OBA dan SK = $A+B+C+D / 4$





Keterangan:

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

Persentase Sarprod Kosmetik = $A+B+C+D / 4$

Keterangan:

A. Pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target sesuai Renlak}} \times 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

Sarana produksi (sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi sarana produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit); Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yaitu yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan





alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), industri suplemen kesehatan; dan Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Proses diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan cara produksi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang baik dan konsisten dilakukan sehingga menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

Selama triwulan II tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi pada sarana produksi obat bahan alam sebanyak 3 sarana. Semua sarana yang diperiksa telah dilaporkan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Persentase realisasi sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 100% dari target 93%. Dengan demikian capaian persentase pada indikator ini di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target yaitu 107.53 dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 30. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	100	100	107.53	107.53





Realisasi dan capaian triwulan II sama dengan realisasi dan capaian triwulan I dengan capaian indikator kinerja sangat baik. Setiap tahapan proses sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 31. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	100	107.53 ▲	Tercapai / Melampaui

Realisasi persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sudah mencapai target rencana tahun 2025 dengan kriteria tercapai/melampaui. Walaupun demikian masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi agar target tahun 2025 tetap tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan untuk triwulan II. Sarana produksi sediaan farmasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh hanya terdapat sarana produksi Obat Bahan Alam dan kosmetik. Pemilihan sarana produksi yang ditargetkan untuk dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/ laporan dari pihak luar, sarana produksi yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana produksi baru yang belum pernah diperiksa.

Selama triwulan II tahun 2025, sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa hanya sarana obat bahan alam sebanyak 3 sarana yang telah dilaporkan melalui pelaporan terpadu SIPT. Sarana produksi Obat Bahan Alam yang diperiksa merupakan sarana





yang terletak di Banda Aceh yaitu 2 sarana UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) dan 1 sarana UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional). Hasil pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam yaitu ketiga sarana dengan hasil Memenuhi Ketentuan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama triwulan II yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan target pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko.
2. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam berupa sarana UMOT dan sarana UKOT.
3. Monitoring dan evaluasi oleh ketua tim terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi terkait waktu pelaporan sesuai timeline dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan.

f. Upaya peningkatan kinerja

Untuk tetap dapat mencapai target indikator ini hingga akhir tahun, diperlukan upaya-upaya peningkatan antara lain:

1. Melakukan pendataan sarana produksi sediaan farmasi komoditi Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang masih aktif dan tidak aktif.
2. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi TW III sesuai dengan analisis resiko dan ketentuan yang berlaku.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 32. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	13.333.750	667.500	5.01	107.53	Efisien





Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran triwulan II sebesar 5.01% merupakan realisasi anggaran berdasarkan anggaran buka blokir dari efisiensi anggaran yang terjadi selama triwulan II. Dengan demikian anggaran tahun 2025 sudah mendukung pencapaian indikator ini, penggunaan anggaran akan lebih dioptimalkan lagi realisasi pada triwulan berikutnya.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025, pencapaian indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dengan capaian 107.53%. Seluruh tahapan terkait pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan waktu yang ditetapkan. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta didukung dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini tetap dapat dicapai.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja ini baik yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia dan faktor eksternal (pelaku usaha) telah dimitigasi/dikendalikan secara efektif. Risiko Fraud/penyalahgunaan wewenang seperti gratifikasi juga telah dimitigasi dengan menghindari petugas yang memiliki benturan kepentingan melakukan pemeriksaan, penandatanganan pakta integritas serta pemberian sanksi tegas apabila terbukti terjadi fraud. Walaupun demikian, tantangan untuk tahun kedepannya terkait pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi akan semakin menantang. Risiko - risiko lain yang mungkin muncul pada indikator ini akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali.



8. **Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

a. **Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025**

Table 33. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65 	Tidak dapat Disimpulkan

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD dan juga izin edar IRTP. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu pelaporan
2. Ketepatan tindak lanjut termasuk koordinasi dengan
3. Kesesuaian grading

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Hingga TW II, telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan MD yang ditetapkan berdasarkan analisis kajian risiko. Sebanyak 12 sarana yang diperiksa telah dilaporkan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 100% dari target 85%, sehingga capaian indikator ini sebesar 117,65% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Telah dilakukan desk pada akhir Juni terkait pengusulan



revisi untuk kenaikan target tahun 2025 agar capaian yang diperoleh dapat masuk dalam kategori yang dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 34. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	-	100	-	117.65

Realisasi dan capaian kinerja TW II tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja TW I, karena pada TW I pengukuran realisasi dan capaian kinerja belum ditetapkan oleh unit pengampu. Walaupun demikian, setiap tahapan proses untuk pencapaian indikator ini sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 35. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW II sudah memenuhi target tahun 2025 dengan capaian sebesar 117.65%. Monitoring dan evaluasi tetap harus dilakukan agar realisasi maksimal tetap dapat diperoleh sehingga akhir tahun, terutama apabila revisi kenaikan target tahun 2025 disetujui dan ditetapkan.





d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan untuk TW II. Target sarana produksi pangan olahan yang dilaksanakan selama TW II sudah merupakan target semula untuk setahun sebanyak 44 sarana produksi. Pemilihan target sarana produksi pangan olahan berdasarkan riwayat hasil pemeriksaan sarana , sarana yang belum pernah diperiksa, dan juga sarana yang diperoleh informasi terkait aktivitas sarana produksi pangan olahan baik tutup, pindah alamat, hasil uji TMS ataupun pengaduan masyarakat. Hingga TW II telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sebanyak 11 sarana produksi pangan olahan MD dan 1 sarana produksi PIRT yang telah dilaporkan melalui pelaporan terpadu SIPT dengan tepat waktu. Hasil pemeriksaan dari 12 sarana yang diperiksa yaitu 3 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan dan 9 sarana produksi Memenuhi Ketentuan (MK). Setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai pedoman kepada pelaku usaha produksi pangan olahan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta pemenuhan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik secara konsisten dilakukan untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pencapaian indikator ini.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama TW II yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Pelaksanaan target pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko.
2. Percepatan penyesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan adanya buka blokir anggaran.





3. Monitoring dan evaluasi oleh ketua tim terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan terkait waktu pelaporan sesuai timeline dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan.
4. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan baik secara mandiri melalui Ideas dan terpadu oleh pusat yaitu pelatihan Food Inspector Dasar di TW I dan II.

f. Upaya peningkatan kinerja

Untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator ini pada triwulan selanjutnya, berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan, melaporkan tepat waktu dan menindaklanjuti sesuai pedoman.
2. Monitoring dan evaluasi aktif dari ketua tim terkait hasil pemeriksaan sarana produksi.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sesuai perencanaan

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 36. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	13.333.750	667.500	5.01	117,65	Efisien

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa telah terdapat realisasi anggaran sebesar 5.01% dari anggaran yang tersedia dengan capaian indikator sebesar 117.65%. Penggunaan anggaran telah efisien yang mana ketersediaan sumber daya sudah mendukung pencapaian indikator ini dan akan dioptimalkan penggunaan anggaran tersebut secara efisien untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja





Realisasi sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti telah mencapai target yang ditetapkan. Seluruh tahapan proses terkait pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan TMK berupa tindak lanjut sanksi administratif Peringatan perlu dimonitoring tindak lanjut CAPA oleh pelaku usaha. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta didukung dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini tetap dapat dicapai.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja ini baik yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia dan faktor eksternal (pelaku usaha) telah dimitigasi/dikendalikan secara efektif. Risiko Fraud/penyalahgunaan wewenang seperti gratifikasi juga telah dimitigasi dengan menghindari petugas yang memiliki benturan kepentingan melakukan pemeriksaan, penandatanganan pakta integritas serta pemberian sanksi tegas apabila terbukti terjadi fraud. Walaupun demikian, tantangan untuk tahun kedepannya terkait pemeriksaan sarana produksi pangan olahan akan semakin menantang, pelaku usaha UMK semakin banyak yang memproduksi produk risiko rendah dengan kemudahan pengurusan izin edar OSS RBA berupa evaluasi dokumen dan audit lapangan dilakukan satu tahun setelah izin terbit akan menjadi tantangan kembali untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi pangan olahan yang aman dan bermutu. Risiko - risiko lain yang mungkin muncul pada indikator ini akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025





Table 37. Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.72	103.07 	Sangat Baik

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan rumus =

$$(A+B+C)/3$$

Keterangan:

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Pemenuhan Target Pemeriksaan (a)} + \text{Kesesuaian Tindaklanjutan (b)}}{2} \times 100\%$$

- Pemenuhan target pemeriksaan ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT dengan rumus (A/B) dimana A merupakan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100% dan B merupakan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan.
- Kesesuaian Tindak Lanjut, kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan, diperoleh dengan rumus:





$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (a+b+c+d)/4$$

Keterangan:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (a+b+c+d)/4$$

Keterangan:

a. Pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$





Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa Balai Besar POM di Banda Aceh meliputi sarana distribusi obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, kosmetik, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Pemilihan sarana fasilitas distribusi sediaan farmasi yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat/track record tidak memenuhi





ketentuan, adanya permintaan/laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana baru yang belum pernah diperiksa.

Selama triwulan II, telah dilakukan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi sebanyak 143 sarana yang ditetapkan berdasarkan analisis kajian risiko. Semua sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sehingga realisasi triwulan II sebesar 99.72% dari target 96.75%. Dengan demikian capaian persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 103.07% dengan kategori **sangat baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 38. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	-	99.72	-	103.07

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian triwulan I karena pada triwulan I pengukuran capaian kinerja belum ditetapkan oleh unit pengampu. Pencapaian indikator ini sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Komitmen dari petugas untuk terus melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan akan terus ditingkatkan sehingga indikator kinerja ini tercapai sesuai target tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 39. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025





Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.72	103.07 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II sudah memenuhi target tahun 2025 dengan capaian sebesar 103.07%. Petugas Balai Besar POM di Banda Aceh akan selalu melakukan peningkatan strategi dalam pengawasan yang lebih efektif sehingga indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti dan dilaporkan tepat waktu ini dapat dicapai hingga kinerja akhir tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk triwulan II dengan kriteria sangat baik. Selama triwulan II tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap fasilitas distribusi sediaan farmasi sebanyak 143 sarana. Lokasi pemeriksaan selama triwulan II tidak hanya berada di daerah kota Banda Aceh, namun dilakukan juga ke Kabupaten/Kota wilayah kerja UPT Balai Besar POM di Banda Aceh. Pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian terdiri atas pemeriksaan pada PBF sebanyak 3 sarana, pemeriksaan pada apotek sebanyak 19 sarana, pemeriksaan pada toko obat sebanyak 2 sarana, pemeriksaan pada Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 4 sarana, pemeriksaan pada rumah sakit sebanyak 11 sarana, pemeriksaan pada puskesmas sebanyak 7 sarana dengan hasil sarana dan pemeriksaan pada klinik sebanyak 9 sarana. Masih terdapat sarana distribusi obat dan saryanfar yang tidak memenuhi disebabkan sarana melakukan pengelolaan obat tidak sesuai ketentuan yang berlaku seperti pengelolaan obat narkotika dan psikotropika yang tidak baik, penyaluran yang tidak tertelusur, pengelolaan produk CCP yang tidak baik dan faktor mayor dan kritis yang dapat menurunkan mutu produk.





Pemeriksaan sarana distribusi obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik selama triwulan II telah dilakukan terhadap 88 sarana yang tidak hanya di daerah Kota Banda Aceh namun berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Pemeriksaan pada sarana distribusi obat bahan alam sebanyak 15 sarana, pemeriksaan pada sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 3 sarana, pemeriksaan pada sarana distribusi kosmetik sebanyak 72 sarana. Sarana distribusi yang paling banyak tidak memenuhi ketentuan yaitu sarana distribusi kosmetik disebabkan masih banyaknya produk - produk tanpa izin edar karena tren kosmetik kekinian dan produk tanpa izin edar dari luar negeri, dan juga bertambahnya sarana-sarana distribusi baru yang belum pernah mendapat pembinaan dari Balai Besar POM di Banda Aceh.

Selama triwulan II seluruh sarana yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan pemeriksaan sarana. Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan sanksi administratif dan akan menjadi prioritas target pengawasan untuk dipantau kembali kepatuhan pelaku usaha pada rencana pemeriksaan tahun berikutnya.

Capaian indikator ini sudah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dengan kategori sangat baik capaian sebesar 103.07%. Walaupun demikian, masih sangat diperlukan berbagai upaya untuk tetap dapat mempertahankan capaian persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Komitmen, kekompakan, kompetensi dan kepatuhan dari petugas, monitoring serta evaluasi yang ketat dari ketua tim kerja sangat memegang peranan dalam pencapaian indikator ini.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja





Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator ini antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun dan ditetapkan.
2. Melakukan koordinasi dengan unit pengampu (petugas pengawas obat melakukan zoom meeting dengan Ditwasdisyanfar) terkait pengawasan sarana dan ketentuan tindak lanjut yang sesuai.
3. Monitoring dan evaluasi ketua tim kerja terkait rencana pelaksanaan, ketepatan tindak lanjut dan pelaporan tepat waktu *timeline*.
4. Komitmen petugas pengawas fasilitas distribusi sediaan farmasi untuk melakukan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan, menindaklanjuti dan melaporkan tepat waktu sesuai *timeline* melalui SIPT dan defisini operasional (DO).

f. Upaya penigkatan kinerja

Untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator ini pada triwulan selanjutnya, berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi sesuai perencanaan.
2. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan, melaporkan tepat waktu dan menindaklanjuti sesuai pedoman.
3. Monitoring dan evaluasi aktif dari ketua tim terkait hasil pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi secara berkelanjutan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 40. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	341.821.400	43.672.272	12.78	103.07	Efisien





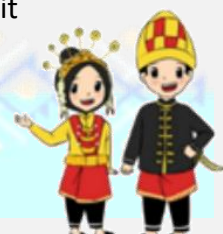
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan anggaran telah efisien, realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran hingga triwulan II 12.78%. Penggunaan sumber daya anggaran akan terus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian indikator ini sehingga target persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tetap dapat dicapai.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pencapaian indikator kinerja ini tercapai sebesar 103.07%, dengan demikian seluruh proses terkait pemeriksaan distribusi fasilitas sediaan farmasi sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana distribusi fasilitas sediaan farmasi TMK berupa tindak lanjut sanksi administratif Peringatan perlu dimonitoring tindak lanjut CAPA dari pelaku usaha oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta didukung dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini tetap dapat dicapai.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja ini baik yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia dan faktor eksternal (pelaku usaha) telah dimitigasi / dikendalikan secara efektif. Seperti adanya penolakan oleh pelaku usaha saat petugas melakukan pemeriksaan telah dikendalikan dengan melakukan komunikasi persuasif kepada pelaku usaha, peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek teknis untuk meminimalisir risiko terkait operasional. Pemberian tindak lanjut yang lebih tegas juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha yang merupakan faktor eksternal penyebab risiko. Risiko Fraud/penyalahgunaan wewenang seperti gratifikasi juga telah dimitigasi dengan menghindari petugas yang memiliki benturan kepentingan melakukan pemeriksaan, penandatanganan pakta integritas serta pemberian sanksi tegas apabila terbukti terjadi fraud. Walaupun demikian, tantangan untuk tahun kedepannya terkait



pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi akan semakin menantang. Risiko - risiko lain yang mungkin muncul pada indikator ini akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 41. Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65 	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$A + B + C$$

Keterangan:

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti





pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa.
2. Ketepatan waktu pelaporan.
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

Pemilihan sarana distribusi pangan olahan yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana baru yang belum pernah diperiksa. Sarana distribusi pangan olahan yang menjadi target pengawasan yaitu sarana retail modern, sarana retail tradisional, dan distributor pangan, sedangkan untuk sarana importir pangan belum menjadi target pemeriksaan karena tidak ada importir pangan aktif di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Sampai TW II, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 47 sarana dari target 107 sarana selama setahun dan seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan pedoman pengawasan peredaran pangan olahan sehingga realisasi TW II sebesar 100% dari target 85%. Dengan demikian capaian persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 117,65% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Telah dilakukan desk pada akhir Juni terkait pengusulan revisi untuk kenaikan target tahun 2025 agar capaian yang diperoleh dapat masuk dalam kategori yang dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 42. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya





Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	100	117.65	117.65

Realisasi TW II sama dengan realisasi TW I yang mana setiap tahapan proses dari pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 43. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65 ▲	Tercapai/ Melampaui

Realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target tahun 2025 yaitu dengan kategori tercapai/melampaui. Monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan disertai peningkatan strategi dalam pengawasan yang lebih efektif agar target tahun 2025 ini dapat dicapai hingga kinerja akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hingga TW II tahun 2025, pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan olahan telah dilakukan sebanyak 47 sarana dengan rincian 23 sarana distribusi retail tradisional, 20 sarana retail modern dan 4 sarana distributor pangan olahan. Dari 47 sarana yang diperiksa terdapat 44 sarana Memenuhi Ketentuan dan 3 sarana distribusi pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sarana yang TMK yaitu 2 sarana distribusi pangan retail tradisional dan 1 sarana retail modern. Seluruh sarana yang diperiksa ini





telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan pemeriksaan sarana. Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan sanksi administratif dan akan menjadi prioritas target pengawasan untuk dipantau kembali kepatuhan pelaku usaha pada rencana pemeriksaan tahun berikutnya.

Capaian indikator ini sudah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dengan kategori tidak dapat disimpulkan dengan capaian sebesar 117.65%, hal ini karena seluruh tahapan penilaian untuk perhitungan indikator ini telah terpenuhi dengan maksimal sehingga realisasi menjadi 100% dari target sebesar 85%. Walaupun demikian, masih sangat diperlukan berbagai upaya untuk tetap dapat mempertahankan capaian persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Komitmen, kekompakan, kompetensi dan kepatuhan dari petugas, monitoring serta evaluasi yang ketat dari ketua tim kerja sangat memegang peranan dalam pencapaian indikator ini.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja indikator ini antara lain:

- Peningkatan kompetensi petugas pengawas pangan olahan berupa Pelatihan Inspektur Pangan yang diadakan oleh pusat maupun pembelajaran mandiri melalui aplikasi IDEAS.
- Komitmen petugas pengawas sarana distribusi pangan olahan untuk melakukan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan, menindaklanjuti dan melaporkan tepat waktu sesuai timeline.
- Monitoring dan evaluasi ketua tim kerja terkait rencana pelaksanaan, ketepatan tindak lanjut dan pelaporan tepat waktu timeline.
- Pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan yang berlaku terkait distribusi obat dan makanan.

f. Upaya peningkatan kinerja





Untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator ini pada triwulan selanjutnya, berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai perencanaan
2. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan, melaporkan tepat waktu dan menindaklanjuti sesuai pedoman.
3. Monitoring dan evaluasi aktif dari ketua tim terkait hasil pemeriksaan sarana produksi.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 44. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	341.821.400	43.672.272	12.78	117.65	Efisien

Penggunaan anggaran telah efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran hingga TW II ini baru sekitar 12.78%. Untuk terus mendukung pencapaian indikator ini pada TW selanjutnya, akan dioptimalkan penggunaan sumber daya anggaran agar target persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tetap dapat dicapai.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pencapaian indikator ini telah melampaui target untuk TW II dan juga target tahunan dengan capaian sebesar 117.65%. Walaupun sudah mencapai target tahun 2025, tetapi tantangan untuk pemenuhan ketentuan terhadap pencapaian indikator ini tetap harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi yang ketat. Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha distribusi pangan olahan juga sangat diperlukan,



dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Capaian pada indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai untuk target TW II tahun 2025 dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Berbagai risiko yang mungkin muncul dan risiko yang juga telah terjadi dapat dikendalikan dengan efektif. Seperti adanya penolakan oleh pelaku usaha saat petugas melakukan pemeriksaan telah dikendalikan dengan melakukan komunikasi persuasif kepada pelaku usaha, peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek teknis untuk meminimalisir risiko terkait operasional. Risiko fraud seperti adanya penyalahgunaan wewenang/jabatan serta gratifikasi telah dimitigasi dengan sosialisasi sanksi yang akan diterima apabila risiko fraud terjadi. Pemberian tindak lanjut yang lebih tegas juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha yang merupakan faktor eksternal penyebab risiko. Risiko-risiko yang menghambat pencapaian indikator ini telah dimitigasi dan akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih sesuai dan relevan untuk kondisi yang akan datang.

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 45. Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8	101.38	118.16 	Tidak dapat disimpulkan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan rumus = $(A+B+C+D+E)/5$





Keterangan:

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan

$$= \frac{a+b}{2}$$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

$$= (a+b+c)/3$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$= \frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

$$= (a+b+c)/3$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$





c. Akurasi pengambilan keputusan

$$= \frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

$$= (a+b) / 2$$

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$= \frac{\text{Jumlah \% capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{Jumlah media (4)}} \times 100\%$$

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$= \frac{\text{Capaian jumlah iklan per media}}{\text{Jumlah target per media}} \times 100\%$$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

$$= \frac{\% \text{ rerata capaian evaluasi dan verifikasi Operator UPT} + \% \text{ rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}}{2}$$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi}} \times 100\%$$

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi}} \times 100\%$$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi}}{\text{Jumlah target iklan sesuai renlak}} \times 40\%$$

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling

$$= \frac{(\text{Jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi})}{\text{Proporsi target media}} \times 20\%$$

c. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang diawasi}} \times 40\%$$

Poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100% Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek





Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Selama triwulan II, telah dilakukan pengawasan terhadap iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan total sebanyak 258 iklan yang diawasi sesuai pedoman dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu. Iklan sediaan farmasi yang diawasi terdiri dari iklan obat sebanyak 39, iklan kosmetik sebanyak 82, iklan Obat Bahan Alam sebanyak 40, iklan Suplemen Kesehatan sebanyak 22 dan iklan pangan olahan sebanyak 75 iklan. Capaian persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II sebesar 118.16% dengan kategori **tidak dapat disimpulkan**. Telah dilakukan desk pada akhir Juni terkait pengusulan revisi untuk kenaikan target tahun 2025 agar capaian yang diperoleh dapat masuk dalam kategori yang dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 46. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8	100	101.38	116.55	118.16





Realisasi dan capaian kinerja triwulan II meningkat dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja triwulan I namun masih dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Komitmen dari petugas untuk terus melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan akan terus ditingkatkan sehingga indikator kinerja ini tercapai sesuai target tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 47. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8	101.38	118.16 ▲	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan selama triwulan II sebesar 101.38% sudah melampaui target renstra tahun 2025 yaitu 85.8%. Capaian indikator kinerja ini sebesar 118.16% dengan kategori tercapai/melampaui. Berdasarkan capaian ini, monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan disertai peningkatan strategi dalam pengawasan yang lebih efektif sehingga target tahun 2025 dapat dicapai hingga kinerja akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan pada triwulan II. Seluruh iklan yang diawasi pada triwulan II dilakukan sesuai dengan perencanaan iklan yang sudah diatur dengan kategori media dan pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman komoditi masing-masing dan dilaporkan melalui SIPT.

Iklan komoditi obat yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT tepat waktu selama triwulan II sebanyak 39 iklan dengan persentase 100%. Pengawasan iklan obat membutuhkan waktu yang ketelitian petugas untuk mencari database yang sesuai di SIAPik sehingga iklan yang dilaporkan sesuai.



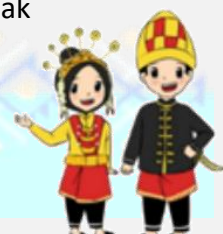


Iklan komoditi kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT selama triwulan II sebanyak 82 iklan dengan persentase 100%. Iklan yang diawasi berasal dari media cetak, media luar ruang, media online dan media elektronik.

Iklan komoditi Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT tepat waktu selama triwulan II sebanyak 40 iklan dari target 26 iklan dengan persentase 108.14%. Iklan yang diawasi berasal dari media cetak maupun media penyiaran yaitu TV nasional. Bulan Mei dilaporkan sebanyak 21 iklan dari target 10 iklan sedangkan pada bulan Juni dilaporkan sebanyak 9 iklan dari target 7 iklan. Hal tersebut menyebabkan tingginya bobot penilaian iklan pada komoditi Obat Bahan Alam pada bulan Mei dan Juni sehingga mempengaruhi realisasi indikator kinerja ini.

Iklan komoditi suplemen kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT tepat waktu selama triwulan II sebanyak 22 iklan dari target 12 iklan dengan persentase 98.77%. Hal tersebut terjadi karena terdapat pengambilan keputusan iklan yang tidak sesuai dan sulit untuk memenuhi kategori iklan media penyiaran khususnya media penyiaran lokal, umumnya iklan media pada penyiaran lokal merupakan iklan yang berulang, sehingga terjadi penurunan persentase tidak mencapai 100% iklan komoditi suplemen kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan komisi penyiaran daerah terkait iklan yang disiarkan pada media penyiaran lokal agar lebih beragam.

Iklan komoditi pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT tepat waktu selama triwulan II sebanyak 75 iklan. Jumlah iklan yang diawasi sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan. Iklan yang diawasi berasal dari media cetak, media online, media penyiaran dan media luar ruang. Pada tanggal 18 bulan Februari diterbitkan Surat Edaran Mekanisme Pengawasan Iklan Pangan Olahan Tahun 2025 yang mewajibkan untuk mengawasi iklan dari setiap media pada setiap bulan. Iklan media luar ruang sulit ditemukan karena adanya efisiensi sehingga pengawasan iklan media luar ruang terbatas hanya di wilayah Kota Banda Aceh, sedangkan iklan media luar ruang yang tersedia di wilayah tersebut belum berganti. Selama triwulan I telah dilakukan penyesuaian target perencanaan pengawasan iklan sesuai ketentuan sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai. Komitmen dan keaktifan petugas Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mengawasi iklan tidak





terbatas pada saat jam dinas juga diperlukan sehingga target iklan yang ditetapkan selalu tercapai tahun 2025.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi aktif petugas dan ketua tim terkait pelaksanaan pengawasan iklan sesuai ketentuan.
2. Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memenuhi semua komponen penilaian yang ada pada definisi operasional setiap komoditi.

f. Upaya peningkatan kinerja

Untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator ini pada triwulan selanjutnya, berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Koordinasi dengan Komisi penyiaran daerah terkait iklan yang disiarkan di media penyiaran lokal.
2. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pengawasan iklan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, memenuhi semua komponen penilaian dan melaporkan tepat waktu melalui SIPT.
3. Monitoring dan evaluasi aktif dari ketua tim terkait hasil pelaksanaan pengawasan iklan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 48. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	318.651.950	38.488.378	12.08	118.16	Efisien





Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa terdapat realisasi anggaran sebesar 12.08% dari anggaran yang tersedia. Penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Penggunaan sumber daya anggaran akan terus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian indikator ini sehingga target persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tetap dapat dicapai.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh dan juga untuk melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan ini merupakan indikator baru pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025-2029, sehingga laporan kinerja interim triwulan II ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja ini pada triwulan berikutnya mulai dari tahap penyusunan rencana target pengawasan iklan, pemenuhan target media iklan, kesesuaian penarikan kesimpulan dan ketepatan waktu pelaporan. Kontrol dari setiap proses tahapan pada indikator ini menjadi poin nilai yang sangat perlu diperhatikan agar indikator ini dapat selalu tercapai dengan kategori sangat baik.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Risiko terkait persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan terkait dengan operasional baik mengenai Sarana Prasarana, Perencanaan, maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.



SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) IKU yang dapat dicapai dengan sangat baik dan sesuai target.

Indikator Kinerja

12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Table 49. Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50.00	50.00	100.00 	Baik

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$$

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan





sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Sampai TW II, telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sebanyak 2 sarana dari 4 sarana produksi pangan fortifikasi yang menjadi cakupan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Realisasi indikator ini diperoleh sebesar 50% dengan target 50% untuk TW II dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 50. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	25	50	100	100

Realisasi TW II meningkat dibandingkan TW I tetapi capaian TW II maupun TW I adalah sama sebesar 100% dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan realisasi bersifat akumulatif dimana terdapat peningkatan setiap triwulannya hingga target akhir tahun tercapai.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 51. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	50.00	66.66 ▼	Perlu Upaya Keras

Realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum mencapai target tahun 2025 dengan kategori perlu upaya keras. Capaian realisasi terhadap target pada indikator ini bersifat





akumulatif hingga akhir tahun 2025. Dengan demikian, Balai Besar POM di Banda Aceh tetap optimis target indikator ini akan dapat dicapai sesuai target pada akhir tahun 2025 dengan tetap mencapai target setiap triwulan hingga target akhir tahun tercapai sepenuhnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Cakupan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh berdasarkan data sarana produksi pangan fortifikasi terdaftar hingga tahun 2023 yaitu sebanyak 4 sarana produksi pangan fortifikasi yang memproduksi garam konsumsi beryodium. Untuk tahun 2025, target cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yaitu sebanyak 3 sarana dan target bersifat akumulatif hingga akhir tahun 2025. Hingga TW II, telah dilakukan pemeriksaan 2 sarana produksi pangan fortifikasi garam konsumsi beryodium yang berlokasi di kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Hasil pemeriksaan yaitu 1 sarana produksi garam yang berlokasi di Banda Aceh sudah tutup dan tidak melakukan produksi karena sarana produksi yang terdaftar merupakan sarana sewa dan sudah beralih fungsi menjadi rumah tinggal. Pemilik izin edar sudah tidak melakukan produksi dan tidak terdapat stok produk, sedangkan izin edar produk masih berlaku hingga 31 Agustus 2027. Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi garam konsumsi beryodium ini tetap dilakukan dengan pembuatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dilaporkan melalui SIPT dengan tindak lanjut rekomendasi Pencabutan Izin Penerapan CPPOB dan Pencabutan Izin Edar an UKM Garam Get.

Untuk sarana produksi fortifikasi yang berada di Aceh Besar memperoleh rating hasil pemeriksaan Baik. Sampling terhadap produk fortifikasi sebagaimana yang tertuang dalam manual indikator kinerja ini hanya dilakukan pada sarana produksi garam di Aceh Besar sebanyak 1 sampel dengan hasil uji terhadap kandungan fortifikan Memenuhi Syarat. Sebanyak 2 sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa ini sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang ditargetkan untuk TW II, sehingga





realisasi pada TW II sesuai dengan target yaitu sebanyak 2 sarana dengan persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 50% dengan hasil capaian terhadap target TW II adalah 100%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung untuk pencapaian realisasi pada indikator kinerja ini antara lain:

1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana pangan fortifikasi yang dilaksanakan dengan konsisten sesuai perencanaan.
2. Monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana sesuai dengan ketentuan.
3. Koordinasi dan komunikasi efektif antara seksi inspeksi dengan seksi sertifikasi terkait rekomendasi pencabutan IPCPPOB dan NIE produk terhadap sarana produksi pangan fortifikasi yang sudah tidak memenuhi persyaratan.
4. Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk selalu mematuhi peraturan terkait CPPOB.

f. Upaya peningkatan kinerja

Untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator ini pada triwulan selanjutnya, berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai perencanaan
2. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan, melaporkan tepat waktu dan menindaklanjuti sesuai pedoman.
3. Monitoring dan evaluasi aktif dari ketua tim terkait hasil pemeriksaan sarana produksi.
4. Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk menghasilkan produk yang memenuhi syarat uji terkait fortifikan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 52. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja





Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	5.069.000	920.000	18.15	100	Efisien

Penggunaan anggaran telah efisien di mana realisasi capaian indikator sudah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 18,15%. Sumber daya yang tersedia untuk mencapai indikator ini akan tetap dioptimalkan dimana masih terdapat 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang berada diluar kota Banda Aceh yang menjadi target pada triwulan selanjutnya sehingga capaian indikator cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada renstra 2025 - 2029, sehingga pemanfaatan laporan kinerja akan sangat diperlukan untuk melihat perkembangan capaian indikator ini selanjutnya. Sarana produksi pangan fortifikasi yang telah diperiksa hingga TW II ini merupakan 1 sarana yang direkomendasi untuk dicabut IP CPPOB dan NIE produk, sehingga tidak akan masuk dalam target cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi untuk tahun selanjutnya. Selain itu pembinaan terhadap sarana produksi fortifikasi juga perlu aktif dilakukan agar selalu menghasilkan produk pangan olahan fortifikasi yang memenuhi syarat hasil uji kandungan fortifikan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Capaian indikator persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai dengan baik sesuai target yang ditetapkan. Pengelolaan berbagai risiko yang muncul baik yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia, dan faktor eksternal (pelaku usaha) telah dimitigasi/dikendalikan secara efektif. Risiko terkait adanya fraud/penyalahgunaan



wewenang dan adanya gratifikasi juga telah dikendalikan secara efektif dengan membuat pakta integritas dan penerapan sanksi tegas bagi petugas yang terindikasi dan terbukti melakukan pelanggaran. Risiko - risiko baru yang mungkin muncul akan selalu diidentifikasi serta pengendalian yang telah dilakukan akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali.

SASARAN KEGIATAN 3

Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) IKU yang dapat dicapai dengan sangat baik dan melampaui target.

Indikator Kinerja

13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 53. Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5	72.6	101.54 	Sangat Baik

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM, yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang





Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium dan Metoda Analisa yang Terverifikasi. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, komponen standar kemampuan laboratorium sebagai berikut:

- Standar Lingkup Pengujian 50%
- Standar Peralatan 20%
- Standar Kompetensi 20%
- Standar Metoda Terverifikasi 10%

Hasil penilaian terhadap komponen standar kemampuan laboratorium pada TW1 sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup 83.3%
- Standar Peralatan 80,3%
- Standar Kompetensi 50%
- Standar Metoda Terverifikasi 44.4%

Total capaian nilai SKL 72.6 %, target SKL TW 2 71.5%, nilai SKL terhadap target 101.54%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 54. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan	73	72.2	72.6	101.69	101.54

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 menurun apabila dibandingkan dengan triwulan I, tetapi masih mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 55. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025





Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.00	72.6	99.45 	Akan Tercapai

Realisasi sebesar 72.6% dari target tahunan sebesar 73% dengan kategori Akan Tercapai, persentase capaian tahunan sebesar 99.45%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan Kinerja Pada TW II, dapat dicapai disebabkan:

Terdapat kenaikan realisasi sebesar (0,6) poin dari TW1, Keberhasilan peningkatan Nilai SKL pada TW 2 disebabkan adanya penambahan pada (4) komponen dibawah ini: Aspek Ruang Lingkup (penambahan RL Lab. Mikro dan Pangan), terdapat penambahan 2 pengujian ruang lingkup:

- Lab. Mikrobiologi: DETEKSI GEN PENGKODE ENTEROTOKSIN (nheA, nheB, nheC, hblA, hblC, dan hblD) DAN TOKSIN EMETIK (ces) KELOMPOK *Bacillus cereus* DENGAN METODE REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RTi-PCR) MENGGUNAKAN SensiFAST® SYBR No Rox Mix.
- Lab Pangan: Penambahan (1) RL Asam Dehidroasetat dalam produk roti

Aspek Peralatan

- Kalibrasi terhadap peralatan secara EX- SITU dan IN - SITU (P3OMN) dan Vendor, telah dikalibrasi:

Kalibrasi IN-SITU; (95) alat, EX-SITU: (12) alat. Jumlah alat yang kalibrasi Vendor sebanyak : 8 alat dari (28) alat yg direncanakan , adapun alat yg sudah dikalibrasi adalah HPLC (4) buah pada masing- masing lab, GC- MS -HSS di laboratorium kimia (1) bh , dan BSC pada lab Mikro sebanyak (3) buah, sedangkan penambahan alat Lab dari pengadaan tahun 2025 berupa : *Dissolusi Tester* pada Lab obat (1) bh, Water Purification di Laboratorium pangan (1) unit, sedang pada Belanja





Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin telah pengadaan Pompa HPLC LC 20 AD (Lab Obat dan Pangan) 2 unit.

Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin berupa: UPS *Battery Back Up Smart Kap. 6 KVA* (1) bh di Lab Mikrobiologi.

Metoda Analisa Terverifikasi

Penambahan (7) buah Metoda Analisa:

Lab Kosmetik (1): PENETAPAN KADAR ASAM GLIKOLAT DALAM PRODUK KOSMETIK SEDIAAN CAIR SECARA KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI – PHOTO DIODE ARRAY (23/KO/MA-PPOMN/19)

Lab Mikrobiologi:

- Verifikasi MA Angka Lempeng Total Kontaminan Dalam Makanan (Susu mengandung Probiotik).
- VERIFIKASI METODA ANALISIS DETEKSI GEN PENGKODE ENTEROTOKSIN (nheA, dheB, dheC, hblA, hblC, dan hblD) DAN TOKSIN EMETIK (ces). KELOMPOK *Bacillus cereus* DENGAN METODE REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RTi-PCR) MENGGUNAKAN SensiFAST® SYBR No Rox Mix.

Lab. Obat:

- Penetapan kadar zat terlarut hasil disolusi fluocetin HCL dalam sediaan tablet.
- Identifikasi penetapan kadar, keseragaman sediaan fluocetin HCL dalam sediaan Tablet.
- Penetapan kadar zat terlarut hasil disolusi kolkisin dalam sediaan tablet.
- Identifikasi dan penetapan kadar kolkisin dalam sediaan tablet.

Aspek Kompetensi Penguji: berdasarkan penambahan RL pengujian serta adanya penambahan kompetensi penguji di lab Kosmetik , Mikrobiologi yang dibuktikan dengan CP, LCP penguji serta telah dilakukannya pelatihan pada lab Obat dengan narasumber dari P3OMN berupa pelatihan Bimbingan Teknis Kalibrasi Instrumen Disolusi: Mechanical Calibration dan PVT (Performance Verification Testing) dan





verifikasi *Dissolusi Triheksifenidil* HCl dalam sediaan Tablet, Menjadi Bimbingan Teknis Pengujian Disolusi dan Spektrofotometri kompleks Verifikasi Metoda Analisa *Dissolusi Triheksifenidil* Tab. Dalam rangka peningkatan kompetensi pelatihan tidak hanya diikuti oleh personil lab obat saja tetapi juga oleh personil laboratorium OBASKK, Kosmetik dan Laboratorium Pangan. Penilaian terhadap terpenuhinya aspek 1 dan aspek 2. Aspek 1 yaitu tersedianya penguji untuk melakukan pengujian seluruh ruang lingkup, Aspek 2 yaitu tersedianya minimal 2 (dua) penguji untuk melakukan pengujian suatu ruang lingkup, pada TW 2 terdapat peningkatan kompetensi penguji dibuktikan dengan CP/ LCP dari Lab Kosmetik dan Lab Mikrobiologi

Adapun program yang menunjang keberhasilan pencapaian:

- Verifikasi Metoda Analisa.
- Pelatihan Internal.
- Kalibrasi Internal/ Eksternal.
- Pengadaan Alat, Suku Cadang, Reagensia, BP, Alat gelas.

Kendala dalam pelaksanaan pengujian di TW II, antara lain:

Laboratorium Obat:

- Perlu penambahan kolom dan alat gelas untuk menghindari penumpukan sampel akibat *performance* kolom menurun dan alat gelas yang kurang. Sampel bulan Juni yang baru selesai diuji baru mencapai 35,6%. Hal ini disebabkan antrian penggunaan alat gelas, penggantian kolom yang bisa sampai 5 kali serta ketiadaan reagensia HCl 37%.

Laboratorium Kosmetik:

- Sampel 2 kali masuk dalam bulan tersebut sehingga uji berulang dengan parameter yang sama yang menyebabkan penumpukan parameter uji.
- Antrian alat karena Metode yang digunakan kebanyakan menggunakan HPLC (HPLC existing = 2 pcs, 6 penguji).





- Penggunaan kolom yang *overload* menyebabkan sering mengulang pengujiannya, sampel yang diduga TMS (pengujian ulang).
- HPLC LC 20 AD proses perbaikan (instalasi pump), 6. 1 buah HPLC kondisi rusak berat.
- Sampel Juni belum selesai uji karena reagen HCl tidak tersedia sehingga sampel di *clock off* (Parameter uji PK. Cemarkan Logam Hg, Pb, Cd, As tidak bisa dikerjakan).
- Penggunaan alat gelas antri pada pengujian mikrobiologi disebabkan semua komoditi di uji secara mikrobiologi dengan time line 15 HK untuk semua komoditi dan masuk secara bersamaan pada rentang tanggal 1-10 setiap bulan dengan komposisi SDM 8 personil termasuk penyelia.

Laboratorium Pangan

- Antri alat gelas dan peralatan untuk pengujian mikrobiologi karena semua komoditi memiliki *timeline* 15 HK, sehingga hampir semua produk pangan pada bulan Mei lewat dari 15 HK
- Pengulangan pengujian karena terdapat sampel yang TMS untuk memastikan kembali hasil uji memakan waktu sehingga menyebabkan sampel lewat dari 15 HK
- Perlu penambahan anggaran pembelian suku cadang (selang HPLC, lampu HPLC, dll) dan penunjang (seperti kolom HPLC, filter sampel, filter fase gerak, dll) untuk menunjang kelancaran dan hasil pengujian yang optimal.

Rencana tindak lanjut terhadap kendala di atas:

- Penambahan ruang lingkup dapat terlaksana sesuai perencanaan pada TW III dan TW IV.
- Pengadaan sampel Ruang lingkup mengingat sulit mendapatkan sampel ruang lingkup untuk obat maka diperlukan Koordinasi dengan Bidang pemeriksaan untuk pengadaan sampel Ruang lingkup dan revisi anggaran pengujian (*bila*



tidak dapat di akomodir dari anggaran Inspeksi) untuk pengadaan sampel RL Obat.

- Verifikasi MA sesuai perencanaan.
- Upaya dan strategi untuk penambahan alat Lab (sekarang sudah stagnan).
- Koordinasi dengan P3OMN untuk mendapatkan BP, jadwal pelatihan JMHP yang belum terlaksana, Pendampingan terhadap hasil uji yang TMS.
- Kalibrasi alat oleh Vendor.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Verifikasi Metoda Analisa pada laboratorium Obat sebanyak (4) MA dan Lab. Kosmetik (1) dan Lab. Mikrobiologi (2).
- Pelatihan internal di laboratorium Obat
- Pengadaan alat laboratorium pada laboratorium obat berupa Disolusi Tester, timbangan analitik.
- Pengadaan reagensia dan media mikrobiologi, alat gelas, suku cadang.
- Kalibrasi alat laboratorium.

f. Upaya peningkatan kinerja

Upaya peningkatan dilakukan terus dilakukan dengan konsisten dan komitmen pada perencanaan yang telah dibuat di awal tahun.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 56. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2.992.448.000	1.530.190.820	51.14	101.54	Efisien





Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran sebesar 21.39% merupakan realisasi berdasarkan anggaran efisiensi. Anggaran tahun 2025 sudah mendukung pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar. Kemampuan Laboratorium dan penggunaan anggaran akan lebih dioptimalkan lagi realisasi pada TW berikutnya.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh dan juga untuk melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium ini merupakan indikator yang terdapat pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025-2029, sehingga laporan kinerja interim TW II ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja ini pada TW berikutnya mulai dari tahap penyusunan rencana target, pemenuhan target. Kontrol dari setiap proses tahapan pada indikator ini menjadi poin nilai yang sangat perlu diperhatikan agar indikator ini dapat selalu tercapai dengan kategori sangat baik.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait Indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium terdapat pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Risiko terkait Indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium banyak terkait dengan operasional baik mengenai Sarana Prasarana



Laboratorium, Perencanaan, maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja. Indikator Kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, jumlah desa pangan aman dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Semua indikator pada sasaran kegiatan ini memenuhi target sampai dengan triwulan II.

Indikator Kinerja

14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 57. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	98.83	114.20 	Tidak dapat disimpulkan

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE





3. Pemahaman Audiens KIE

4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuesioner dan online survey. Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

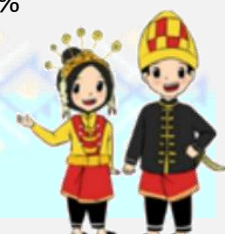
Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan survei Efektifitas KIE triwulan II dengan jumlah responden 189 orang (indeks KIE 98.83) dengan perincian responden KIE Tatap muka sebanyak 148 orang (indeks 97.78) dan responden KIE media sebanyak 41 orang (indeks 99.89). Realisasi tingkat efektifitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Obat dan Makanan triwulan II di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebesar 98.83 dan capaian tingkat efektifitas KIE yaitu 114.20 % dengan kategori **“Tidak dapat disimpulkan”**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 58. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	95.96	98.83	110.89	114.20

Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan I tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 95.96 %





dan capaian 110.89%. Sedangkan pada triwulan II tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 98.83 % dan capaian 114.20%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan realisasi dan capaian di triwulan II tahun 2025 lebih tinggi daripada triwulan I tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 59. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	98.83	114.20 ▲	Melampaui/ Tercapai

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan II telah mencapai target Renstra tahun 2025 dengan target indeks 86.54 dan capaian sebesar 114.20 % dengan kategori “Tercapai/melampaui”. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin peduli dan paham kegiatan KIE BPOM. Hal ini tidak lepas dari peran dan kontribusi seluruh pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh dalam menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait Obat dan Makanan aman, bermutu, berkhasiat dan berdaya saing.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis penyebab keberhasilan Nilai Tingkat Efektifitas KIE Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target pada triwulan II tahun 2025, hal ini disebabkan:

1. Komitmen dan kerjasama antar petugas yang cukup baik.
2. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor dan pemerintah daerah.
3. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI.
4. Pemahaman peserta KIE terhadap beberapa materi yang disampaikan pada saat KIE tatap muka bervariasi.





Kegiatan KIE dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya yaitu KIE di warung kopi melalui inovasi Sanger Ureung Aceh yang berkolaborasi dengan SAKA POM, KIE untuk pencegahan stunting kepada ibu hamil KEK dan balita dan KIE untuk program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Untuk kegiatan KIE melalui media telah dilaksanakan dengan membuat konten-konten secara mandiri di media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh dan membuat inovasi Podcast Berbisik BPOM (Berbincang Asik Bersama BPOM). Podcast ini mengundang narasumber terpercaya dari luar dan narasumber Balai Besar POM di Banda Aceh dipandu oleh host dengan tema yang menarik setiap bulannya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan yang efektif disebabkan indeks efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2025 pada Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh 95.96 (Sangat Efektif) dengan metode survey menggunakan kobotoolbox (17 pertanyaan survey). Metode ini tidak lagi memuat rincian indeks per indikator, namun berisi interpretasi efektivitas dengan 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Table 60. Kategori Hasil Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

f. Upaya peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:





1. Materi yang disampaikan menarik dan mudah dipahami.
2. Narasumber yang kompeten dan komunikatif.
3. Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta.
4. Adanya inovasi Sanger Ureung Aceh dan Podcast Berbisik BPOM Aceh
5. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 61. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	272.181.000	21.192.951	7.79	114.20	Efisien

Dari hasil tabel di atas Dengan realisasi pada 7.79% indikator dapat dicapai sebesar 114.20% sehingga efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang Obat dan Makanan, sehingga diperlukan sebuah strategi kegiatan yang terintegrasi dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat secara bertahap. Penerima manfaat internal dalam hal ini adalah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja





Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu pemberitaan terkait Kinerja KIE Obat dan makanan di berbagai media cetak/online, elektronik dan media sosial berkonotasi negatif. Penyebab resikonya adalah media tidak mendapatkan sumber informasi yang valid sehingga berdampak kepercayaan publik terhadap Balai Besar POM di Banda Aceh menurun dengan level resiko inheren 10. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah:

1. Menyebarluaskan informasi strategis BPOM kepada media dan masyarakat serta lebih terbuka.
2. Ragam Media KIE yang disampaikan dalam tools penilaian terlalu banyak atribut Pengendalian berupa Laporan Tingkat Efektifitas KIE per triwulan.

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 7. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 62. Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	60.00	70.00	116.67 	Tidak dapat Disimpulkan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.





Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif.
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah.
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah.
4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Table 63. Bobot Progres Tahapan Program Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi (%)	% Capaian
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25 %	Jan - April	0 %	-
Sosialisasi Keamanan Pangan	20 %	Maret - Mei	0 %	-
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25 %	Maret - Mei	0 %	-
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25 %	Juni - Juli	0 %	-
Pengawalan	5 %	Feb - Des	0 %	-
Total Skor	100 %			

Pada tahun 2025 program PJAS ini telah masuk dalam tagging tematik Anggaran Responsif Gender (PUG). Pada triwulan II realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebesar 70.00 % dan capaian yaitu 116.67 % dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 64. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	60.00	-	70.00	-	116.67

Indikator Kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan II tahun 2025





diperoleh realisasi sebesar 70.00 % dan capaian 116.67 %. Sedangkan pada triwulan I tahun 2025 belum dapat disimpulkan karena tahapan program sekolah mulai dilakukan di TW II 2025.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 65. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	60.00	70.00	116.67 ▲	Tercapai/ melampaui

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan II telah mencapai target Renstra tahun 2025 dengan target 60.00 % dan Capaian sebesar 70.00 % dengan kategori “Tercapai/melampaui”.

Target jumlah sekolah yang akan diintervensi untuk melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 sebanyak 5 (lima) sekolah dengan lingkup SD dan SMP di wilayah Kota Banda Aceh. Adanya efisiensi anggaran pada awal tahun menyebabkan perubahan target jumlah sekolah yang diintervensi yang semula 10 (sepuluh) sekolah menjadi 5 (lima) sekolah dan dilaksanakan di dalam Kota Banda Aceh. Target ini akan tercapai di akhir tahun 2025 (tahapan program berlangsung mulai TW II - TW IV) dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, anggaran dan sarana prasarana.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis penyebab keberhasilan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target pada triwulan II tahun 2025, hal ini disebabkan:





Melaksanakan 2 tahapan sekaligus yaitu, sosialisasi keamanan pangan dan bimbingan teknis kader keamanan pangan pada Bulan Mei, karena kalender pendidikan pada Bulan Juni s.d Juli libur sekolah.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:

Melibatkan Dinas Pendidikan dan DP3AKB dalam pengawalan pembudayaan keamanan pangan pada sekolah binaan ramah anak dan sekolah adiwiyata.

f. Upaya peningkatan kinerja

1. Melaksanakan program Sekolah sinergi dengan lintas sektor terkait, yang beririsan dengan program Desa dan Pasar.
2. Sinergi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh (Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan DP3AKB) dalam mengawal Program Prioritas Nasional berjalan sesuai tahapan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 66. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	436.427.000	22.553.010	5.17	116.67	Efisien

Kegiatan ini disinergikan pelaksanaannya dengan kegiatan Program Prioritas Nasional lainnya, yaitu Desa Pangan Aman dan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh, diharapkan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan





dapat berjalan dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan. Dengan demikian, semakin meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu sekolah yang diintervensi tidak komitmen dalam pelaksanaan program PJAS. Penyebab resikonya adalah pergantian atau mutasi kepala sekolah dan guru sebagai penanggungjawab kegiatan sehingga berdampak Program Prioritas Nasional PJAS tidak berjalan dengan level resiko inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah membentuk Tim Keamanan Pangan Sekolah.

Atribut Pengendalian berupa:

- 1. SK Tim Keamanan Sekolah
- 2. Laporan monitoring sekolah

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

16. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 67. Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	50.00	70.00	140.00 	Tidak dapat Disimpulkan

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa





berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif.
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa.
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrase dengan program lain).

Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 68. Bobot Progres Tahapan Program Desa Pangan Aman

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal Pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi	% Capaian
Advokasi	25%	Februari – April	0 %	-
Pelatihan kader	25%	Maret-April	0 %	-
Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni	0 %	-
Monev	20%	Juli	0 %	-
Pengawasan	10%	Februari – November	0 %	-
Total Skor	100 %			

Pada triwulan II realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebesar 70.00 % dan capaian yaitu 140.00 % dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”.

- b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya**





Table 69. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Jumlah Desa Pangan Aman	100.00	-	70.00	-	140.00

Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan II tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 70.00 % dan capaian 140.00 %. Sedangkan pada triwulan I tahun 2025 belum dapat disimpulkan karena tahapan program desa mulai dilakukan di TW II 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 70. Perbandingan Realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	100	70.00	70.00 	Akan Tercapai

Realisasi jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan II telah mencapai target Renstra tahun 2025 dengan target 50.00 % dan Capaian sebesar 70.00 % dengan kategori “Tercapai/melampaui”. Target jumlah desa pangan aman yang akan diintervensi tahun 2025 sebanyak 1 (satu) desa dengan angka stunting tinggi di wilayah Kota Banda Aceh. Adanya efisiensi anggaran pada awal tahun menyebabkan perubahan target jumlah sekolah yang diintervensi yang semula 4 (empat) desa menjadi 1 (satu) desa dan dilaksanakan di dalam Kota Banda Aceh. Target ini akan tercapai di akhir tahun 2025 (tahapan program berlangsung mulai TW II - TW IV) dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, anggaran dan sarana prasarana.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)





Analisis penyebab keberhasilan jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target pada triwulan II tahun 2025, hal ini disebabkan:

Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan Desa mengikuti Surat Edaran Nomor: PM.02.01.5.05.25.09 Tahun 2025 meliputi Bimtek Komunitas Desa dan Fasilitasi Penyiapan PMT Posyandu bersama kader Dashyat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:

Melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, BKKBN, DP3AKB dan Tim penurunan stunting.

f. Upaya peningkatan kinerja

Melaksanakan program Desa sinergi dengan lintas sektor terkait (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, BKKBN, DP3AKB, Dinas Kesehatan, dan Bappeda), yang beririsan dengan program Sekolah dan Pasar terkait Penerapan Keamanan Pangan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 71. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah desa pangan aman	709.656.000	72.311.073	10.19	140.00	Efisien

Kegiatan ini disinergikan pelaksanaannya dengan kegiatan Program Prioritas Nasional lainnya, yaitu Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh, diharapkan program Desa Pangan Aman dapat berjalan dan desa yang telah





diintervensi disarankan untuk memperluas program Desa Pangan Aman ke desa-desa sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa. Dengan demikian, semakin meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu Desa yang diintervensi tidak komitmen dalam pelaksanaan program Desa Pangan Aman. Penyebab resikonya adalah Desa tidak menjalankan Rencana aksi dan program berkelanjutan yang telah disusun bersama saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi sehingga berdampak Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman tidak berjalan dengan level resiko inheren 11.

Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah:

1. Membentuk Tim Keamanan Pangan Desa
2. Membentuk Kader Keamanan Pangan Desa

Atribut Pengendalian berupa:

1. SK Tim Keamanan Pangan Desa
2. SK Kader Keamanan Pangan Desa
3. Laporan Program Desa Pangan Aman

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Table 72. Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh





Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	50.00	70.00	140.00 	Tidak dapat Disimpulkan

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.



Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Table 73. Bobot Progres Tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal Pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi	% Capaian
Forum advokasi Komitmen Pemda dan lintas sektor pasar	25 %	Jan - April	0	-
Bimtek dan Penyuluhan komunitas pasar	25 %	Maret - Juni	0	-
Sosialisasi Keamanan pangan kepada komunitas pasar	20%	Maret - Juni	0	-
Pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi	20%	Mei - Juni	0	-
Pengawasan	10 %	Februari - Juli	0	-
Total Skor	100 %			

Pada triwulan II realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebesar 70.00 % dan capaian yaitu 140.00 % dengan kategori **“Tercapai/Melampaui”**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 74. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100.00	-	70.00	-	140.00

Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan II tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 70.00 % dan capaian 140.00 %. Sedangkan pada triwulan I tahun 2025 belum dapat disimpulkan karena tahapan program desa mulai dilakukan di TW II 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025





Table 75. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100.00	70.00	70.00 	Akan Tercapai

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan II telah mencapai target Renstra tahun 2025 dengan target 50.00 % dan Capaian sebesar 70.00 % dengan kategori “Akan tercapai”. Target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang akan diintervensi tahun 2025 sebanyak 1 (satu) pasar di wilayah Kota Banda Aceh. Target ini akan tercapai di akhir tahun 2025 (tahapan program berlangsung mulai TW II - TW III) dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, anggaran dan sarana prasarana.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis penyebab keberhasilan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target pada triwulan II tahun 2025, hal ini disebabkan:

Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan Pasar mengikuti Surat Edaran Nomor: PM.02.01.5.05.25.09 Tahun 2025 meliputi sosialisasi keamanan pangan bagi Komunitas pasar.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:

Melibatkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan UPTD Pasar dalam rangka pengawalan keamanan pangan pasar.

f. Upaya peningkatan kinerja





Melaksanakan program Pasar sinergi dengan lintas sektor terkait (Dinas Perindustrian Perdagangan, UPTD Pasar, Dinas Kesehatan, Bappeda dan dinas Lingkungan Hidup) yang beririsan dengan program Sekolah dan Desa.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 76. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	140.558.000	15.993.900	11.38	140.00	Efisien

Kegiatan ini disinergikan pelaksanaannya dengan kegiatan Program Prioritas Nasional lainnya, yaitu Desa Pangan Aman dan Program sekolah dengan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan dan tahunan, dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar Pemerintah Daerah melakukan replikasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar lain sehingga program ini dapat diterapkan di pasar pasar lain dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah. Diharapkan para pedagang pada pasar yang intervensi akan terus menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, dan menjaga Pangan terbebas dari Bahan Berbahaya yang dilarang pada pangan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu masih ditemukan bahan berbahaya pada pangan yang dijual pada pasar yang diintervensi. Penyebab resikonya adalah tindak lanjut temuan dari Balai Besar POM di Banda Aceh kepada Pemerintah Daerah/Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setempat belum optimal sehingga berdampak Program Prioritas Nasional PPABK tidak berjalan dengan level resiko



inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah membentuk Tim Fasilitator Pasar Aman.

Atribut Pengendalian berupa:

1. SK Fasilitator Pasar Aman
2. Laporan Monev Tindak lanjut hasil sampling dan pengujian

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran Kegiatan ini didukung 1 (satu) indikator kinerja. Pada akhir TW II target indikator ini sudah memenuhi target.

Indikator Kinerja

18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 77. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	42.00	45.00	107.14 	Sangat baik

Pada Triwulan II Tahun 2025, Realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik





yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sudah tercapai seluruhnya untuk tiap tahapan progress pelaksanaan. Dengan demikian, capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik berada pada kriteria sangat baik. Defenisi Operasional Rincian Output UPT Balai/ Balai Besar sebagai berikut:

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

1) Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan





3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

2) Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara
Perhitungan
Dan Formula

: **Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3**

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA



b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seperti data pada tabel berikut:

Table 78. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	84.75	11.67	45.00	64.83	107.14

Perbandingan persentase UMKM OBA, Kos dan Pangan Olahan yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat dari TW I dan TW II sudah jauh lebih baik, jika dilihat TW sebelumnya masih belum mencapai target, tetapi pada TW II ini diperoleh hasil yang sangat memuaskan. Beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian pada TW II adalah target pendampingan di TW I yang belum tercapai dapat dikerjar pada TW II ini, seharusnya pelaksanaan Bimtek IP CPPOB untuk UMKM Pangan olahan, Bimtek CPKB untuk UMKM Kosmetik dan Bimtek CPOTB untuk UMKM Obat Bahan Alam dilaksanakan di Maret 2025 tetapi karena pada awal april masih membahas terkait target pendampingan untuk UMKM OBA dan Kosmetik serta UMKM Pangan Olahan maka pelaksanaan bimtek mundur ke TW II yaitu di bulan April dan Mei 2025, sehingga realisasi dan capaian diperoleh hasil yang sangat memuaskan.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 79. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	90.3	45.00	49.83 ▼	Perlu Upaya Keras

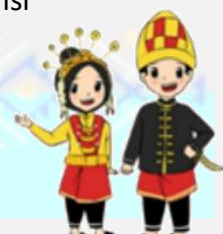




Dilihat dari tabel di atas capaian kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar 49.83% dengan kategori perlu upaya keras. Namun, tetap optimis mampu mencapai target kinerja renstra tahun 2025 yaitu 90,3%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan layanan pendampingan terhadap 13 UMKM yang menjadi target dalam aspek pemenuhan standar dimana 11 UMKM pangan, dan masing masing 1 UMKM untuk Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik. Progres capaian selama periode April sampai Juni 2025 (TW II) tahapan pendampingan UMKM yang memenuhi standar pada UMKM Pangan, OBA dan Kosmetik sebesar 107.14%. Progres capaian untuk UMKM pangan olahan terdiri dari Sosialisasi/KIE Keamanan Obat dan Makanan, Penetapan target UMKM Pangan Olahan, Bimtek CPPOB dan Fasilitasi pendampingan; sedangkan tahapan pendampingan UMKM Kosmetik dan OBA terdiri dari Penetapan target pendampingan UMKM, Bimtek CPKB dan CPOTB dan Pendampingan UMKM oleh fasilitator, dengan realisasi sebesar 45.0%. Analisa penyebab keberhasilan capaian ini disebabkan tahapan pendampingan di TW I sebelumnya belum tercapai dapat dikejar di TW II, seperti berikut pelaksanaan bimtek CPKB, CPOTB dapat dilaksanakan di April 2025 secara daring karena adanya pemblokiran anggaran, sementara bimtek CPPOB terlaksana di Mei 2025 secara hybrid dengan sharing anggaran antara BBPOM di Banda Aceh, Orang Tua Angkat (OTA) serta pelaku usaha. Khusus untuk pendampingan UMKM Pangan dibantu fasilitasi oleh Orang Tua Asuh (OTA) yang dikoordinir oleh Direktorat PMPU PO yang direncanakan dilaksanakan pada Mei 2025, dengan adanya sharing anggaran ini memberikan dapat yang bagus kepada pelaku usaha, dimana dapat meningkatkan komitmen dan keseriusan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi sarannya. Selain itu keberhasilan pelaksanaan pendampingan ini juga ditunjang oleh kompetensi petugas, komunikasi yang intensif dengan unit pengampu dan pelaku usaha serta komitmen petugas substansi





sertifikasi.

Strategi Untuk dapat terus meningkatkan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pemerintah Aceh dalam mendukung percepatan proses registrasi pada sistem terintegrasi.
- b. Pembinaan dan pendampingan melalui fasilitasi pelaku usaha baik secara langsung dengan tatap muka ataupun tidak langsung melalui telpon dan group whatsapp.
- c. Pendampingan secara berkesinambungan dalam desk CAPA (corrective action preventive action) atas hasil pemeriksaan.

Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima. Proses perjalanan organisasi yang dinamis juga menuntut adanya rotasi pegawai sehingga pertukaran posisi petugas di sertifikasi juga berubah oleh karena itu maka pelatihan ini juga harus diikuti setiap tahunnya untuk mengupgrade ilmu pengetahuan yang diikuti perubahan peraturan yang sangat dinamis juga. Pelatihan yang diperlukan berkaitan dengan sertifikasi produk obat dan makanan dalam hal ini pangan, kosmetik dan Obat Bahan Alam dengan menjadi fasilitator UMKM pangan, OBA dan Kosmetik, dan pelatihan untuk auditor distribusi Obat dan Makanan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program - program yang telah dilakukan selama tahun 2025 untuk mencapai realisasi maksimal pada indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain pelatihan Fasilitator CPOTB dan CPKB, pelatihan Fasilitator IP CPPOB serta pelatihan auditor junior CDOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya





kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.

- b. Kolaborasi dengan SKPD pemerintah Aceh terkait perizinan di OSS sangat membantu mempercepat proses registrasi produk karena sistem registrasi melalui OSS RBS yang mengharuskan peran aktif dari SKPD sesuai tupoksinya masing masing.
- c. Kolaborasi dengan lintas sektor seperti perbankan, melalui kerjasama ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dari sisi hilirisasi produk, dimana pelaku usaha dapat meminjam modal dan mendapat pelatihan terkait bagaimana melakukan promosi produk kepada masyarakat melalui media sosial, media elektronik, dan lain lain.
- d. Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance) secara intensif (termasuk melakukan bimtek dan sosialisasi terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan OBA) sesuai target sarana produksi OBA, Kosmetik dan Pangan.

f. Upaya peningkatan kinerja

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja di BBPOM Banda Aceh antara lain:

1. Melakukan pembinaan kinerja antara ketua tim dan anggota tim. Pembinaan ini dimaksudkan mencari solusi jika ada permasalahan terkait kinerja petugas di lapangan. Terjadi komunikasi dua arah diskusi solusi atas permasalahan yang terjadi. Pembinaan ini juga dapat meningkatkan hubungan humanis sesama petugas.
2. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain pelatihan Fasilitator CPOTB dan CPKB, pelatihan Fasilitator IP CPPOB serta pelatihan auditor junior CDOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
3. Kolaborasi dengan lintas sektor dan SKPD pemerintah Aceh seperti perizinan di OSS sangat membantu mempercepat proses registrasi produk karena sistem registrasi melalui OSS RBA. Adanya kolaborasi dengan instansi terkait yang





sama-sama memiliki pembinaan kepada pelaku usaha seperti dinas kesehatan, dinas perindustrian, dinas koperasi dan UMKM, perguruan tinggi, dan lain lain.

4. Kolaborasi dengan lintas sektor seperti perbankan, melalui kerjasama ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dari sisi hilirisasi produk, dimana pelaku usaha dapat meminjam modal dan mendapat pelatihan terkait bagaimana melakukan promosi produk kepada masyarakat melalui media sosial, media elektronik, dan lain lain.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 80. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	48.359.00	-	-	64.83	Belum dapat ditentukan

Anggaran pada indikator UMKM yang didampingi dalam memperoleh rekomendasi sertifikat pembuatan OBA, Kos dan Pangan Olahan meliputi kegiatan sosialisasi, penetapan target dan bimtek sudah menjadi anggaran yang terkena efisiensi sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring, dan hybrid dengan sharing anggaran dari OTA. Seluruh kegiatan terkait pencapaian indikator ini belum menggunakan anggaran yang tersedia. Namun demikian ketersediaan sumber daya anggaran akan dioptimalkan untuk tetap mencapai target pada bulan berikutnya.

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Interim TW II dapat digunakan sebagai laporan pada pelaksanaan layanan kepada masyarakat dalam hal pendampingan kepada pelaku usaha salah satu inovasi pelayan publik. Selain itu juga menjadi salah bukti komitmen UPT Balai Besar POM di Banda Aceh dalam hal memenuhi standar pelayanan sehingga apa yang dibahas pada saat pelaksanaan Forum Komunitas Publik terverifikasi dengan baik yang merupakan komitmen nyata dari petugas sertifikasi.





i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait pendampingan UMKM pangan, OBA dan Kosmetik seperti yang terdapat pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu:

1. Petugas menerima gratifikasi atas layanan yang diberikan pada, risiko ini dapat diatasi dengan menolak gratifikasi yang diberikan secara langsung dan memberikan pengertian dan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa tidak dibenarkan memberikan gratifikasi kepada petugas dalam hal menjaga integritas dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada konsumen, selain itu juga menempelkan stiker anti gratifikasi di sarana produksi.
2. Pelaku usaha kosmetik dan OBA tidak dapat menyelesaikan CAPA audit sertifikasi SPA CPKB/SPA CPOTB dikarenakan:
 - a. biaya renovasi sarana atas rekomendasi petugas, sampai saat ini belum ditemukan risiko terkait jadi tidak mengganggu proses pendampingan kepada pelaku usaha.
 - b. pelaku usaha belum memahami cara pembuatan dokumen mutu, terkait risiko ini juga masih berjalan dengan baik sehingga risiko ini masih bisa diatasi.
3. Pelaku usaha belum memahami cara pembuatan dokumen mutu, untuk risiko ini sampai TW II ini masih bisa diatasi dan tidak menjadi kendala dalam pendampingan pelaku usaha.
4. Petugas tidak dapat memproses pengajuan di e-sertifikasi karena aplikasi sertifikasi mengalami gangguan sehingga dapat menjadi kendala pada proses pengajuan sertifikasi. Untuk risiko ini juga masih dapat diatasi karena aplikasi masih berjalan normal secara umum, sehingga tidak menjadi kendala dalam proses pendampingan perizinan kepada pelaku usaha.

SASARAN KEGIATAN 6

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 7 didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dan sudah memenuhi target triwulan II.

Indikator Kinerja



19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 81. Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42.00	42.00	100.00 	Baik

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$[(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}] \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut





sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada Triwulan I tahun 2025 adalah 14,00 % dari target 14,00 %. Realisasi tersebut berasal dari 1 (satu) perkara di tahun berjalan pada tahap SPDP, dan 1 (satu) perkara carry over (2020) pada Tahap I. Sehingga capaian kinerja keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada Triwulan I tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,00 % dengan kriteria Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table 82. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5	14	42	100	100

Terdapat kenaikan realisasi yang cukup signifikan pada TW II, yaitu sebesar 28 poin. Sedangkan dalam capaian kinerja, masih sama dengan capaian kinerja TWI, sebesar 100,00%. Hal ini menunjukkan, bahwa perencanaan target kinerja sudah baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 83. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025





Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5	42.00	45.41 ▼	Perlu Upaya Keras

Realisasi TW II tahun 2025 yaitu 42,00 %, telah sesuai dengan target TW II, namun dibandingkan dengan target tahunan sebesar 92,25 %, capaiannya menjadi 45,41 %. Pencapaian tersebut masih dalam kategori Perlu Upaya Keras untuk mencapai target akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada TW II adalah sebagai berikut:

1. Seluruh proses penyidikan telah diselesaikan dengan memperhatikan deadline waktu.
2. Koordinasi yang intens dengan Korwas PPNS Polda Aceh.
3. Koordinasi yang baik dengan pihak Kejaksaan Tinggi Aceh.
4. Adanya Sistem Reminder untuk batas waktu pelaporan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yang baik pada Triwulan II, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana kegiatan penyelesaian pemberkasan.
2. Adanya Intensifikasi Penindakan dan Operasi Pangea yang menetapkan tahapan pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu pendorong penyelesaian pelaporan.

f. Upaya peningkatan kinerja

1. Koordinasi dengan Kejati untuk mendapatkan status P-21 hingga tahap 2





terhadap berkas perkara yang sedang ditangani.

2. Merencanakan dan melaksanakan Operasi Investigasi berdasarkan informasi dari Siber, Inspeksi dan Pengaduan Masyarakat dan segera melaporkannya.
3. Merencanakan dan melaksanakan Operasi Penindakan terhadap target yang telah ditetapkan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 84. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	473.984.000	73.748.250	15.56	100	Tidak Efisien

Capaian Output kegiatan ini adalah 50% dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IE} &= \% \text{ Capaian output} : \% \text{ Capaian input} \\ &= 50,00 : 15,56 \\ &= 3,21 \end{aligned}$$

Nilai $\text{IE} > \text{SE}$ sehingga penggunaan sumber daya adalah efisien.

Namun, nilai Tingkat Efisiensinya (TE) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{TE} &= \text{Indeks Efisiensi} - \text{Standar Efisiensi} \text{ dibagi Standar Efisiensi} \\ &= 3,21 - 1 : 1 \\ &= 2,21 \end{aligned}$$

Dengan nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 2,21, maka capaian efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai keberhasilan kinerja penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 75 % dimana hal tersebut masuk dalam kategori Tidak Efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja



Dari capaian kinerja yang baik pada indikator keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan di Balai Besar POM di Banda Aceh, maka laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi interim sehingga target-target interim selanjutnya dapat tercapai sesuai perencanaan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Salah satu resiko kegiatan penyidikan yang dilakukan pada TW II adalah tersangka melarikan diri, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka terhadap tersangka dilakukan penahanan.

SASARAN KEGIATAN 7

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 7 dicapai dengan capaian 100 dan kategori Baik.

Indikator Kinerja

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 85. Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100 	Baik

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT yang terdiri dari:

- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian



analisis (25%);

- b) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun (50%);
- c) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT (25%).

Pada TW I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50,00% sedangkan realisasi yang tercapai pada TW I tahun 2025 sebesar 50,00 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas dibandingkan terhadap target TW I sebesar 100,00 % yang berarti berkinerja **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Table xx. Perbandingan realisasi TW II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW I (%)	Capaian TW II (%)
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	50	50	100	100

Baik realisasi maupun capaian TW II sama dengan TW I yaitu secara berturut-turut 50 % dan 100%. Nilai tersebut merupakan nilai yang sudah optimum.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 86. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	50.00	55.56 ▼	Perlu Upaya Keras





Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,00%. Realisasi yang tercapai pada TW I tahun 2025 sebesar 50,00 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas dibandingkan terhadap target tahunan adalah sebesar 55,56 %. Dengan capaian tersebut, masih Perlu Upaya Keras untuk mencapai target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa faktor yang berkontribusi pada pencapaian kinerja pada TW II, yaitu:

1. Komitmen petugas untuk secara rutin mengirimkan pelaporan baik siber dan kerawanan kejahatan secara tepat waktu.
2. Koneksi internet yang lancar. Dalam hal ini Tim IT berperan penting, sehingga petugas di Fungsi Penindakan tidak terkendala pada koneksi internet maupun perangkat keras yang digunakan untuk melakukan pelaporan.
3. Adanya komunikasi yang baik dengan penanggung jawab/pengelola kegiatan BPOM RI sehingga kendala yang ada, tidak sampai mengganggu proses pelaporan. Misalnya : Pengelola kegiatan segera memberitahukan adanya kesalahan Laporan kepada UPT, sehingga segera dilakukan perbaikan tanpa melewati batas waktu pelaporan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menyepakati jumlah target dan deadline penyelesaian Operasi Siber dan Profiling.
2. Melaporkan secara rutin seluruh informasi yang mengandung unsur kerawanan kejahatan Obat dan Makanan.
3. Membuat reminder batas waktu operasi dan pelaporan.

f. Upaya peningkatan kinerja





1. Melakukan operasi siber dan profiling secara rutin sebelum batas waktunya serta Mengisi secara benar dan lengkap data hasil Operasi Siber dan Profiling.
2. Mengisi dengan benar dan lengkap data kerawanan yang ada dan dilaporkan tepat waktu.
3. Melakukan penggalangan.
4. Menindaklanjuti rekomendasi dari Direktorat Cegah tangkal.
5. Menganalisa kejahatan Obat dan Makanan di Aceh.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 87. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	73.305.000	20,825,679	28,42	100	Efisien

Dari data pada tabel, dapat diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebagai berikut:

$$IE = \% \text{ Capaian output} \% \text{ dibagi Capaian input}$$

$$= 100 : 28,42$$

$$= 3.52$$

Sehingga nilai Tingkat Efisiensinya (TE) adalah sebagai berikut:

$$TE = \text{Indeks Efisiensi} - \text{Standar Efisiensi dibagi Standar Efisiensi}$$

$$= 3,52 - 1/1$$

$$= 2,52$$

Dengan nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 2,52, maka capaian efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai keberhasilan kinerja penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar **75,00 %** dimana hal tersebut masuk dalam kategori **Tidak Efisien**.



h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dari capaian kinerja yang baik pada indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, maka laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi interim sehingga target-target interim selanjutnya dapat tercapai sesuai perencanaan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Salah satu resiko yang dapat menghambat pencapaian pada indikator kerja ini adalah keterlambatan pelaporan hasil Patroli Siber, sehingga pengelolaan risikonya adalah monitoring pelaksanaannya dilakukan oleh ketua tim setiap tanggal 20 bulan bersangkutan.

SASARAN KEGIATAN 8

Layanan Publik UPT yang prima

Sasaran Kegiatan 8 belum ada penilaian pada triwulan II dengan didukung 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT.

Indikator Kinerja

21. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 88. Realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan

K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);





- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Selanjutnya, penghitungan nilai indeks merupakan nilai komposit dari 2 formulir, dimana nilai per indikator merupakan nilai hasil pembobotan formulir F02 dan F03 dikali dengan bobot indikator. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori yaitu:

Table 89. Kategori nilai Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0 - 1.00	F	Gagal
1.01 - 1.50	E	Sangat Buruk
1.51 - 2.00	D	Buruk
2.01 - 2.50	C-	Cukup (dengan catatan)
2.51 - 3.00	C	Cukup
3.01 - 3.50	B-	Baik (dengan catatan)
3.51 - 4.00	B	Baik
4.01 - 4.50	A-	Sangat Baik
4.51 - 5.00	A	Pelayanan Prima





Nilai indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan unit kerja sehingga dapat melihat mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Nilai Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh akan diperoleh pada akhir tahun.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 90. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	-	-	-

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2025 karena nilai akan diperoleh pada akhir tahun. Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan selalu mengupdate data dukung yang diperlukan sesuai 6 aspek penilaian pada UPP dan melakukan pemutakhiran data dan informasi di SIPP.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2025 karena nilai akan diperoleh pada akhir tahun. Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan selalu mengupdate data dukung yang diperlukan sesuai 6 aspek penilaian pada UPP dan melakukan pemutakhiran data dan informasi di SIPP.



e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2025 karena nilai akan diperoleh pada akhir tahun. Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan selalu mengupdate data dukung seperti kebijakan, standar layanan, sarana prasarana, sistem informasi, Sumber daya manusia dan inovasi yang diperlukan sesuai 6 aspek penilaian pada UPP dan melakukan pemutakhiran data dan informasi di SIPP. Penilaian dilaksanakan pada bulan Juli 2025.

f. Upaya peningkatan kinerja

Komitmen Balai Besar POM di Banda Aceh dalam memenuhi data dukung seperti kebijakan, standar pelayanan, sarana prasarana, sistem informasi, Sumber daya manusia dan inovasi yang diperlukan sesuai 6 aspek penilaian pada UPP.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 91. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Pelayanan Publik UPT	112.285.000	3,971,500	3.54	0	Belum dapat ditentukan

Penggunaan anggaran pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Belum dapat ditentukan, karena capaian pada indikator belum ada pada triwulan II.

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, sehingga diperlukan sebuah strategi kegiatan yang terintegrasi dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat secara bertahap. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan





program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa risiko yang diidentifikasi yaitu pemecatan petugas pelayanan publik. Penyebab resikonya adalah Petugas pelayanan melanggar aturan/kriteria yang ditetapkan pada kontrak sehingga berdampak Pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh terganggu dengan level risiko inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah membuat kontrak kerja yang berisi syarat dan aturan yang jelas. Atribut Pengendalian berupa Dokumen Kontrak kerja.

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level risiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

SASARAN KEGIATAN 9

Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

22. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 92. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	-

Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan





Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024. Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar POM di Banda Aceh.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan: bobot 8%; Penataan Tatalaksana: bobot 7%; Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; Penguatan Pengawasan: bobot 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%; Birokrasi Bersih dan Akuntabel: bobot 22,5%; Pelayanan Publik yang Prima: bobot 17,5%.

Pada triwulan II tahun 2025 nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh belum ada dan akan diperoleh pada triwulan IV.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 93. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25	-	-	-





Nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh belum ada pada triwulan II dan akan diperoleh triwulan IV. Namun, Balai Besar POM di Banda Aceh tetap melakukan perbaikan pada triwulan II.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan penancangan WBBM, sehingga dilakukan peningkatan dan perbaikan setiap pokja dalam hal memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2025, dilakukan perubahan tim kerja dan juga dilakukan penguatan inovasi yang lebih berdampak serta monev inovasi dengan ketat. Konsistensi pelaksanaan RB akan terus dipertahankan guna menjaga keberlangsungan predikat WBK yang telah diraih serta penerapan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh. Penyebab keberhasilan dalam peningkatan kinerja:

1. Telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2023.
2. Pimpinan terlibat aktif dan berperan sebagai role model dalam penyusunan perencanaan, perjanjian kinerja serta memantau pencapaian kinerja secara berkala. Dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja.
3. Inovasi pada area Penguatan Pengawasan yaitu Siap Melayani Laporan Anda (SIMELAN) merupakan kanal pengaduan yang memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui adanya praktik gratifikasi, suap, dan/atau benturan kepentingan. Inovasi ini telah didukung dengan SOP Mikro serta kebijakan formal.
4. Memiliki inovasi dalam area pelayanan publik sebagai berikut:
 - a. KORPORASI

Berkolaborasi dengan OPD untuk memfasilitasi UMK dalam percepatan sertifikasi sarana produksi dan registrasi izin edar produk Obat Tradisional, Kosmetika dan Pangan Olahan di Aceh agar dapat memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu produk, sehingga dapat berdaya saing dan meningkatkan kepercayaan publik dalam satu aksi.





b. Sanger Ureung Aceh

Inovasi yang menyatukan layanan pemberian KIE, pemeriksaan sarana, dan pengujian sampel produk makanan yang ada di warung kopi. Inovasi ini berkolaborasi dengan SAKA POM sehingga sangat memungkinkan dapat dilaksanakan di seluruh wilayah pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh.

c. Si JANET

Informasi yang disampaikan dalam bentuk video yang berisi jawaban atas pertanyaan oleh masyarakat/netizen melalui media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh (instagram, facebook, whatsapp, twitter). Saat ini telah dilakukan improvement dengan livestreaming instagram dengan tema yang inovatif dan informatif. Inovasi ini telah dilakukan secara berkelanjutan dan didukung publikasi pada media sosial.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan menurut saran APIP terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Rencana kerja pembangunan ZI belum komprehensif dan sebatas pemenuhan atas pertanyaan pada LKE, sehingga belum menggambarkan tujuan akhir dari pembangunan ZI pada unit kerja. Pemantauan dan evaluasi atas rencana kerja juga belum dilakukan secara memadai.
2. Kampanye pembangunan ZI kepada unit kerja sekitar/stakeholder belum dilakukan secara aktif dan masif, upaya pembangunan budaya kerja belum mampu mengurangi resistensi pegawai atas perubahan, dan Budaya kerja core value ASN BerAKHLAK belum dituangkan ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.
3. Inovasi yang dikembangkan belum seluruhnya didukung dengan bukti sosialisasi, latar belakang, target dan pengukuran atas dampak serta pemantauan dan evaluasi dari penerapan inovasi tersebut.
4. Penempatan pegawai baru dan/atau pegawai hasil mutasi internal belum dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dikaitkan dengan perbaikan kinerja unit kerja serta rencana pengembangan kompetensi belum dapat menunjukkan pemberian kesempatan yang sama kepada semua pegawai.





5. Pemanfaatan IT dalam hal pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan publik serta pelaksanaan keterbukaan informasi publik belum dilakukan pemantauan dan evaluasi secara memadai dan berkala.
6. Sistem pengendalian internal yang dibangun belum memadai dibuktikan dengan adanya pelanggaran kode etik yang terbukti melalui Whistleblowing System (WBS) tahun 2023.
7. Perbaikan standar layanan belum sepenuhnya memanfaatkan hasil forum komunikasi publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta Publikasi atas seluruh layanan belum dilakukan dengan jelas dan lengkap melalui media sosial.
8. Pemberian reward and punishment bagi petugas pemberi layanan belum dilakukan pemantauan dan evaluasi yang memadai dan berkala.
9. Terdapat rekomendasi BPK yang masih dalam proses tindak lanjut.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Rencana Aksi yang dilakukan pada tahun 2025, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi terkait budaya kerja dan pola pikir melalui:
 - a. Inovasi KURSI (Kuis Reformasi Birokrasi) yang dilakukan setiap hari senin secara daring setelah Apel Nasional Badan POM.
 - b. Parrkir (Pantun hari krida olahraga), dilakukan setiap hari kamis untuk mengingatkan dan mengajak pegawai untuk berolahraga pada hari Jumat.
2. Sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik di Balai Besar POM di Banda Aceh (melalui media sosial Balai), melalui inovasi:
 - a. Rasa dari Hati, pengisian data sampel untuk komoditi pangan, kosmetik dan obat oleh Fungsi Pengujian dan Pemeriksaan.
 - b. SPRINT, pembuatan surat tugas melalui aplikasi.
3. Pengembangan kompetensi pegawai melalui inovasi REPOST (Reward and Punishment) dengan menentukan pegawai teladan dan telatan setiap bulan yang dinilai dari SKP dan Perilaku 360.
4. Melakukan peningkatan nilai kinerja dan anggaran melalui inovasi internal Aplikasi SIGARANG (Sistem Informasi Pagu Alokasi, Realisasi dan Sisa Anggaran)





yang memuat pagu alokasi, jenis kegiatan, jenis belanja, laporan FA detail, link capaian output, RHPK dan usulan revisi anggaran.

5. Melakukan pembekalan dan sosialisasi tentang gratifikasi, whistle blowing system, benturan kepentingan dan manajemen risiko terhadap seluruh pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh melalui inovasi SIMELAN (Siap Menindaklanjuti Laporan Anda).
6. Memberikan kuis seputar Obat dan Makanan yang disajikan dalam bentuk TTS, susun kata, true or false dan lainnya melalui inovasi Kuis TIMBA (Tambah Informasi Bersama BPOM Aceh) ditujukan untuk para followers Instagram BPOM Aceh agar menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat terkait pengawasan Obat dan Makanan serta meningkatkan engagement sehingga jumlah followers di Instagram BPOM Aceh bertambah.
7. Gerakan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan energi selama bekerja di kantor melalui inovasi HEALING (Hemat Energi Air, Listrik dan Konservasi Lingkungan) dan LAHKETUKER (Langkah Kecil Untuk Perubahan).
8. Inovasi APATU (Apresiasi Ulang Tahun) berupa ucapan selamat ulang tahun kepada pegawai melalui voice speaker kantor dalam rangka meningkatkan nilai-nilai harmonis dan loyal di lingkungan kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

f. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, yaitu:

1. Konsisten dan rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait rencana aksi tindak lanjut atas kendala dan menceritakan progres tindak lanjutnya pada pelaporan periode selanjutnya.
2. Melakukan penajaman dan analisis dampak terhadap semua inovasi yang ada pada setiap pokja RB.
3. Meningkatkan inovasi layanan yang berbasis kebutuhan masyarakat, memperluas kanal layanan digital serta memastikan setiap pelayanan dilengkapi dengan standar pelayanan yang jelas, transparan dan terpublikasi.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja





Table 94. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	480.974.000	14.514.600	3.02	-	Belum dapat ditentukan

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran belum **dapat ditentukan** di mana realisasi capaian indikator belum tersedia pada triwulan II.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2024, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh perlu meningkatkan kinerja di bidang reformasi birokrasi dengan memanfaatkan inovasi-inovasi di setiap kelompok kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi RB secara rutin. Untuk mempertahankan predikat WBK dan mendapatkan predikat WBBM, Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan perbaikan-perbaikan di setiap pokja terutama pada pelayanan publik yang pada tahun 2024 nilainya menurun dari tahun sebelumnya.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Untuk mengatasi risiko terhadap pemantauan dan evaluasi rencana kerja yang belum dilaksanakan secara konsisten, kampanye pembangunan Zona Integritas (ZI) yang belum dilakukan secara masif, dan inovasi yang dikembangkan yang belum memberikan dampak nyata kepada masyarakat, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Langkah pertama adalah memperbaiki dan memperkuat sistem pemantauan serta evaluasi yang ada, dengan memastikan bahwa setiap rencana kerja dapat dipantau secara real-time dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua elemen instansi bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penggunaan teknologi informasi yang canggih untuk mendukung pemantauan dan evaluasi akan sangat membantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya, untuk mengatasi masalah terkait kampanye pembangunan ZI, penting





bagi Balai Besar POM di Banda Aceh untuk merancang kampanye yang lebih luas dan inklusif, yang dapat menjangkau berbagai kalangan stakeholder dan masyarakat. Kampanye ini perlu melibatkan berbagai saluran komunikasi, baik itu media sosial, media massa, atau kegiatan tatap muka seperti seminar dan diskusi publik, agar informasi tentang ZI tersebar secara efektif. Agar kampanye ini sukses, perlu ada strategi yang matang untuk mengedukasi masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya ZI dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik.

Terkait dengan inovasi yang belum memberikan dampak nyata, Balai Besar POM di Banda Aceh harus memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan berfokus pada kebutuhan masyarakat dan dapat diterima dengan baik oleh publik. Ini dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan inovasi, serta terus memantau dampak yang dihasilkan untuk memastikan bahwa inovasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, feedback dari masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap setiap inovasi yang ada.

23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 95. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dengan rentang nilai sebagai berikut:

Table 96. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan





3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Table 97. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024

Tahun	Nilai SAKIP	Keterangan
2020	75.91	Sangat Baik (BB)
2021	75.96	Sangat Baik (BB)
2022	79.16	Sangat Baik (BB)
2023	79.48	Sangat Baik (BB)
2024	81.48	Memuaskan (A)

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian pada tabel di bawah ini.

Pada triwulan II nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh belum ada dan akan diperoleh pada triwulan IV.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.





c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 98. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78	-	-	-

Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh belum ada pada triwulan II dan akan diperoleh triwulan IV. Namun, Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi dan perbaikan agar target tahun 2025 dapat terpenuhi.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Banda Aceh telah berhasil menaikkan nilai AKIP dari 79,48 (Kategori BB) menjadi 81,48 (Kategori A). Namun, tetap perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut, karena target tahun 2025 juga meningkat. Rekomendasi penilaian AKIP di tahun 2024, antara lain:

1. Menyusun kertas kerja dan matriks reviu target dengan menyajikan penetapan target final dan diformalkan oleh Pimpinan Satker dan memastikan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP.
2. Menyempurnakan SOP Mikro Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.
3. Mendokumentasikan arahan pimpinan dan dokumen monev untuk memastikan penggunaan sumber data yang valid.
4. Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut dan menyusun analisis capaian kinerja berupa kendala/RTL pada aplikasi SIMETRIS, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim.
5. Menyusun Laporan Kinerja tahunan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan SAKIP.
6. Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan kendala dan rekomendasi yang memadai serta monitoring terkait tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya.





Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari APIP, telah dilakukan beberapa upaya dengan mempersiapkan Tim AKIP yang lebih kuat, Pimpinan turut terlibat dalam pembahasan, pengawalan bersama dalam mencapai target kinerja UPT, dan benchmarking pada laporan UPT dengan Nilai AKIP terbaik. Komponen Evaluasi Internal pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 karena terdapat beberapa kelemahan pada Laporan Evaluasi Internal seperti belum menyajikan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, dan rencana tindak lanjutnya. Seluruh komponen indikator kinerja perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan berkelanjutan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain melakukan rapat koordinasi antar fungsi di Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggung jawab kegiatan serta kegiatan pertemuan penyusunan laporan kinerja. Melakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi Inspektorat Utama pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penilaian SAKIP tahun 2024 dan meningkatkan/memperkuat pelaksanaan evaluasi internal dengan melakukan monev kinerja berkala yang dilaksanakan setiap bulannya.

f. Upaya peningkatan perbaikan

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan kinerja, antara lain:

1. Memastikan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja, sehingga tidak terjadi perbedaan data kinerja pada aplikasi SIMETRIS, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja.
2. Memastikan kesesuaian pagu dan realisasi anggaran pada laporan kinerja dan laporan evaluasi internal.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi dan tindak lanjut pada setiap indikator kinerja setiap bulannya.



g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 99. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	110.271.00	-	-	-	Belum dapat ditentukan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, Nilai AKIP tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Namun, untuk tahun 2025 diperlukan perbaikan kinerja hal ini dikarenakan target tahun 2025 meningkat dan terhadap komponen evaluasi internal yang mengalami penurunan, diperlukan konsistensi dan kesesuaian rekomendasi dalam pencapaian target kinerja yang dilakukan setiap triwulan. Terhadap komponen lainnya diperlukan juga perbaikan agar dapat meningkatkan nilai AKIP tahun berikutnya.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Dalam penyelenggaraan AKIP yang maksimal diperlukan komitmen seluruh ketua tim kerja dan anggota tim. Namun, terdapat risiko yang dihadapi seperti ketua tim kerja dan anggota tim yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya menindaklanjuti rekomendasi sehingga rekomendasi perbaikan kinerja per triwulan tidak ditindaklanjuti. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan ketua tim kerja terkait agar masalah tidak kembali terulang dan menghambat kinerja organisasi.

Selain itu, data kinerja dari tim terkait tidak lengkap atau tidak akurat sehingga terlambat mengidentifikasi dan mengatasi masalah kinerja dan dapat mengakibatkan pelaporan evaluasi kinerja tidak dilaporkan tepat waktu. Untuk mengatasi risiko ini, diberikan batas waktu pengumpulan data kepada penanggung jawab data untuk





selanjutnya disusun dalam bentuk laporan.

Metode pengumpulan data tidak konsisten juga dapat menjadi risiko yang mengakibatkan data realisasi kinerja yang ditampilkan berubah-ubah (tidak valid). Untuk itu, diperlukan membuat media pengumpulan data yang dapat diakses secara online seperti google worksheet untuk menghindari keputusan rekomendasi tindak lanjut menjadi keliru.

24. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 100. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh				

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan rumus:
 $(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$

Realisasi berasal dari nilai EKA sebesar 29.26 dari aplikasi Smart dan Nilai IKPA 98.78 dengan perhitungan **$(29.26 \times 50\%) + (98.78 \times 50\%)$ sehingga diperoleh realisasi nilai kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh triwulan II adalah 64.02.**

Indikator kinerja dari Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penilaian disebabkan penilaian dilakukan akhir Bulan Desember (triwulan IV).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terdapat 8 indikator kinerja, meliputi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA,





penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan penyampaian capaian output.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Table 101. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5	-	-	-

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran belum diperoleh sehingga belum dapat diperbandingkan. Untuk penilaian tahun 2025 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun 2025 penilaian diperoleh dari hasil konversi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian nilai kinerja anggaran triwulan II belum ada, namun untuk komponen nilai NKA dipengaruhi oleh:

1. Revisi DIPA





Indikator revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semester dan tidak bersifat kumulatif.

Revisi yang diperhitungkan adalah 14 jenis revisi pagu tetap yang disahkan oleh kementerian keuangan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Balai Besar POM di Banda Aceh sehingga memperoleh nilai 100.

2. Deviasi Halaman III DIPA

Indikator ini mengukur selisih antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam DIPA. Ambang batas deviasi bulanan sebesar 5 persen untuk memperoleh nilai maksimal 100.

Periode Triwulan II Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh nilai 100 dikarenakan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA.

3. Penyerapan Anggaran

Indikator ini mengukur persentase realisasi anggaran terhadap total anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target dan nilai kinerja penyerapan anggaran di Triwulan II yaitu hari kerja ke 10 di bulan April. Penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.

Pada Triwulan II nilai penyerapan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh turun dengan nilai 93.91 disebabkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp4.093.694.000.- (Empat milyar sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

4. Belanja Kontraktual

Belanja kontraktual dihitung berdasarkan perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya selesai tahun anggaran berjalan dan kontraknya telah didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak





ditandatangani. Periode Triwulan II Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh nilai 100.

5. Penyelesaian Tagihan

Indikator kinerja penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal berita acara serah terima (BAST) atau berita acara pembayaran pekerjaan (BAPP). Periode Triwulan II Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh nilai 100.

5. Pengelolaan UP/TUP

Indikator ini mengukur efektivitas pengelolaan UP dan TUP oleh Satker dihitung berdasarkan jumlah SP2D GUP/GUP Nihil/GUTUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN dalam 1 bulan. Triwulan II Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh nilai 100.

6. Pengelolaan UP/TUP

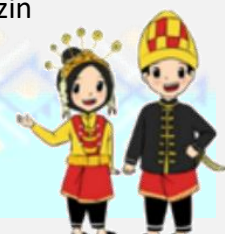
Indikator ini mengukur efektivitas pengelolaan UP dan TUP oleh Satker dihitung berdasarkan jumlah SP2D GUP/GUP Nihil/GUTUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN dalam 1 bulan. Triwulan II Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh nilai 100.

7. Capaian Output

Indikator kinerja capaian output dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya dan nilai kinerja capaian RO sehingga Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh nilai 100.

8. Dispensasi SPM

Indikator ini mengukur persentase SPM yang mendapatkan dispensasi atau izin





keterlambatan.

Nilai Efisiensi pada EKA yang rendah

Komponen penilaian pada Nilai Kinerja Anggaran dipengaruhi oleh Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dimana salah satu komponen yang dinilai adalah Efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran akan bernilai tinggi apabila anggaran yang direalisasikan rendah dan capaian output yang dihasilkan tinggi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh target yang harus dicapai oleh satuan kerja yaitu di atas 99%, dengan demikian apabila capaian output mencapai 100% maka nilai efisiensi hanya tercapai mendekati angka normal yaitu 0, sehingga nilai efisiensi tidak bisa mencapai nilai efisiensi tertinggi pada aplikasi yaitu -20.

Untuk mencapai nilai efisiensi maksimal maka diperlukan realisasi capaian output kegiatan yang jauh melebihi target yang ditetapkan, sehingga dengan capaian anggaran di atas 99% dapat mendorong nilai efisiensi anggaran dimaksud sehingga nilai EKA dapat meningkat dan selanjutnya mempengaruhi peningkatan Nilai Kinerja Anggaran.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
Monitoring dan evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran rutin dilaksanakan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan pencairan anggaran melalui mekanisme GUP, LS dan TUP.
- Peningkatan kompetensi pengelola keuangan
Tahun 2025 pengelola keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh mengikuti bimtek terkait IKPA yang diselenggarakan oleh direktorat perbendaharaan setiap triwulan.



- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Sampai Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan 4 (empat) kali penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi DIPA dan 7 (tujuh) kali revisi POK.

f. Upaya peningkatan kinerja

Balai Besar POM di Banda Aceh berupaya untuk mengawal agar Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2025 dapat mencapai target dengan cara:

1. Melakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian EKA dan IKPA.
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan DJP Wilayah Aceh Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 102. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	12.287.976.000	4.828.166.458	39.29	-	Belum dapat ditentukan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh dapat dilakukan dengan penyesuaian kegiatan melalui mekanisme revisi POK.

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 memenuhi target, namun tahun 2025 tetap diperlukan perbaikan dalam pencapaian target kinerja.





Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, didapat informasi bahwa nilai IKPA pada indikator Penyerapan anggaran tidak memperoleh nilai maksimal dikarenakan realisasi belanja modal tidak mencapai target pada triwulan II dan III dan penyelesaian belanja kontraktual untuk belanja modal masih ada yang belum selesai. Untuk itu perlu dilakukan pengawalan yang ketat pada indikator-indikator yang lain agar nilai IKPA pada akhir tahun tidak semakin turun.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Manajemen risiko terkait nilai kinerja anggaran adalah upaya untuk mengelola risiko yang dapat berdampak pada kinerja anggaran. Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan RPD Halaman III DIPA merupakan salah satu faktor risiko yang disebabkan oleh jadwal pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan dikarenakan kondisi internal dan eksternal sehingga berakibat terjadi deviasi pada halaman III dIPA +/- 5% dan mempengaruhi nilai IKPA satker.

Pertanggungjawaban UP dan TUP tidak tepat waktu juga berakibat terhadap target nilai kinerja anggaran menjadi rendah karena disebabkan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai perencanaan dan penyelesaian pekerjaan oleh pihak ke III tidak sesuai waktu kontrak.

Selain itu capaian output triwulan tidak sesuai target juga menjadi ancaman yang dapat mengurangi nilai IKPA dan kualitas kinerja anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh. Untuk itu diperlukan upaya melakukan movev anggaran triwulan serta komitmen pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai perencanaan guna menjaga nilai kinerja anggaran sesuai target. Selain itu, capaian output triwulan tidak sesuai target juga menjadi ancaman yang dapat mengurangi nilai IKPA dan kualitas kinerja anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh. Untuk itu diperlukan upaya melakukan movev anggaran triwulan serta komitmen pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai perencanaan guna menjaga nilai kinerja anggaran sesuai target.

25. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh





a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Table 103. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh				

Indeks Manajemen Risiko (IMR) merupakan indeks yang mengukur tingkat kematangan (maturitas) penerapan manajemen risiko dalam suatu unit kerja. Manajemen risiko didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang mencakup budaya, proses, dan struktur organisasi untuk menangani risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tingkat maturitas dibagi menjadi 5 (Lima) Kategori yaitu:

1. Risk Naive (Skor 0–16): Risiko ditangani secara individual, belum ada sistem formal.
2. Risk Aware (Skor 17–32): Kesadaran risiko ada, tapi proses belum terstruktur.
3. Risk Defined (Skor 33–48): Proses penanganan risiko mulai teratur dan diprioritaskan.
4. Risk Managed (Skor 49–64): Proses manajemen risiko sudah terintegrasi dan terukur.
5. Risk Enabled (Skor 65–80): Risiko menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategis.

Hingga triwulan I tahun 2025, belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Manajemen Risiko atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025





Table 104. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.2	-	-	-

Realisasi indeks manajemen resiko atas kinerja pengawasan obat dan makanan untuk triwulan I tahun 2025 belum diperoleh hasil. Dengan target yang diberikan oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh optimis mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks Manajemen Resiko diukur melalui kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang Menjalankan tahapan-tahapan mengidentifikasi resiko dan menentukan aktivitas pengendalian yang akan mengurangi atau meniadakan Resiko yang akan mempengaruhi target kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Secara umum penyebab keberhasilan dari tercapainya Indeks Manajemen Resiko Balai Besar POM yaitu:

1. Komitmen Pimpinan
Adanya dukungan aktif dari pimpinan unit kerja dalam mendorong implementasi manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.
2. Pemahaman SDM yang Meningkat
Pegawai mulai memahami pentingnya identifikasi dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas.
3. Tersedianya Dokumen dan Prosedur
Penyusunan dokumen pendukung seperti daftar risiko, rencana mitigasi, dan sistem pelaporan risiko membantu proses berjalan lebih sistematis.
4. Koordinasi dan Pemantauan yang Konsisten
Adanya monitoring dan evaluasi berkala serta keterlibatan unit pengawasan





internal dalam proses evaluasi maturitas risiko.

5. Keikutsertaan seluruh pegawai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama triwulan II agar menunjang pencapaian indeks Manajemen Risiko;

1. Rutin melakukan Sosialisasi-sosialisasi terkait Manajemen risiko.
2. Mengundang Inspektorat dalam rangka Sosialisasi dan Brainstorming terkait Manajemen Risiko.
3. Mengadakan Rapat Pembahasan yang diikuti seluruh pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh Terkait Penentuan Risk Event dan Tindak Lanjut Pengendalian dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh.
4. Lebih Melibatkan Ketua Tim dalam mengidentifikasi Risk Event masing masing bidang.
5. Melakukan evaluasi Secara berkala.

f. Upaya peningkatan kinerja

Perkuatan terus dilakukan dalam peningkatan kinerja terkait Manajemen Risiko.

Hal-hal yang dilakukan, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait risiko yang ada di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh.
2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan *awareness* terkait risiko-risiko yang ada di Balai Besar POM di Banda Aceh.
3. Mengidentifikasi risiko secara berkala.
4. Melakukan Kolaborasi dengan semua Kelompok Kerja terkait Risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi di Lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 105. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja





Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	22.640.000	-	-	-	Belum dapat ditentukan

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran belum dapat ditentukan di mana realisasi capaian indikator belum tersedia pada triwulan II dan capaian anggaran belum ada dikarenakan efisiensi.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, hasil Indeks Manajemen Risiko Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh tidak menjadi target Indeks Kinerja dan baru menjadi target di Tahun 2025. Untuk tahun 2024 nilai manajemen risiko yang didapat dari hasil evaluasi adalah 2.844 dengan tingkat maturitas Risk Aware.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait Tercapainya indeks manajemen risiko Balai Besar POM di Banda Aceh yakni harus selalu melakukan evaluasi rutin terkait Update risiko yang ada di Balai Besar POM di Banda Aceh serta tindak pengendalian risiko tersebut. Sosialisasi-sosialisasi terus dilakukan dan pengemban ilmu terkait manajemen risiko diberikan dan diwajibkan diikuti oleh seluruh pegawai.





1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Matriks RATL s.d Bulan April 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum				
												Rencana aksi yang belum selesai	Timeline			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75	99.7	117.64	Akhir TW 1 realisasi sebesar 100 %. Capaian pada bulan April menurun menjadi 99,7 %, namun persentase capaian telah melebihi batas maksimal.	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak terbaru (buka blokir). 2. Sampel dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling secara konsisten. 3. Terjadi peningkatan realisasi ketepatan waktu pelaporan SIPT dibandingkan bulan sebelumnya.	1. Sampling dilakukan sesuai renlak terbaru (buka Blokir) 2. Koordinasi sampling antara Tim Laboratorium dan Tim Inspeksi Sediaan Farmasi berjalan efektif. 3. Monev Ketua tim.	1. Secara konsisten melakukan sampling dan pengujian sediaan farmasi sesuai dengan renlak terbaru (buka blokir), pedoman sampling dan DO IKU 2. Membuat usulan perencanaan kebutuhan suku cadang dan reagen yang belum terealisasi di bulan April, agar pengujian pada bulan berikutnya tidak terkendala.	Mei	1. Melaksanakan sampling bulan April sesuai dengan renlak terbaru (buka blokir) 2. Koordinasi dengan tim sampling terkait kemampuan uji laboratorium baik melalui WAG ataupun melalui update kemampuan uji di link yang tersedia pada lab. regional terkait pengujian sampel bulan April 3. Monev sampling dan pengujian oleh ketua tim	1. Melaksanakan sampling bulan Mei sesuai dengan renlak terbaru (buka blokir) 2. Koordinasi dengan tim sampling terkait kemampuan uji laboratorium baik melalui WAG ataupun melalui update kemampuan uji di link yang tersedia pada lab. regional terkait pengujian sampel bulan Mei 3. Pengusulan pengadaan kepada PPK untuk pengujian bulan Mei	Mei	Realisasi sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai April 2025 sebesar 99,7 %	Open	IK1_DatdukApril
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Akhir Tahun													
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	96.6	113.65	Akhir TW I realisasi sebesar 93,46% dan meningkat untuk capaian bulan April menjadi 96,60%, peningkatan capaian seiring dengan bertambahnya jumlah sampel yang disampling dan diuji sesuai ketentuan	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak terbaru (buka blokir). 2. Sampel dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling secara konsisten. 3. Terjadi peningkatan realisasi ketepatan waktu pelaporan SIPT dibandingkan bulan sebelumnya.	1. Sampling dilakukan sesuai renlak terbaru (buka Blokir) 2. Koordinasi sampling antara Tim Laboratorium dan Tim Inspeksi Pangan berjalan efektif. 3. Monev Ketua tim terkait Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, dan Pelaporan SIPT	1. Melaksanakan sampling sesuai renlak 2. Melaksanakan Pengujian sesuai Pedoman sampling 3. Melakukan Pelaporan SIPT sesuai timeline	Mei	1. Sampling bulan April 2. Koordinasi capaian bulan April 3. Koordinasi lab regional terkait uji bromat 4. Monev sampel April	1. Sampling sesuai perencanaan untuk bulan selanjutnya 2. Koordinasi bidang inspeksi dan pengujian 3. Koordinasi dengan Lab regional 4. Monev hasil pelaporan SIPT	Mei	Realisasi sampai akhir Bulan April sudah mencapai target yang ditetapkan, dan terdapat peningkatan persentase sampel yang dilaporkan tepat waktu	Open	IK3_DatdukApril
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0.00	Tidak ada sampel KLB yang diterima Hingga April										IK4_DatdukApril
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	88.18	103.74	Realisasi sampai Bulan Maret adalah 88.18 dari target 85% (Capaian 103.74%) sebanyak 11 sampel telah disampling dan diuji.	Capaian hingga April merupakan capaian TW I, tidak ada penambahan sampel PIRT di bulan April.	Tidak dilakukan sampling PIRT menunggu konfirmasi dari pusat terkait buka blokir anggaran	1. Renlak penyesuaian relaksasi anggaran 2. Koordinasi pemeriksaan dan terkait kesiapan sumber daya pengujian 3. Percepatan pengadaan baku dan reagen 4. Monev waktu pelaporan pengujian	Mei	Menyusun renlak sampling PIRT sesuai dengan relaksasi anggaran.	1. Melaksanakan sampling PIRT sesuai dengan renlak terbaru (buka blokir) 2. Melakukan Koordinasi pemeriksaan dan pengujian terkait capaian indikator 3. Monev waktu pelaporan pengujian	Mei	Realisasi sampai April masih tercapai sesuai target. Telah tersusun renlak sampling PIRT terbaru (buka blokir)	Open	IK5_DatdukApril





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana		Kondisi Akhir	Status	Data Dukung	
											Rencana aksi yang sudah selesai	Bel Rencana aksi yang akan dilakukan Timeline				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	1	14	15	16	1
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.00	79.61	104.75	Capaian realisasi sampai akhir Maret sebesar 75,96 % dari target 75 % (persentase capaian 101,26%). Dari kedua aspek penilaian yaitu pelaku usaha dan lintas sektor telah memenuhi target.	1. Menghubungi dan mendatangi sarana yang akan diberikan surat tindak lanjut secara intensif. 2. Memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi Whatsapp dan telepon maupun tatap mukalangsung ke kantor. 3. Intensif menghubungi instansi terkait baik kepada pimpinan dan tim teknisnya. 4. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.	1. Melakukan closed CAPA di sarana ritail OBASK, Kosmetik dan Pangan terkait temuan produk TIE, rusak dan kadaluwarsa yang langsung ditindaklanjuti (dimusnahkan pemilik) 2. Menghubungi dan mendatangi sarana yang akan diberikan surat tindak lanjut secara intensif. 3. Memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi Whatsapp dan telepon maupun tatap mukalangsung ke kantor. 4. Intensif menghubungi instansi terkait baik kepada pimpinan dan tim teknisnya. 5. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.	1. Melakukan komunikasi efektif terkait penyampaian feedback antara petugas dan pemangku kepentingan 2. Memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi Whatsapp dan telepon maupun tatap mukalangsung ke kantor. 3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait penyelesaian CAPA hasil inspeksi	Mei 2025	1. Melakukan closed CAPA di sarana ritail OBASK, Kosmetik dan Pangan terkait temuan produk TIE, rusak dan kadaluwarsa yang langsung ditindaklanjuti (dimusnahkan pemilik) 2. Menghubungi dan mendatangi sarana yang akan diberikan surat tindak lanjut secara intensif. 3. Memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi Whatsapp dan telepon maupun tatap mukalangsung ke kantor. 4. Intensif menghubungi instansi terkait baik kepada pimpinan dan	Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait untuk melakukan perbaikan CAPA	Mei 2025	Realisasi sampai April 2025 telah melebihi target sebesar 104.75 %	open	IK6_DatdukApril
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	100	107.53	Realisasi pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi hingga akhir Maret adalah 100% dari target 93% (capaian 107,53%). 1. Sarana produksi sediaan farmasi di Propinsi Aceh hanya sarana produksi OBA dan kosmetik, dan adanya efisiensi anggaran pada TW I tahun 2025, terjadi perubahan target sarana produksi OBA- Kosmetik, pada TW 1 sarana produksi sediaan farmasi yang menjadi target pemeriksaan hanya sarana produksi kosmetik. 2. Pada tahun 2025 penilaian capaian kinerja berdasarkan penilaian mandiri terhadap proses tahapan proses kegiatan, sesuai dengan DO yang tercantum dalam manual IKU 2025	Adanya relaksasi anggaran pada TW II dan target pemeriksaan sarana produksi dikembalikan ke target awal tahun, akan dilakukan penyusunan renlak pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.	1. Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai perencanaan 2. Melaksanakan Pemeriksaan sarana sediaan farmasi 3. Melakukan Monev Ketua Tim	Membuat renlak penyesuaian pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	April -2025	1. Pemeriksaan Sarana Produksi sediaan farmasi sesuai perencanaan 2. Melakukan Monev Ketua Tim	1. Pemeriksaan sarana sediaan farmasi (sarana Produksi OBA)		Open	IK7_DatdukApril	
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65	Sampai akhir Maret, realisasi belum dapat ditetapkan karena masih menunggu ketetapan dari unit pengampu dan biro perencanaan terkait indikator ini, hanya 2 sarana produksi yang diperiksa yang merupakan target efisiensi anggaran	Capaian bulan April tercapai sama dengan bulan sebelumnya dimana 5 sarana produksi yang diperiksa telah ditindaklanjuti dan dilaporkan tepat waktu, hasil pemeriksaan 3 sarana tutup, 1 sarana MK dan 1 sarana TMK	1. Pemeriksaan sarana sesuai perencanaan 2. Monev ketua tim 3. Komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan	1. Adanya relaksasi anggaran, perlu penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan. 2. Monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman.	Mei	Monev hasil pemeriksaan sampai April	1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana Mei sesuai renlak 2. Monev hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	Mei	Target sampai April tercapai, seluruh tahapan proses pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Open	IK8_DatdukApril
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.12	102.45	Realisasi sampai Maret tercapai 98.15 % dengan persentase capaian 101.45 %	1. Tercapainya semua komponen penilaian IKU yang ada pada DO untuk semua komoditi 2. Monev pelaksanaan inspeksi distribusi sediaan farmasi, tindak lanjut hasil inspeksi dan pelaporan melalui SIPT	1. Pelaksanaan inspeksi sarana sesuai perencanaan setelah buka blokir anggaran 2. Monev ketua tim 3. Komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan	1. Melaksanakan inspeksi sesuai renlak terbaru (buka blokir). 2. Memenuhi secara maksimal setiap komponen penilaian sesuai DO pada IKU	Mei 2025	1. Renlak pemeriksaan sarana sediaan farmasi TW 2 (buka blokir anggaran) 2. Monitoring dan evaluasi hasil inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi April	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi renlak Mei	Mei	Target tercapai, seluruh sarana diperiksa dan dilaporkan sesuai ketentuan	open	IK9_DatdukApril
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65	Realisasi sampai Maret tercapai 100%, dimana sebanyak 11 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dari target 107 sarana Target pemeriksaan TW I merupakan target efisiensi anggaran	22 sarana distribusi pangan yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu	1. Pemeriksaan sarana sesuai perencanaan 2. Monev ketua tim 3. Komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan	1. Adanya relaksasi anggaran, perlu penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan. 2. Monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman.	Mei	1. Renlak pemeriksaan penyesuaian buka blokir anggaran 2. Monev hasil pemeriksaan sampai April	1. Pemeriksaan sarana Mei sesuai renlak 2. Monev hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	Mei	Target sampai April tercapai, seluruh tahapan proses pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Open	IK10_DatdukApril





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum Rencana aksi yang belum selesai	Timeline			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.80	96.25	112.18	Realisasi hingga Maret 2025 tercapai 100%, dengan target 85.80%.	1. Realisasi iklan komoditi sediaan farmasi untuk produk suplemen kesehatan dari poin pencapaian jumlah iklan belum sesuai untuk bulan April, dimana target realisasi iklan suplemen kesehatan hanya 7 iklan yang diawasi dari target 14 iklan iklan suplemen kesehatan khususnya yang di media elektronik dan internet sangat jarang dan seringkali merupakan iklan yang sama yang yang ditayangkan di periode sebelumnya, sehingga tidak mungkin melaporkan iklan yang sama dalam 2 periode yang berbeda.	1. Pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Movev Ketua Tim 3. Komitmen dari petugas untuk melaksanakan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan	1. Komitmen dari petugas untuk melaksanakan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan 2. Koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) terkait iklan OBASK yang ada pada media penyiaran lokal	Mei-Juni 2025	1. Pengawasan iklan sesuai target bulan April sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Movev Ketua Tim 3. Komitmen dari petugas untuk melaksanakan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan	1. Melaksanakan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat (produk Suplemen kesehatan) 2. Koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) terkait iklan OBASK yang ada pada media penyiaran lokal	Mei 2025	Capaian melebihi target	Open	IK11_DatdukApril
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	25	25	100	Pada TW I telah dilakukan pemeriksaan 1 sarana fortifikasi garam	1 sarana produksi yang diperiksa dan telah dilaporkan melalui SIPT ke pusat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana dilakukan sesuai perencanaan	Pemeriksaan 1 sarana produksi fortifikasi bulan Mei / Juni	Mei-Juni		Koordinasi dengan pelaku usaha untuk menghindari sarana tutup ataupun tidak produksi saat akan diperiksa agar pemeriksaan lebih efektif	Mei - Juni	Target masih tercapai sesuai perencanaan	Open	IK12_DatdukApril
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.00	72.2	101.69	Capaian SKL pada TW 1, meliputi: 1. Ruang Lingkup (83.3) 2. Peralatan (80.3) 3. Kompetensi (50) 4. Verifikasi MA (44.14) Hasil Akhir (72.2) dari target (71.0) Realisasi (101.6)	1. Perencanaan reagensia, Baku Pembanding, suku cadang dan pelaksanaan verifikasi MA di setiap Lab sesuai perencanaan 2. Adanya Pelatihan Internal untuk petugas. 3. Pengusulan Kalibrasi alat	1. Pengujian dalam rangka penambahan ruang lingkup 2. Verifikasi Metoda Analisa 3. Pengadaan Alat Lab 2025 4. Pelatihan internal Lab	Pada Tahun 2025 terjadi perubahan penilaian terhadap SKL menjadi 4 komponen Yaitu : - Ruang Lingkup (50%) - Peralatan (20%) - Kompetensi (20%) - Verifikasi Metoda Analisa (10%) = (44.4%) Rekomendasi - Perlu adanya revisi Anggaran untuk pengadaan sampel ruang lingkup komoditi Obat untuk penambahan RL diluar pengadaan sampel rutin - Perbaikan alat di Lab Kimia dan Mikrobiologi dan perbaikan epoksi di ruang mikrobiologi - Pengadaan Baku pembading - Pengadaan suku cadang - Kalibrasi internal dan Eksternal - Pengadaan alat gelas - Pelatihan Lab Kimia dan Mikro	Apr-Juni 2025	1. Kalibrasi internal dari P3OMN 2. Perbaikan alat / HPLC di Lab Obat (pengadaan Pompa) Perbaikan dan Kalibrasi GCMS oleh Vendor 3. Pelatihan internal Lab OBASKK dan Lab Mikrobiologi	1. Usulan Pengadaan suku cadang, Usulan. Pengadaan alat gelas. Kalibrasi Eksternal 4. Usulan Pengadaan sampel ruang lingkup komoditi obat 5. Perbaikan alat di lab kimia dan Pangan 6. Pelatihan di Lab Kimia dan Mikrobiologi	Jan - Des 2025	- Usulan Pengadaan suku cadang, alat gelas dalam proses pengadaan (inden) - Kalibrasi internal oleh P3OMN telah terlaksana Pelatihan internal lab Mikro, OT telah terlaksana	Open	IK13_DatdukApril
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	95.96	110.89	Nilai efektivitas KIE rata-rata pada Triwulan I adalah 95.96 dengan target 86,54, terdiri atas: 1. KIE tatap muka sebesar 91,92 (Sangat Efektif). 2. KIE melalui media sebesar 100 (Sangat Efektif).	1. Komitmen dan kerjasama antar petugas yang cukup baik 2. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor dan pemerintah daerah 3. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI 4. Pemahaman peserta KIE terhadap beberapa materi yang disampaikan pada saat KIE tatap muka bervariasi.	1. Materi yang disampaikan menarik dan mudah dipahami. 2. Narasumber yang kompeten dan komunikatif. 3. Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta. 4. Adanya inovasi Sanger Ureung Aceh dan Podcast Berbisik BPOM Aceh 5. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI.	1. Melaksanakan KIE sesuai pedoman yang ditetapkan 2. Melakukan pelaporan sesuai timeline 3. Menyampaikan KIE tatap muka dengan materi yang fokus pada satu komoditi.	Mei 2025	1. Melaksanakan KIE rutin dan KIE stunting sesuai pedoman 2. Melaksanakan inovasi Sanger Ureung Aceh dan inovasi Janet Podcast Berbisik BPOM Aceh bulan April 2025 3. Berkoordinasi dengan Dinkes Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan KIE stunting 4. Melaporkan kegiatan KIE sesuai timeline	1. Menyampaikan KIE tatap muka dengan materi yang fokus pada satu komoditi. 2. Melaksanakan KIE tatap muka dengan anggaran/sharing anggaran dari pihak luar	Juni 2025	Akan mempertahankan capaian yang melampaui target dengan memperluas kegiatan KIE tatap muka	Open	IK14_DatdukApril





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum selesai	Timeline			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	40.00	25.00	62.50	Sampai dengan akhir Maret 2025, Kegiatan Sapa Sekolah belum terealisasi karena perubahan anggaran/efisiensi anggaran. BPOM Pusat memberikan kesempatan kepada UPT untuk memulai kegiatan Sapa Sekolah pada bulan April 2025.	Target awal masih dihitung sebagai capaian realisasi sementara pelaksanaan program sekolah sampai dengan triwulan ini sesuai progres tahapan efisiensi, tahapan awal baru dilaksanakan pada bulan April sehingga tahapan selanjutnya baru bisa dilaksanakan pada Bulan Mei	1. Pelaksanaan Advokasi Lintas sektor program SAPA Sekolah tanggal 30 April 2025. 2. Sosialisasi Keamanan Pangan (Batch I) tertunda, akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2025.	1. Melaksanakan sosialisasi keamanan pangan 2. Bimtek keamanan pangan kader sekolah.	Mei 2025	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025	1. Sosialisasi Keamanan Pangan (Batch I) 2. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah	Mei 2025	Target Bulan April tidak tercapai dikarenakan perubahan anggaran dan timeline kegiatan Pro PN dari BPOM Pusat.	Open	IK15_DatdukApril
		16. Jumlah desa pangan aman	25.00	25.00	100.00	Sampai akhir Maret, Program Desa Pangan Aman belum terealisasi dikarenakan perubahan anggaran/efisiensi dan dimulai pada Bulan April 2025	Pelaksanaan Advokasi Kelembagaan Desa sesuai timeline dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 sehingga progres sampai dengan Bulan April mencapai 25 %	Kolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersinergi dengan program Desa Pangan Aman dan terwujud dengan penandatanganan komitmen bersama Walikota Banda Aceh	1. Melaksanakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa 2. Bimtek Komunitas Desa	Juni 2025	Advokasi Kelembagaan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025	1. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa 2. Bimtek Komunitas Desa	Juni 2025	Mencapai target	Open	IK16_DatdukApril
		17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25.00	25.00	100.00	Pelaksanaan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas (PABK) mengikuti progres tahapan efisiensi, dimana tahapan awal baru dilaksanakan pada bulan April sehingga tahapan selanjutnya baru bisa dilaksanakan pada Bulan Mei	Pelaksanaan Advokasi Pasar sesuai timeline dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 sehingga progres sampai dengan Bulan April mencapai 25 %	Kolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersinergi dengan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dan terwujud dengan penandatanganan komitmen bersama Walikota Banda Aceh	1. Melaksanakan Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar 2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar 3. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas pasar	Juni 2025	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025	1. Pelaksanaan Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar 2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar 3. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas pasar	Juni 2025	Mencapai target	Open	IK17_DatdukApril
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	28.00	25.00	89.29	Penetapan target UMKM yang didampingi telah diselesaikan. Bimtek UMKM akan dilaksanakan di Bulan April.	Kegiatan pendampingan UMKM terkena efisiensi anggaran.	Bimtek CPOTB, CPKB dan CPPOB tidak terlaksana sesuai perencanaan awal.	Pelaksanaan Bimtek CPKB dan CPOTB untuk pelaku UMKM dilaksanakan secara daring pada Bulan April. Bimtek CPPOB tidak dimungkinkan dilakukan secara daring karena jumlah peserta cukup banyak, akan dilaksanakan dengan sharing anggaran dengan OTA.	Mei 2025	1. Bimtek OBA dan Kos di April 2025 secara daring. 2. Kegiatan pendampingan melalui komunikasi via wa dan telp aktif dua arah dengan peserta UMKM yang didampingi	Bimtek CPPOB dilaksanakan dengan sharing anggaran dengan OTA.	Mei 2025	Persiapan pelaksanaan bimtek di 14-16 Mei, berkoordinasi dengan pusat terkait peserta bimtek sinergis OTA	Close	IK18_DatdukApril
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	22.00	22.00	100.00	Perkara yang diproses sejak bulan Maret 2025 selanjutnya diproses pada bulan April dengan memeriksa seluruh saksi,tersangka serta ahli dan menyusun berkas perkara hingga diserahkan kepada Jaksa penelti	1. Seluruh proses penyidikan segera diselesaikan dengan memperhatikan deadline waktu. 2. Koordinasi yang intens dengan korwas 3. Koordinasi yang baik dengan Kejati	1. Gelar Kasus yang dilakukan serta di dokumentasikan dengan baik 2. Kegiatan Operasi penindakan yang direncanakan dengan baik 3. Adanya Intensifikasi Penindakan yang menetapkan tahapan pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu pendorong penyelesaian berkas	1. Koordinasi dengan Kejati untuk mendapatkan status P-21 terhadap berkas perkara 2. Merencanakan dan melaksanakan Operasi Investigasi berdasarkan informasi dari Siber, Inspeksi dan Pengaduan Masyarakat 3. Merencanakan dan melaksanakan Operasi Penindakan terhadap target yang telah ditetapkan	Mei-Juni 2025	1. Kegiatan Intelijen di dalam dan luar kota pada bulan April 2. Penyelesaian pemberkas (Tahap I) perkara hasil Operasi penindakan bulan Maret pada bulan April 4. Melaporkan hasil intensifikasi penindakan pada bulan April	1. Kegiatan Intelijen di dalam dan luar kota pada bulan Mei-Desember 2025 2. Melaporkan hasil Kegiatan Operasi Pangea pada bulan Mei 3. Operasi penindakan pada bulan Mei, TW III dan TW IV tahun 2025 4. P21 perkara hasil Operasi penindakan bulan Maret pada bulan Mei 5. Tahap II perkara hasil Operasi penindakan bulan Maret pada bulan Mei atau Juni 6. proses penindakan dan penyidikan pada bulan Mei, TW III dan TW IV.	1. Mei - Desember 2025 2. tanggal 23 Mei 2025 3. Mei, TW III dan TW IV tahun 2025 4. Mei 2025 5. Mei atau Juni 2025 6. Mei, TW III dan TW IV	1. Perkara temuan bulan Maret 2025 telah tahap I 2. Intensifikasi Penindakan telah dilaporkan 3. Operasi Siber dan Profiling bulan Januari sd April telah diselesaikan seluruhnya 4. Kegiatan investigasi bulan Januari sd April telah dilaporkan segera sebelum batas waktu	Open	IK19_DatdukApril





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum Rencana aksi yang belum selesai	Timeline			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	Kegiatan Operasi Siber dan kegiatan Profiling terus dilakukan oleh setiap petugas sesuai dengan target dan diselesaikan sesuai deadline yang telah ditetapkan.	Para petugs secara rutin melakukan operasi siber dan profiling dan menjaga deadline penyelesaiannya	1. Menepakati jumlah target dan deadline penyelesaian Operasi Siber dan Profiling. 2. Membuat reminder batas waktu operasi	1. Melakukan operasi siber dan profiling secara rutin sebelum batas waktunya. 2. Mengisi secara benar dan lengkap data hasil Operasi Siber dan Profiling.	Mei 2025	1. Pelaporan Operasi Siber dan Profiling bulan April 2025	1. Pelaporan operasi siber dan profiling bulan Mei-Desember 2025 2. Pelaporan hasil investigasi bulan Mei-Desember 2025 3. Penggalangan pada bulan Mei 2025 4. Tindak lanjut Rekomendasi dari Direktorat Cekal 5. Analisa Kejahatan Obat dan Makanan di Aceh	1. Mei 2025-Desember 2025 2. Mei -Desember 2025 3. 28 Mei 2025 4. TW IV 2025 5. TW IV 2025	1. Pelaporan Operasi Siber dan Profiling bulan Januari-April 2025 telah dilaporkan tepat waktu 2. Pelaporan investigasi bulan Januari-April 2025 telah dilaporkan tepat waktu	Open	IK20_DatdukApril
8	Layanan Publik UPT yang prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	Akhir Tahun													
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													
		23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													
		24. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													
		25. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													

Matriks RATL s.d Bulan Mei 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum Rencana aksi yang belum selesai	Timeline			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75	99.25	117.11	Realisasi sampai dengan April 2025 sebesar 99.7 %	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak terbaru (buka blokir). 2. Sampel dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling secara konsisten. 3. Terjadi peningkatan realisasi ketepatan waktu pelaporan SIPT dibandingkan bulan sebelumnya.	1. Sampling dilakukan sesuai renlak yang disusun 2. Koordinasi yang efektif antara ketua tim inspeksi dengan ketua tim pengujian terkait sampling baik di lingkungan Balai Besar POM Banda Aceh, regional Medan dan Lab Pengujian Produk Biologi P3OMN	1. Secara konsisten melakukan sampling dan pengujian sediaan farmasi sesuai dengan renlak terbaru (buka blokir), pedoman sampling dan DO IKU 2. Membuat usulan perencanaan kebutuhan suku cadang dan reagen yang belum terealisasi di bulan Mei, agar pengujian pada bulan berikutnya tidak terkendala.	Juni	1. Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai renlak dan melakukan pemeriksaan produk sediaan farmasi sesuai ketentuan 2. Koordinasi terkait sampling sediaan farmasi antara tim inspeksi dengan tim pengujian	1. Melaksanakan sampling bulan Juni sesuai dengan renlak terbaru (buka blokir) 2. Melakukan koordinasi dengan tim sampling terkait kemampuan uji laboratorium baik melalui WAG ataupun melalui update kemampuan uji di link yang tersedia pada lab. regional terkait pengujian sampel bulan Juni 3. Pengusulan pengadaan kepada PPK untuk pengujian bulan Mei 4. Mengusulkan pengadaan Kolom	Juni 2025		Open	IK1_DatdukMei
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Akhir Tahun													





		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	95.05	111.82	Sampai Bulan April, realisasi sebesar 96.60% dari target 85%	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak 2. Sampel dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling secara konsisten. 3. Terjadi penurunan realisasi ketepatan waktu pelaporan SIPT dibandingkan bulan sebelumnya karena data yang diambil per tanggal 3 Juni sementara timeline Pelaporan SIPT tanggal 15 Juni.	1. Sampling dilakukan sesuai renlak terbaru (buka Blokir) 2. Koordinasi sampling antara Tim Laboratorium dan Tim Inspeksi Pangan berjalan efektif. 3. Monev Ketua tim terkait Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, dan Pelaporan SIPT	1. Melaksanakan sampling sesuai renlak 2. Melaksanakan Pengujian sesuai Pedoman sampling 3. Melakukan Pelaporan SIPT sesuai timeline	Juni	1. Pelaksanaan Sampling Mei 2. Renlak sampling bulan Juni 3. Koordinasi tim inspeksi dan pengujian	1. Melakukan sampling sesuai perencanaan untuk bulan selanjutnya 2. Melaksanakan koordinasi bidang inspeksi dan pengujian 3. Melakukan koordinasi dengan Lab regional 4. Melakukan Monev hasil pelaporan SIPT	Juni		Open	IK3_DatdukMei
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0.00	Tidak ada sampel KLB yang diterima Hingga Mei			Melakukan sosialisasi di media sosial terkait penanganan KLB	Agustus		1. Membuat video penanganan sampel KLB. 2. Membuat jejaring dengan SPPI BGN.	Agustus		Open	IK4_DatdukMei
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	88.57	104.20	Realisasi April sebesar 88,18% dari target 85%,	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak 2. Sampel dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling secara konsisten. 3. Terjadi penurunan realisasi ketepatan waktu pelaporan SIPT dibandingkan bulan sebelumnya karena data yang diambil per tanggal 3 Juni sementara timeline Pelaporan SIPT tanggal 15 Juni.	1. Sampling dilakukan sesuai renlak terbaru (buka Blokir) 2. Koordinasi sampling antara Tim Laboratorium dan Tim Inspeksi Pangan berjalan efektif. 3. Monev Ketua tim terkait Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, dan Pelaporan SIPT	1. Percepatan pelaksanaan penyelesaian seluruh sampel PIRT 2. Monev hasil pengujian sampel PIRT	Juni	1. Menyusun renlak sampling PIRT sesuai dengan relaksasi anggaran. 2. Pelaksanaan sampling sampel PIRT	1. Melakukan Koordinasi pemeriksaan dan pengujian terkait capaian indikator 2. Melaksanakan Monev waktu pelaporan pengujian 3. Monev hasil pengujian dan menindaklanjuti hasil uji TMS	Juni		Open	IK5_DatdukMei

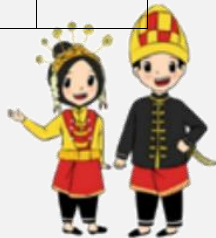
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belu Rencana aksi yang belum selesai	Timeline			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	77.00	74.64	96.94	Realisasi sampai April 2025 telah melebihi target sebesar 104.75 %.	1. Capaian pada Mei 2025 terjadi penurunan, dimana capaian sebesar 96.94 %. Nilai yang belum maksimal berasal dari feedback dari lintas sektor (66.67%). 2. Kurangnya komitmen dan pemahaman pemangku kepentingan (lintas sektor dan pelaku usaha/penanggungjawab dalam memberikan feedback CAPA) 3. Capaian belum sesuai target karena beberapa surat TL baru selesai dan disampaikan ke pelaku usaha/lintas sektor di akhir Mei 2025. Hal ini disebabkan pendalaman dan penelusuran lebih lanjut untuk menentukan Tindak Lanjut yang sesuai.	1. Menghubungi dan mendatangi sarana yang akan diberikan surat tindak lanjut secara intensif. 2. Memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi Whatsapp dan telepon maupun tatap mukalangsung ke kantor. 3. Intensif menghubungi instansi terkait baik kepada pimpinan dan tim teknisnya. 4. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait. 5. Penyelesaian CAPA Closed di tempat untuk saran distribusi OBAS, Kosmetik dan pangan	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait untuk melakukan perbaikan/ CAPA 2. Melakukan upaya maksimal dan menjaga komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari pemangku kepentingan. 3. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh pemangku kepentingan melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh	Juni 2025	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait untuk melakukan perbaikan/ CAPA 2. Melakukan upaya maksimal dan menjaga komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari pemangku kepentingan. 3. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh pemangku kepentingan melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh	Melakukan koordinasi lintas sektor serta bimbingan terkait penyelesaian CAPA dan akan dilakukan berkesinambungan sampai akhir tahun	Juni 2025		Open	IK6_DatdukMei





		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	100	107.53	Realisasi pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi hingga akhir April adalah 100% dari target 93% (capaian 107,53%). 1. Sarana produksi sediaan farmasi di Propinsi Aceh hanya sarana produksi OBA dan kosmetik, dan adanya efisiensi anggaran pada TW I tahun 2025, terjadi perubahan target sarana produksi OBA-Kosmetik, pada TW 1 sarana produksi sediaan farmasi yang menjadi target pemeriksaan hanya sarana produksi kosmetik. 2. Pada tahun 2025 penilaian capaian kinerja berdasarkan penilaian mandiri terhadap proses tahapan proses kegiatan, sesuai dengan DO yang tercantum dalam manual IKU 2025	1. Adanya relaksasi anggaran pada TW II dan target pemeriksaan sarana produksi dikembalikan ke target awal tahun, akan dilakukan penyusunan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi. 2. Pemeriksaa sarana produksi OBA pada bulan Mei ditargetkan 2 sarana, tetapi pada saat pemeriksaan kedua tidak dapat diperiksa karena pemililk sarana tidak berada di tempat dan sarana yaang lainnya tidak bisa dihubungi. 3. Terpenuhinya realisasi pada sarana kosmetik sebesar 100%.	1. Pelaksanaan pemeriksaaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai perencanaan 2. Melaksanakan pemeriksaan sarana sediaan farmasi 3. Monev Ketua Tim.	Membuat renlak penyesuaian pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	Juni	1. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai perencanaan. 2. Monev Ketua Tim	Melaksanakan pemeriksaan sarana sediaan farmasi (OBA)	Juni		Open	IK7_DatdukMei
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65	Realisasi sampai bulan April yaitu 100% dari target 85%, dimana sebanyak 5 sarana yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana produksi hingga Mei sebanyak 7 sarana produksi MD dan 1 sarana PIRT yang seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai pedoman pengawasan produksi pangan olahan dengan hasil pemeriksaan 3 sarana tutup, 1 sarana MK dan 4 sarana TMK	1. Pemeriksaan sarana sesuai perencanaan 2. Melaksanakan Monev ketua tim 3. Adanya komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan	1. Melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. 2. Melakukan Monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman.	Juni	1. Melaksanakan pemeriksaan sarana bulan Mei 2. Melakukan Monev hasil pemeriksaan sampai Bulan Mei	1. Melaksanakan pemeriksaan untuk target bulan Juni 2. Melakukan Monev hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan di Bulan Juni	Juni		Open	IK8_DatdukMei
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.57	102.91	Capaian Bulan April sebesar 99.12% dari target 96.75%	1. Tercapainya semua komponen penilaian IKU yang ada pada DO untuk semua komoditi 2. Melakukan Monev pelaksanaan inspeksi distribusi sediaan farmasi, tindak lanjut hasil inspeksi dan pelaporan melalui SIPT	1. Pelaksanaan inspeksi sarana sesuai perencanaan setelah buka blokir anggaran 2. Monev ketua tim 3. Adanya komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan	1. Melaksanakan inspeksi sesuai renlak terbaru (buka blokir). 2. Memenuhi secara maksimal setiap komponen penilaian sesuai DO pada IKU	Juni	1. Renlak pemeriksaan sarana sediaan farmasi TW 2 (buka blokir anggaran) 2. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi Mei 2025	Melaksanakan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai renlak Bulan Juni	Juni		Open	IK9_DatdukMei
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65	Realisasi sampai April tercapai 100%, dimana sebanyak 22 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dari target 107 sarana	Sebanyak 30 sarana distribusi pangan yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu	1. Pemeriksaan sarana sesuai perencanaan 2. Melaksanakan Monev ketua tim 3. Adanya Komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan	1. Penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan. 2. Melakukan monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman.	Juni	1. Rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi 2. Melakukan monev hasil pemeriksaan sampai Bulan Mei	1. Melakukan pemeriksaan sarana pada Bulan Juni 2. Melaksanakan monev hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	Juni		Open	IK10_DatdukMei

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum Rencana aksi yang belum selesai	Timeline			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.80	102.06	118.95	Realisasi hingga April 2025 tercapai 96.25% (capaian persentase 112.18%)	Terdapat peningkatan realisasi jumlah iklan yang telah diawasi pada OBA dan Suplemen Kesehatan (melebihi target).	1. Pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Monev Ketua Tim 3. Pelaksanaan pengawasan iklan telah sesuai dengan komponen penilaian pada DO	Melakukan koordinasi dengan Komisi penyiaran daerah terkait iklan yang disiarkan di media penyiaran lokal	Juli	1. Pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Monev Ketua Tim 3. Pelaksanaan pengawasan iklan telah sesuai dengan komponen penilaian pada DO	Melakukan koordinasi dengan Komisi penyiaran daerah terkait iklan yang disiarkan di media penyiaran lokal	Juli		Open	IK11_DatdukMei
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	25	25	100	Sampai akhir April telah dilakukan pemeriksaan 1 sarana fortifikasi garam	1 sarana produksi yang diperiksa telah dilaporkan melalui SIPT ke pusat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana dilakukan sesuai perencanaan	Pemeriksaan 1 sarana produksi fortifikasi bulan Juni sesuai target	Juni		Koordinasi dengan pelaku usaha untuk menghindari sarana tutup ataupun tidak produksi saat akan diperiksa agar pemeriksaan lebih efektif	Juni		Open	IK12_DatdukMei





3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.00	72.2	101.69	Evaluasi capaian Triwulan Capaian masih menggunakan capaian TW 1 Ruang Lingkup 83.3 Peralatan 80.3 Kompetensi 50 Verifikasi MA 44.4 Hasil Akhir 72.2 dari target 71.0 (101.6) Data merupakan hasil monev berdasarkan verifikasi dari P3OMN per Triwulan hasil masih menggunakan data TW1	1. Perencanaan reagensia, Baku Pembanding, suku cadang dan pelaksanaan verifikasi MA di setiap Lab sesuai perencanaan 2. Adanya Pelatihan Internal untuk petugas. 3. Pengusulan Kalibrasi alat Kegagalan: 1. Verifikasi MA pangan menggunakan ELISA Reader sudah dilakukan namun tidak berhasil di parameter uji presisi. 2. Verifikasi MA di lab kosmetik belum dilakukan karena terkendala antrian alat. 3. Verifikasi MA di lab Obat belum berhasil karena masalah kolom. 4. Verifikasi MA di Lab OT belum berhasil karena terkendala alat rusak, consumable part tidak tersedia dan antrian alat	1. Pengujian dalam rangka penambahan ruang lingkup penarik dan mudah dipahami. 2. Verifikasi Metoda Analisa 3. Pengadaan Alat Lab 2025 4. Pelatihan internal Lab	1. Peningkatan anggaran perbaikan alat, Kalibrasi Eksternal, mengingat seringnya terjadi kerusakan pada alat / Instrument 2. Percepatan pengadaan reagensia, suku cadang, dan dll kebutuhan Lab sesuai dengan permintaan yang telah diajukan 3. Mengusulkan pelatihan internal di lab.	Mei s.d Des	1. Kalibrasi internal dari P3OMN 2. Perbaikan alat / HPLC di Lab Obat (pengadaan Pompa), perbaikan dan Kalibrasi GCMS oleh Vendor 3. Pelatihan internal Lab OBASKK dan Lab Mikrobiologi	1. Mengusulkan pengadaan suku cadang, alat gelas dan Kalibrasi Eksternal 2. Mengusulkan pengadaan sampel ruang lingkup komoditi obat 3. Perbaikan alat di lab kimia dan Pangan 4. Mengusulkan pelatihan di Lab Kimia dan Mikrobiologi	Juni - Des 2025		Open	JK13_DatdukMei
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	95.96	110.89	Nilai efektivitas KIE rata-rata pada Triwulan I adalah 95.96 dengan target 86,54, terdiri atas: 1. KIE tatap muka sebesar 91,92 (Sangat Efektif). 2. KIE melalui media sebesar 100 (Sangat Efektif).	1. Komitmen dan kerjasama antar petugas yang cukup baik 2. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor dan pemerintah daerah 3. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI 4. Pemahaman peserta KIE terhadap beberapa materi yang disampaikan pada saat KIE tatap muka bervariasi.	1. Materi yang disampaikan menarik dan mudah dipahami. 2. Narasumber yang kompeten dan komunikatif. 3. Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta. 4. Adanya inovasi Sanger Ureung Aceh dan Podcast Berbisik BPOM Aceh 5. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI.	1. Melaksanakan KIE sesuai pedoman yang ditetapkan 2. Melakukan pelaporan sesuai timeline 3. Menyampaikan KIE tatap muka dengan materi yang fokus pada satu komoditi.	Juni 2025	1. Melaksanakan KIE rutin dan KIE stunting sesuai pedoman 2. Melaksanakan inovasi Sanger Ureung Aceh dan inovasi Janet Podcast Berbisik BPOM Aceh bulan Mei 2025 3. Berkoordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan KIE 4. Melaporkan kegiatan KIE sesuai timeline	1. Menyampaikan KIE tatap muka dengan materi yang fokus pada satu komoditi. 2. Melaksanakan KIE tatap muka dengan anggaran/sharing anggaran dari pihak luar	Juni 2025		Open	JK14_DatdukMei
		15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	50.00	70.00	140.00	Target mengacu pembobotan awal sebelum efisiensi yang dimulai sejak Februari dan berlanjut ketahapan berikutnya sampai bulan Maret dengan pembobotan 40 % sementara pelaksanaan tahapan sekolah sampai dengan bulan April hanya 25 %.	Melaksanakan 2 tahapan sekaligus yaitu, sosialisasi keamanan pangan dan bimbingan teknis kader keamanan pangan	Melibatkan Dinas Pendidikan dan DP3AKB dalam pengawasan pembudayaan keamanan pangan pada sekolah binaan ramah anak dan sekolah adiwiyata	Melaksanakan program Sekolah sinergi dengan lintas sektor terkait yang berisikan dengan program Desa dan Pasar	Juni s.d November 2025	1. Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 2. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 3. Bimbingan Teknis Kader KP Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025	Monitoring dan pengawalan sekolah	Juli s.d November 2025		Pelaporan kegiatan sekolah dikirim terpusat melalui SAPA Sekolah 2025 pada https://linkktr.ee/PIAS2025	JK15_DatdukMei
		16. Jumlah desa pangan aman	25.00	50.00	200.00	Realisasi sampai akhir April sebesar 25% dengan target 25%. Target mengacu pembobotan tiap tahapan yang disesuaikan dengan timeline pelaksanaan batch 1 dan diupayakan terlaksana sesuai tahapan yang ditentukan	Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan Desa mengikuti Surat Edaran Nomor : PM. 02.01.5.05.25.09 Tahun 2025 meliputi ; 1. Pelaksanaan Advokasi Kelembagaan Desa 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan	Melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, BKKBN, DP3AKB dan Tim penurunan stunting	Melaksanakan program Desa sinergi dengan lintas sektor terkait yang berisikan dengan program Sekolah dan Pasar	Mei s.d November 2025	1. Advokasi Kelembagaan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025	Melakukan Bimtek Komunitas	Juni 2025		Pelaporan kegiatan telah dilaporkan terpusat pada link gkpd.pom.go.id	JK16_DatdukMei
		17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	50.00	50.00	100.00	Realisasi sampai akhir April sebesar 25% dengan target 25%. Target mengacu pembobotan tiap tahapan yang disesuaikan dengan timeline pelaksanaan batch 1 dan diupayakan terlaksana sesuai tahapan yang ditentukan	Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan Pasar mengikuti Surat Edaran Nomor : PM. 02.01.5.05.25.09 Tahun 2025 meliputi ; 1. Pelaksanaan Forum Advokasi Komitmen Pemda 2. Bimtek dan Penyuluhan Pasar	Melibatkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan UPTD Pasar dalam rangka pengawalan keamanan pangan pasar	Melaksanakan program Pasar sinergi dengan lintas sektor terkait yang berisikan dengan program Sekolah dan Desa	Mei s.d Juli 2025	1. Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025	1. Melakukan sosialisasi kemandirian pangan oleh komunitas pasar. 2. Melakukan pengawasan keamanan pangan di pasar. 3. Melakukan pengawalan PPABK.	Juni 2025	Selesai pelaksanaan tahapan Pasar batch 1	Pelaporan kegiatan telah dilaporkan terpusat pada link sipaman.go.id	JK17_DatdukMei





5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	38.00	41.67	109.66	Bimtek CPKB dan CPOTB telah dilaksanakan di April secara daring. Bimtek CPPOB akan dilaksanakan di Mei secara luring	1. Pelaku usaha OBA dan Kos hanya sedikit sehingga memungkinkan pelaksanaan bimtek dilaksanakan secara daring, dampak dari efisiensi anggaran. 2. Pelaksanaan Bimtek CPPOB awalnya di Bulan April mundur ke Bulan Mei mengikuti program sharing OTA dari pusat sehingga persentase tahapan kegiatan meningkat.	Koordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha untuk dapat berkomiten mengikuti bimtek CPKB dan CPOTB secara daring dengan baik.	Melakukan fasilitasi pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha pangan, oba dan kos.	Juni-Oktober 2025	Bimtek CPPOB secara luring dengan sharing anggaran dengan OTA	Melakukan fasilitasi pendampingan kepada pelaku usaha	Juni-Oktober 2025		closed	JK18DatdukMei_C PPOB
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	31.00	31.00	100.00	1. Perkara temuan bulan Maret 2025 telah tahap I 2. Intensifikasi Penindakan telah dilaporkan 3. Kegiatan investigasi bulan Januari sd April telah dilaporkan segera sebelum batas waktu	1. Seluruh proses penyidikan diselesaikan dengan memperhatikan deadline waktu. 2. Melakukan koordinasi yang intens dengan Korwas dan Kejati 3. Adanya Sistem Reminder untuk batas waktu pelaporan	1. Penyusunan Rencana kegiatan penyelesaian pemberkasan 2. Adanya Intensifikasi Penindakan yang menetapkan tahapan pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu pendorong penyelesaian pelaporan	1. Koordinasi dengan Kejati untuk mendapatkan status P-21 hingga tahap 2 terhadap berkas perkara 2. Merencanakan dan melaksanakan Operasi Investigasi berdasarkan informasi dari Siber, Inspeksi dan Pengaduan Masyarakat dan segera melaporkannya. 3. Merencanakan dan melaksanakan Operasi Penindakan terhadap target yang telah ditetapkan	Mei-Juni 2025	1. Kegiatan Intelijen di dalam dan luar kota pada bulan Mei 2. Penyelesaian pemberkasan (Tahap 2) perkara hasil Operasi penindakan bulan Maret pada bulan Mei 2025 3. Melakukan operasi Pangea dan melaporkannya 4. Melakukan kegiatan penindakan terhadap tindakan kejahatan Obat berdasarkan info dari Dir Intelijen BPOM RI	1. Kegiatan Intelijen di dalam dan luar kota pada bulan Juni-Desember 2025 2. Operasi penindakan dan penyidikan pada TW III dan TW IV tahun 2025 3. Penyelesaian berkas perkara yang ditemukan pada bulan Mei di Bireuen. 4. Kegiatan penggalangan kerawanan OOT pada bulan Juli 2025	1. Juni - Desember 2025 2. Juli sd Desember 2025 3. Mei sd Juni 2025 4. Juli 2025		Open	JK19_DatdukMei
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	1. Kegiatan Operasi Siber dan kegiatan Profiling terus dilakukan oleh setiap petugas sesuai dengan target dan diselesaikan sesuai deadline yang telah ditetapkan. 2. Laporan kerawanan secara rutin terus dilakukan setiap bulan dan dilaporkan sesuai dengan target waktunya.	Para petugs secara rutin melakukan operasi siber dan profiling serta laporan kerawanan dan menjaga deadline penyelesaiannya	1. Menyepakati jumlah target dan deadline penyelesaian Operasi Siber dan Profiling. 2. Membuat reminder batas waktu operasi	1. Melakukan operasi siber dan profiling secara rutin sebelum batas waktunya. 2. Mengisi secara benar dan lengkap data hasil Operasi Siber dan Profiling. 3. Mengisi dengan benar dan lengkap data kerawanan yang ada dan dilaporkan tepat waktu	5 Mei 2025	1. Pelaporan Operasi Siber dan Profiling bulan Mei 2025 2. Pelaporan kerawanan bulan Mei 2025	1. Pelaporan operasi siber dan profiling bulan Juni-Desember 2025 2. Pelaporan kerawanan bulan Juni-Desember 2025 3. Penggalangan pada bulan Juli 2025 4. Melaksanakan tindak lanjut Rekomendasi dari Direktorat Cekal 5. Melakukan analisa Kejahatan Obat dan Makanan di Aceh	1. Juni 2025- Desember 2025 2. Juni -Desember 2025 3. Juli 2025 4. TW IV 2025 5. TW IV 2025		Open	JK20_DatdukMei
8	Layanan Publik UPT yang prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	Akhir Tahun													
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22. Nilai Pembangunan Zi Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													
		23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													
		24. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													
		25. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													





Matriks RATL s.d Bulan Juni 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum				
												Rencana aksi yang belum selesai	Timeline			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75	94.67	111.71	1. Realisasi pada akhir Mei sebesar 99,25 % dari target 84,75 % 2. Telah dilakukan sampling sesuai renlak terbaru	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak 2. Sampel dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling secara konsisten	1. Sampling dilakukan sesuai perencanaan dan DO renlak dan DO 2. Mengajukan perubahan komposisi target sampling sarana tidak berizin kepada unit pengampu 3. Koordinasi yang efektif antara ketua tim inspeksi dengan ketua tim pengujian terkait sampling baik di lingkungan Balai Besar POM Banda Aceh, regional Medan dan Lab Pengujian Produk Biologi P3OMN	1. Melaksanakan sampling sesuai renlak dan DO 2. Melaksanakan Pengujian sesuai Pedoman sampling 3. Melakukan Pelaporan SIPT sesuai timeline	Juli	1. Pelaksanaan Sampling Juni 2. Revisi renlak sampling bulan Juli 3. Koordinasi tim sampling dan pengujian 4. Pengusulan pengadaan kepada PPK untuk pengujian bulan Mei	1. Melakukan sampling sesuai perencanaan untuk bulan selanjutnya 2. Melaksanakan koordinasi antara inspeksi dan pengujian 3. Melakukan koordinasi dengan Lab regional 4. Melakukan Monev hasil pelaporan SIPT 5. Permintaan kolom dari lab kosmetik dan OBA SKK dalam proses pengadaan	1. Juli 2025 2. Juli 2025 3. Juli 2025 4. Juli 2025 5. Agustus 2025		Open	IK1_Datdukluni
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Akhir Tahun													
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	93.33	109.80	Sampai Bulan Mei, realisasi sebesar 95,05% dari target 85%, sudah dilakukan percepatan sampling menyesuaikan kondisi laboratorium	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak 2. Sampel dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling secara konsisten. 3. Terjadi penurunan realisasi ketepatan waktu pelaporan SIPT dibandingkan bulan sebelumnya karena data yang diambil per tanggal 3 Juni sementara timeline Pelaporan SIPT tanggal 15 Juni.	1. Sampling dilakukan sesuai renlak 2. Koordinasi sampling antara Tim Laboratorium dan Tim Inspeksi Pangan berjalan efektif. 3. Monev Ketua tim terkait Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, dan Pelaporan SIPT	1. Melaksanakan sampling sesuai renlak 2. Melaksanakan Pengujian sesuai Pedoman sampling 3. Melakukan Pelaporan SIPT sesuai timeline	Juli	1. Pelaksanaan Sampling Juni 2. Renlak sampling bulan Juli 3. Koordinasi tim inspeksi dan pengujian dalam rangka melaksanakan pengujian dan pelaporan SIPT 4. Melakukan koordinasi dengan lab regional	1. Melakukan sampling sesuai perencanaan untuk bulan selanjutnya 2. Melaksanakan koordinasi bidang inspeksi dan pengujian 3. Melakukan koordinasi dengan Lab regional 4. Melakukan Monev hasil pelaporan SIPT	Juli	Open	IK3_Datdukluni	
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100.00	Pada tanggal 18 Juni terdapat 3 sampel KLB KP dari Aceh Besar dan sudah dilakukan pengujian sesuai standar	Sampel KLB yang diterima 4 hari setelah tanggal kejadian (kejadian tanggal 14 Juni, sampel diterima Laboratorium tanggal 18 Juni) dalam keadaan tidak aseptis sehingga hasil uji tidak representatif dengan kejadian KLB.		Melakukan sosialisasi di media sosial terkait penanganan KLB	Agustus		1. Membuat video penanganan sampel KLB. 2. Membuat jejaring dengan SPPI BGN.	Agustus	Open	IK4_Datdukluni	
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.50	102.94	Realisasi sampai Mei sebesar 88.57%, sebanyak 28 sampel telah disampling dan diuji di laboratorium dan target masih tercapai.	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak buka blokir 2. Sampel dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling secara konsisten. 3. Terjadi penurunan realisasi ketepatan waktu sampling berdasarkan evaluasi pusat, karena seluruh sampel PIRT sebanyak 28 sampel wajib disampling TW I, sedangkan realisasi TW I sebanyak 11 sampel dampak efisiensi. 4. Terjadi penurunan realisasi ketepatan waktu pelaporan SIPT dibandingkan bulan sebelumnya karena data yang diambil per tanggal 3 Juni sementara timeline Pelaporan SIPT tanggal 15 Juni.	1. Sampling dilakukan sesuai renlak terbaru (buka Blokir) 2. Koordinasi sampling antara Tim Laboratorium dan Tim Inspeksi Pangan berjalan efektif. 3. Monev Ketua tim terkait Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, dan Pelaporan SIPT	Melakukan monev hasil pengujian dan menindaklanjuti hasil uji TMS	Juli	1. Melakukan Koordinasi pemeriksaan dan pengujian terkait capaian indikator 2. Melaksanakan Monev waktu pelaporan pengujian 3. Monev hasil pengujian dan menindaklanjuti hasil uji TMS	1. Melakukan Koordinasi pemeriksaan dan pengujian terkait capaian indikator bulan selanjutnya 2. Melaksanakan Monev waktu pelaporan pengujian 3. Monev hasil pengujian dan menindaklanjuti hasil uji TMS	Juli	Open	IK5_Datdukluni	
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78.00	80.63	103.37	Capaian realisasi pada bulan Mei sebesar 74.64 % dari target 77 % (persentase capaian 96.94%). Dari kedua aspek penilaian, nilai yang belum mencapai target berasal dari feedback dari lintas sektor (66.67%).	1. Penyelesaian CAPA yang membutuhkan waktu lama dari pemangku kepentingan (lintas sektor/pelaku usaha) 2. Kurangnya komitmen dan pemahaman pemangku kepentingan (Lintas sektor/pelaku usaha dan penanggungjawab) dalam kewajiban membuat CAPA	1. Menghubungi sarana yang diberikan surat tindak lanjut secara intensif melalui WA/Telp 2. Memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi Whatsapp, telepon dan tatap muka langsung ke kantor. 3. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait tentang pentingnya memberikan feedback terhadap hasil pemeriksaan 2. Melakukan upaya maksimal dan komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari stakeholder. 3. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh stakeholder melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh	Juli	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait tentang pentingnya memberikan feedback terhadap hasil pemeriksaan 2. Melakukan upaya maksimal dan komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari stakeholder. 3. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh stakeholder melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh	Rencana aksi tetap dilakukan berkesinambungan sampai akhir tahun	Juli	Open	IK6_Datdukluni	
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	100	107.53	Realisasi pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi hingga akhir Mei adalah 100% dari target 93% (capaian 107,53%).	1. Melakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi hingga akhir Mei sebanyak 5 sarana (2 sarana produksi Kosmetik dan 3 sarana produksi obat bahan alam). 2. Kesulitan dalam pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam, sarana sedang tidak berproduksi dan pemilik sarana tidak berada di tempat.	Membuat janji dengan pemilik sarana untuk mengadakan pemeriksaan sarana produksi	Melakukan koordinasi dengan tim sertifikasi untuk pendataan sarana produksi sediaan farmasi yang aktif dan tidak aktif	Juli	Melakukan pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam	1. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi TW III 2. Melakukan pendataan sarana produksi sediaan farmasi (OBA-Kosmetik) yang masih aktif dan tidak aktif	Juli	Open	IK7_Datdukluni	
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65	Sampai akhir Mei, realisasi sebesar 100% dengan sarana yang diperiksa sebanyak 8 sarana dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana produksi hingga Juni sebanyak 10 sarana produksi MD dan 1 sarana PIRT yang seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai pedoman pengawasan produksi pangan olahan dengan hasil pemeriksaan 3 sarana tutup, 4 sarana MK dan 4 sarana TMK	1. Pemeriksaan sarana sesuai perencanaan 2. Monev ketua tim 3. Adanya komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan tepat waktu	1. Melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. 2. Melakukan Monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman.	Juli	1. Melaksanakan pemeriksaan sarana bulan Juni 2. Melakukan Monev hasil pemeriksaan sampai Bulan Juni	1. Melaksanakan pemeriksaan untuk target bulan Juli (TW III) 2. Melakukan Monev hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan di Bulan Juli	Juli	Open	IK8_Datdukluni	
Progres Rencana Aksi																





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
												Rencana aksi yang belum selesai	Timeline			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.72	103.07	Realisasi sampai Bulan Mei adalah 99.57 %, telah mencapai target, namun masih perlu ditingkatkan akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi pada sarana distribusi kosmetik	1. Tercapainya semua komponen penilaian IKU yang ada pada DO untuk semua komoditi yang diawasi 2. Melakukan Monev pelaksanaan inspeksi distribusi sediaan farmasi, kesesuaian tindak lanjut hasil inspeksi dan pelaporan melalui SIPT	1. Pelaksanaan inspeksi sarana sesuai renlak 2. Melakukan koordinasi dengan unit pengampu (inspeksi obat melakukan zoom meeting dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya 3. Melaksanakan monev ketua tim 4. Pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan melalui SIPT sesuai DO	1. Pelaksanaan inspeksi sarana sesuai renlak 2. Koordinasi dengan unit pengampu (inspeksi obat melakukan zoom meeting dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya 3. Monev ketua tim 4. Pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan melalui SIPT sesuai DO	Juli	1. Pelaksanaan inspeksi sarana sesuai renlak 2. Monev ketua tim 3. Pelaksanaan pemeriksaan, penyelesaian tindak lanjut dan pelaporan melalui SIPT sesuai DO	1. Rencana aksi terus dilakukan secara berkesinambungan 2. Koordinasi dengan unit pengampu (inspeksi obat melakukan zoom meeting dengan Ditwasdisyanfar dan Biro Hukori) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya	Juli		Open	IK9_DatdukJuni
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65	Realisasi sampai Mei tercapai 100%, dimana sebanyak 30 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dari target 107 sarana dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampai Juni, sebanyak 47 sarana distribusi pangan yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu	1. Pemeriksaan sarana sesuai perencanaan 2. Melaksanakan Monev ketua tim 3. Adanya Komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan	1. Penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan. 2. Melakukan monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman.	Juli	1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Juni 2. Melakukan monev hasil pemeriksaan sampai Bulan Juni	1. Melakukan pemeriksaan sarana pada Bulan Juli 2. Melaksanakan monev hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	Juli		Open	IK10_DatdukJuni
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.80	101.38	118.16	Realisasi hingga Mei 2025 sebesar 102.06 % (Persentase capaian 118.95%)	1. Penetapan nilai target terlalu rendah dengan perubahan DO pada tahun 2025 2. Pelaksanaan pengawasan iklan telah sesuai dengan komponen penilaian pada DO	1. Pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Monev Ketua Tim 3. Pelaksanaan pengawasan iklan telah memenuhi semua komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi	Melakukan koordinasi dengan Komisi penyiaran daerah terkait iklan yang disiarkan di media penyiaran lokal	Juli	1. Pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Monev Ketua Tim 3. Pelaksanaan pengawasan iklan telah memenuhi semua komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi	Koordinasi dengan Komisi penyiaran daerah terkait iklan yang disiarkan di media penyiaran lokal	Juli		Open	IK11_DatdukJuni
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50.00	50.00	100	Sampai akhir Mei telah dilakukan pemeriksaan 1 sarana fortifikasi garam	Pada bulan Juni telah dilakukan pemeriksaan 1 sarana fortifikasi garam konsumsi di wilayah Aceh Besar, namun saat pemeriksaan sarana sedang tidak melakukan produksi garam konsumsi beryodium.	Pemeriksaan sarana dilakukan sesuai perencanaan yaitu 1 sarana di bulan Juni	Perencanaan pemeriksaan sarana fortifikasi TW III	September	Koordinasi dengan pelaku usaha untuk dilakukan pemeriksaan 1 sarana fortifikasi garam menghindari sarana tutup saat dikunjungi	Melakukan pemeriksaan sarana fortifikasi TW III	September		Open	IK12_DatdukJuni



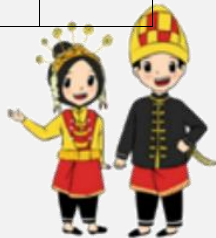


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum				
												Rencana aksi yang belum selesai	Timeline			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	1	16	17
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.50	72.6	101.54	Realisasi pada TW1 72.2% dengan target 71% (capaian 101.69%) Rician (4) Komponen : Standard Ruang Lingkup : 83,3 Peralatan : 80.3 Standar Kompetensi Laboratorium : 50 Standar Metode Terverifikasi : 44.4 Nilai Pemenuhan SKL TW 1 (%) : 72.2 Target Nilai SKL TW 1 (%) : 71 Target Tahunan SKL : 73 Pemenuhan thd Target TW 1 (%) : 101.6	Terdapat kenaikan realisasi sebesar (0,6) poin dari TW1, Keberhasilan peningkatan Nilai SKL pada TW 2 disebabkan adanya penambahan pada (4) komponen dibawah ini : 1. Aspek Ruang Lingkup (penambahan RL Lab. Mikro dan Pangan) - Lab. Mikrobiologi (1) Penambahan RL DETEKSI GEN PENGKODE ENTEROTOKSIN (nheA, nheB, nheC, hblA, hblC, dan hblD) DAN TOKSIN EMETIK (ces) KELOMPOK Bacillus cereus DENGAN METODE REALTIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RTI-PCR) MENGGUNAKAN SensiFAST® SYBR No Rox Mix - Lab Pangan : Penambahan (1) RL Asam Dehidroasetat dalam produk roti 2. Aspek Peralatan telah dilakukan Kalibrasi terhadap peralatan secara EX- SITU dan INSITU (P3OMN) dan Vendor , telah dikalibrasi : Kalibrasi IN-SITU ; (95) alat , EX-SITU (12) alat Jumlah alat yang kalibrasi Vendor sebanyak : 8 alat dari (28) alat yg direncanakan, adapun alat yg sdh dikalibrasi adalah HPLC (4) buah pada masing- masing lab, GC- MS -HSS Pada lab kimia (1) bh, dan BSC pada lab Mikro sebanyak (3) buah Penambahan alat Lab dari pengadaan tahun 2025 berupa : Dissolusi Tester pada Lab obat (1) bh, Water Purification di Lab pangan (1) bh, sedang pada Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin telah pengadaan Pompa HPLC LC 20 AD (Lab Obat dan Pangan) (2) unit Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin berupa : UPS Battery Back Up Smart Kap. 6 KVA (1) bh di Lab Mikrobiologi 3. MAterverifikasi Penambahan : -LabKosmetik (1)bh : PENETAPAN KADAR ASAM GLIKOLAT DALAM PRODUK KOSMETIK SEDIAAN CAIR SECARA KROMATOGRAFI CAIR KINERIA TINGGI – PHOTO DIODE ARRAY (23/KO/MA-PPPOMN/19) - LabMikrobiologi(2)bh : Verifikasi MA Angka Lempeng Total Kontaminan Dalam Makanan (Susu mengandung Probiotik) -VERIFIKASI METODA ANALISIS DETEKSI GEN PENGKODE ENTEROTOKSIN (nheA, nheB, nheC, hblA, hblC, dan hblD) DAN TOKSIN EMETIK (ces) KELOMPOK Bacillus cereus DENGAN METODE REALTIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RTI-PCR) MENGGUNAKAN SensiFAST® SYBR No Rox Mix - Lab. Obat : (4) bh - PENETAPAN KADAR ZAT TERLARUT HASIL DISSOLUSI FLUOXETIN HCL DALAM SEDIAAN TABLET - IDENTIFIKASI, PENETAPAN KADAR KESERAGAMAN SEDIAAN FLUOXETIN HCL DALAM SEDIAAN TABLET - PENETAPAN KADAR ZAT TERLARUT HASIL DISSOLUSI KOLKHSIN DALAM SEDIAAN TABLET - IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN KADAR KOLKHSIN DALAM SEDIAAN TABLET 4. KompetensiPenguji : berdasarkan penambahan RL pengujian serta adanya penambahan kompetensi penguji dilab Kosmetik , Mikrobiologi yang dibuktikan dengan CP, LCP penguji serta telah dilakukannya pelatihan pada lab Obat dengan narasumber dari P3OMN berupa pelatihan Bimbingan Teknis Kalibrasi Instrumen Dissolusi: Mechanical Calibration dan PVT (Performance Verification Testing) dan verifikasi Dissolusi Triheksifenidil HCl dalam sediaan Tablet, Menjadi Bimbingan Teknis Pengujian Disolusidan Spektrofotometrikompleks " Verifikasi MA Dissolusi TRIheksifenidil Tab. Dalam rangka peningkatan kompetensi pelatihan tidak hanya diikuti oleh personil lab obat saja tetapi juga oleh personil lab, OBASKK, KOS dan Lab. pangan Penilaian terhadap terpenuhinya aspek 1 dan aspek 2 Aspek 1 : tersedianya penguji untuk melakukan pengujian seluruh ruang lingkup Aspek 2 : tersedianya minimal 2 (dua) penguji untuk melakukan pengujian suatu ruang lingkup Pada TW 2 terdapat peningkatan kompetensi penguji dibuktikan dengan CP/ LCP dari Lab Kosmetik dan Lab Mikrobiologi Adapun Capaian 4 Kompenen pada TW 2 sebagai berikut : Ruang Lingkup : 83.8 Peralatan : 80.2 Kompetensi : 50 Metoda Analisa : 46,5 Target TW2 : 71,5 Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (%) :72.6 (101,5%)	1. Verifikasi Metoda Analisa 2. Pelatihan Internal 3. Kalibrasi Internal/ Eksternal 4. Pengadaan Alat , Suku Cadang, Reagensia, BP, Alat gelas Walaupun terdapat kenaikan , namun terdapat kendala untuk menaikkan SKL, antara lain : (April - Juni) LabKosmetik : Verifikasi MA belum terlaksana dengan baik karena antrian alat untuk menyelesaikan sampel rutin. 2. terjadi pengulangan pengujian karena kolom yang overload sehingga memberikan hasil uji yang tidak memenuhi kriteria sehingga perlu dilakukan pengulangan. sampel yang diduga TMS (pengujian ulang) HPLC LC 20 AD proses perbaikan (instalasi pump) Penggunaan alat gelas antri pada pengujian mikrobiologi disebabkan semua komoditi di uji secara mikrobiologi dengan time line 15 HK untuk semua komoditi dan masuk secara bersamaan pada rentang tanggal 1-10 setiap bulan dengan komposisi SDM 8 personil termasuk penyelia." Sampel Juni belum selesai uji karena reagen HCl tidak tersedia sehingga sampel di clock off (Parameter uji PK cemaran logam g, Pb, Cd, As tidak bisa dikerjakan) Antrian HPLC" LabObat Tradisional : Timeline tidak tercapai terkendala pada - Alat HPLC rusak, tersedia 3 HPLC namun hanya 1 yang bisa digunakan, sehingga terjadi antrian pengujian. - Sebagian besar metode menggunakan HPLC. Timeline tidak tercapai terkendala pada Terdapat sampel TMS sehingga dilakukan uji pengulangan Telah dilakukan penggantian metode dengan menggunakan TLC, tersedia 2 TLC, namun yg dapat digunakan hanya 1, 1 lagi rusak, sehingga terjadi antrian penggunaan alat, ditambah lagi dengan masuknya sampel kasus NAPPLA yang harus didahulukan pengujiannya secara TLC. Lab. Obat /Mapza Perlu penambahan kolom dan alat gelas untuk menghindari penumpukan sampel akibat performa kolom menurun dan alat gelas yang kurang. Sampel bulan Juni yang baru selesai diuji baru mencapai 35,6%. Hal ini disebabkan antrianalat gelas, penggantian kolom yang bisa sampai 5 kali serta karena ketiadaan reagensia HCl 37% untuk penambahan RI Obat terkendal sampel untuk penambahan RL sulit dijumpai diperedaran di Aceh, maupun disarankan Saryanfar LabPangan Antri alat gelas dan peralatan untuk pengujian mikrobiologi karena semua komoditi memiliki timeline 15 HK, sehingga hampir semua produk pangan pada bulan Mei lewat dari 15 HK Pengulangan pengujian karena terdapat sampel yang TMS untuk memastikan kembali hail uji memakan waktu sehingga menyebabkan sampel lewat dari 15 HK Perlu penambahan anggaran pembelian suku cadang (selang HPLC, lampu HPLC, dll) dan penunjang (seperti kolom HPLC, filter sampel, filter fase gerak,dll) untuk menunjang kelancaran dan hasil pengujian yang optimal. Adanya pengadaan baku dan reagen yang indet, sementara sampel sudah masuk ke laboratorium sehingga memperlama proses uji. Maka kami mengusulkan agar jenis baku dan reagen tersebut sebaiknya difasilitasi oleh PPPOMN karena barang tsb merupakan barang import yang mempunyai prosedur tertentu dalam pengadaannya seperti baku mikotoksin, baku cemaran hasil proses, kit ELISA, dll." = 1. Penambahan RL agar dapat terlaksana sesuai perencanaan pada TW3 dan TW4 2. Pengadaan sample Ruang lingkup mengingat sulit mendapatkan sampel RL untuk obat maka diperlukan Koordinasi dengan Bidang pemeriksaan untuk pengadaan sampel Ruang lingkup dan revisi anggaran pengujian (bila tidak dapat diakomodir dari anggaran Inspeksi) untuk pengadaan sampel RL Obat . 3. Verifikasi MA sesuai perencanaan 4. Upaya dan strategi untuk penambahan alat Lab (sekarang sudah stagnan) 5. Koordinasi dengan P3OMN untuk mendapatkan BP, jadwal pelatihan J MPH, yang belum terlaksana , Pendampingan terhadap hasil uji yang TMS 6. Kalibrasi alat oleh Vendor	Juli s.d Desember	1. Penambahan RL sd TW 2 telah dilakukan penambahan (3) RL yaitu (1) RL Lab OBASKK, (1) RL dari Lab Mikro, dan (1) RL dari Lab Pangan 2. Verifikasi Metoda Analisa sd TW 2 telah dilakukan (18) Verifikasi MA , dengan Rincian : (6) dari Lab Kosmetik (10) dari Lab Obat (1) dari Lab Pangan (1) dari Lab Mikrobiologi 3. Peralatan Telah dilakukan Kalibrasi , sebagai berikut : Kalibrasi alat oleh P3OMN (EXSITU - INSITU) dengan rincian : Kalibrasi EXSITU (95) alat Kalibrasi EXSITU : (12) alat Kalibrasi Eksternal (8) alat Jumlah : 115 alat (83.33%) Adapun alat yang telah dikalibrasi eksternal yaitu : HPLC (UV+PDA+Flouoresen)/ Shimadzu/ LC 40 / Lab OBASKK HPLC (UV+PDA+Flouoresen)/ Shimadzu/ LC 40/ Lab Kosmetik HPLC LC-20 AD (2)/Lab. Obat GC-MS -HSS/ QP2010 Plus Shimadzu / Lab Kimia HPLC Nexera (PDA-RF)/ Shimadzu / Lab Pangan HPLC 20-AD (UV-VIS / PDA)/ Shimadzu/ Lab Kos BSC/ESCO LA2-4A1 / 2015-101544/ Lab Mikrobiologi BSC/ ESCO Class II BSC SC2-451 / 2019-139387/ Lab. Mikrobiologi BSC/Biobase MSC Class II / ID No. BSC29A0153/ Lab Mikrobiologi Kalibrasi dilakukan oleh PT. Ditek Jaya pada tanggal 19-23 Mei 2025 Tanggal 10 Juni 2025 (alat Mikro/ BSC) GC-MS -HSS/ QP2010 Plus Shimadzu / Lab Kimia (14-18 Apr2025) -Perbaikan alat di lab kimia dan Pangan Pompa HPLC LC 20 AD (Lab Obat dan Pangan) 3. Pelatihan internal di Lab Obat Calibration dan PVT (Performance Verification Testing) dan verifikasi Dissolusi Triheksifenidil HCl dalam sediaan Tablet, Menjadi Bimbingan Teknis Pengujian Disolusidan Spektrofotometrikompleks " Verifikasi MA Dissolusi TRIheksifenidil Tab 4. Pengadaan alat Lab 2025 : Dissolusi Tester, Water Purification, UPS Battery Back Up Smart Kap. 6 KVA/ Mikro 5. Kaji Ulang Dokumen (terlaksana 20 Feb 2025) 4. Peningkatan Kompetensi Peningkatan kompetensi dilakukan oleh Lab Kimia dan Mikrobiologi dengan penambahan RL sehingga menambah kemampuan uji personil Lab yang dibuktikan dengan CP / LCP, dimana penilaian SKL dilakukan terhadap peningkatan pada aspek 1, dan 2. CP/ LCP penambahan kompetensi teralmpir da Link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1XTNDRbMxh0s1ZQLXwq7sT3OmOsWceHWd	Juli s.d Desember	Akan terus ditingkatkan pada TW3 dan TW4	Open	IK13_DatidukJum/https://drive.google.com/drive/folders/1XTNDRbMxh0s1ZQLXwq7sT3OmOsWceHWd		





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum				
												Rencana aksi yang belum selesai	Timeline			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	98.83	114.20	Nilai efektivitas KIE rata-rata hingga Triwulan II adalah 98.83 (jumlah responden 189 orang) dengan target 86,54, terdiri atas 1. KIE tatap muka sebesar 97.78 (204 Orang) 2. KIE melalui media sebesar 99,89 (82 orang)	1. Komitmen dan kerjasama antar petugas yang cukup baik 2. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor dan pemerintah daerah 3. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI 4. Pemahaman peserta KIE terhadap beberapa materi yang disampaikan pada saat KIE tatap muka bervariasi.	1. Materi yang disampaikan menarik dan mudah dipahami. 2. Narasumber yang kompeten dan komunikatif 3. Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta. 4. Adanya inovasi Sanger Ureung Aceh dan Podcast Berbisik BPOM Aceh 5. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI.	Menyampaikan KIE tatap muka dengan materi yang fokus pada satu komoditi.	Juli 2025	1. Melaksanakan KIE rutin dan KIE stunting sesuai pedoman 2. Melaksanakan inovasi Sanger Ureung Aceh dan inovasi Janet Podcast Berbisik BPOM Aceh bulan Juni 2025 3. Berkoordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan KIE 4. Melaporkan kegiatan KIE sesuai timeline 5. Menyampaikan KIE tatap muka dengan materi yang fokus pada satu komoditi	Melaksanakan KIE tatap muka dengan anggaran/sharing anggaran dari pihak luar	Juli 2025			IK14_DatdukJuni
		15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	60.00	70.00	116.67	Target Realisasi pada Bulan Mei 50 % dan dapat dicapai 70 %, capaian ini juga melebihi dari target Bulan Juni sebesar 60 %	Melaksanakan 2 tahapan sekaligus yaitu, sosialisasi keamanan pangan dan bimbingan teknis kader keamanan pangan pada Bulan Mei, karena kalender pendidikan pada Bulan Juni sd Juli libur sekolah	Melibatkan Dinas Pendidikan dan DP3AKB dalam pengawasan pembudayaan keamanan pangan pada sekolah binaan ramah anak dan sekolah adiwiyata	Melaksanakan program Sekolah sinergi dengan lintas sektor terkait, yang berisikan dengan program Desa dan Pasar	Juni s.d November 2025	1. Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 2. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 3. Bimbingan Teknis Kader KP Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025	Melakukan monitoring dan pengawasan sekolah	Juli s.d November 2025		Pelaporan kegiatan sekolah dikirim terpusat melalui SAPA Sekolah 2025 pada https://linkktr.ee/PIAS2025	IK15_DatdukJuni
		16. Jumlah desa pangan aman	50.00	70.00	140.00	Realisasi sampai akhir Mei sebesar 50% dengan target 25%. Target mengacu pembobotan tiap tahapan yang disesuaikan dengan timeline pelaksanaan batch 1 dan diupayakan terlaksana sesuai tahapan yang ditentukan	Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan Desa mengikuti Surat Edaran Nomor: PM.02.01.5.05.25.09 Tahun 2025 meliputi Bimtek Komunitas Desa dan Fasilitas Penyiapan PMT Posyandu bersama kader Dasyhat	Melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, BKBKN, DP3AKB dan Tim penurunan stunting	Melaksanakan program Desa sinergi dengan lintas sektor terkait, yang berisikan dengan program Sekolah dan Pasar terkait Penerapan Keamanan Pangan	Juli s.d November 2025	1. Advokasi Kelembagaan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 3. Bimtek Komunitas Desa telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025	1. Melakukan movev Desa 2. Pengawasan Desa di 3 Kab/kota diupayakan dilakukan daring sementara pengawasan desa di Kab. Simeulue dilakukan luring karena koneksi jaringan yang tidak bisa dilakukan secara daring	Juli s.d November 2025	Closed	Pelaporan kegiatan telah dilaporkan terpusat pada link gkpd.pom.go_id	IK16_DatdukJuni
		17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	50.00	70.00	140.00	Realisasi sampai akhir Mei sebesar 50% dengan target 50%.Target mengacu pembobotan tiap tahapan yang disesuaikan dengan timeline pelaksanaan batch 1 dan diupayakan terlaksana sesuai tahapan yang ditentukan	Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan Pasar sesuai Surat Edaran Nomor : PM.02.01.5.05.25.09 Tahun 2025 yaitu Sosialisasi keamanan pangan bagi Komunitas pasar	Melibatkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan UPTD Pasar dalam rangka pengawasan keamanan pangan pasar	Melaksanakan program Pasar sinergi dengan lintas sektor terkait yang berisikan dengan program Sekolah dan Desa	Juli 2025	1. Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 3. Sosialisasi KP bagi Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2025	1. Melakukan pengawasan keamanan pangan di pasar. 2. Melakukan pengawasan PPABK.	Juli 2025		Pelaporan kegiatan telah dilaporkan terpusat pada link sipaman.go_id	IK17_DatdukJuni
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	42.00	46.15	109.88	1. Realisasi sampai akhir Mei sebesar 41.67% dengan target 38% (capaian 109.66%) 2. Bimtek CPPOB sharing anggaran OTA secara hybrid telah dilaksanakan di Mei 2025	1. Bimtek CPPOB dilaksanakan secara hybrid, bimtek luring dilaksanakan untuk pelaku usaha pangan yang memiliki kesiapan lebih baik (Sarana produksi telah terpisah dari dapur rumah tangga, Kategori risiko produk menengah dan tinggi, Produksi telah dilakukan rutin dan jumlah karyawan >5 orang) ; sementara bimtek secara daring untuk pelaku usaha pangan selainnya. 2. Pelaksanaan bimtek ini dilakukan dengan sharing anggaran antara OTA, BPOM Aceh dan pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan komitmen dan keseriusan pelaku usaha dalam mengurus IP CPPOB. 3. Petugas secara intensif melakukan komunikasi kepada pelaku usaha untuk pendampingan dalam memperoleh sertifikat CPPOB, CPKB dan CPOTB. 4. Penetapan target pendampingan terlalu rendah, dimana tahapan fasilitasi pendamping dari april - oktober sebanyak 50%, perlu penyesuaian target	1. Koordinasi secara intensif dengan pusat terkait bimtek program sinergis OTA 2. Permintaan sebagai narasumber khusus ke OTA dalam sharing session, sehingga mampu memberikan motivasi kepada pelaku usaha	Fasilitasi pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha pangan, OBA dan Kos	Juli-Oktober	Bimtek CPPOB secara hybrid, sementara fasilitasi masih terus berlanjut sampai okt	Melakukan fasilitasi pendampingan kepada pelaku usaha	Juli-oktober 2025	Open	IK18_DatdukJuni	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42.00	42.00	100.00	1. Perkara temuan bulan Maret 2025 telah tahap II 2. Intensifikasi Penindakan telah dilaporkan tepat waktu 3. Operasi Pangea telah dilaporkan ke pusat tepat waktu 4. Kegiatan investigasi bulan Januari sd Mei telah dilaporkan segera sebelum batas waktu 5. Perkara yang ditemukan pada akhir bulan Mei telah dilakukan gelar kasus dan telah ditetapkan tersangkanya 6. Perkara Carry Over masih pada tingkat Tahap 1	1. Seluruh proses penyidikan segera diselesaikan dengan memperhatikan deadline waktu. 2. Koordinasi yang intens dengan Korwas 3. Koordinasi yang baik dengan Kejati 4. Sistem Reminder untuk batas waktu pelaporan	1. Penyusunan Rencana kegiatan penyelesaian pemberkas 2. Adanya Intensifikasi Penindakan dan Operasi Pangea yang menetapkan tahapan pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu pendorong penyelesaian pelaporan	1. Koordinasi dengan Kejati untuk mendapatkan status P-21 hingga tahap 2 terhadap berkas perkara yang sedang ditangani. 2. Merencanakan dan melaksanakan Operasi Investigasi berdasarkan informasi dari Siber, Inspeksi dan Pengaduan Masyarakat dan segera melaporkannya. 3. Merencanakan dan melaksanakan Operasi Penindakan terhadap target yang telah ditetapkan	Juli s.d Desember 2025	1. Kegiatan Intelijen di dalam dan luar kota 2. Penyelesaian pemberkas (Tahap 1) perkara hasil Operasi penindakan bulan Mei 2025	1. Penyelesaian berkas perkara yang ditemukan pada bulan Mei di Bireuen. 2. Kegiatan Intelijen di dalam dan luar kota pada bulan Juli-Desember 2025 3. Melakukan Operasi penindakan dan penyidikan pada TW III dan TW IV tahun 2025 4. Kegiatan penggalangan kerawanan OOT pada bulan Juli 2025	1. Juli sd Agustus 2025 2. Juli sd Desember 2025 3. Juli sd Desember 2025 4. Juli 2025	Open	IK19_dadukJuni	





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum				
												Rencana aksi yang belum selesai	Timeline			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	1. Pelaporan Operasi Siber dan Profiling bulan Januari-Mei 2025 telah dilaporkan tepat waktu 2. Pelaporan kerawanan bulan Januari-Mei 2025 telah dilaporkan tepat waktu	Para petugas secara rutin melakukan operasi siber dan profiling serta laporan kerawanan dan menjaga deadline penyelesaiannya	1. Menyepektati jumlah target dan deadline penyelesaian Operasi Siber dan Profiling. 2. Melaporkan secara rutin seluruh informasi yang mengandung unsur kerawanan kejahatan Obat dan Makanan. 3.Membuat reminder batas waktu operasi dan pelaporan.	1. Melakukan operasi siber dan profiling secara rutin sebelum batas waktunya serta Mengisi secara benar dan lengkap data hasil Operasi Siber dan Profiling. 2. Mengisi dengan benar dan lengkap data kerawanan yang ada dan dilaporkan tepat waktu 3. Melakukan penggalangan 4. Menindaklanjuti rekomendasi dari Direktorat Cegah tangkal 5. Menganalisa kejahatan Obat dan Makanan di Aceh	Juli s.d Desember 2025	1. Pelaporan Operasi Siber dan Profiling bulan Juni 2025 2. Pelaporan kerawanan bulan Juni 2025	1. Melakukan pelaporan operasi siber dan profiling bulan Juli-Desember 2025 2. Melakukan pelaporan kerawanan bulan Juli-Desember 2025 3. Melakukan penggalangan pada bulan Juli 2025 4. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dari Direktorat Cekal 5. Melakukan analisa Kejahatan Obat dan Makanan di Aceh	1.Juli - Desember 2025 2. Juli -Desember 2025 3. pertengahan Juli 2025 4. TW III dan TW IV 2025 5. TW IV 2025		Open	IK.20 didukung
8	Layanan Publik UPT yang prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	Akhir Tahun													
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22. Nilai Pembangunan Zi Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													
		23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													
		24. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													
		25. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													





1.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses evaluasi dan penyesuaian strategi serta kebijakan guna mencapai kinerja yang lebih optimal pada triwulan berikutnya. Informasi yang disajikan dalam laporan tersebut menjadi dasar analisis terhadap capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan, sehingga memungkinkan dilakukan identifikasi secara dini terhadap deviasi atau ketidaksesuaian antara target dan realisasi. Dengan demikian, pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami akar permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun strategis, serta merumuskan langkah korektif yang tepat sasaran.

Melalui pemanfaatan data dan informasi dari laporan kinerja, dilakukan penyesuaian strategi, seperti penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengalokasian sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Informasi ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan obat dan makanan, memperbaiki tata kelola internal, dan memperkuat sistem monitoring serta evaluasi. Dengan pendekatan berbasis data ini, Balai Besar POM di Banda Aceh dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.4 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2025

Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2024 No. DIPA- 063.01.2.432790/2025 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan anggaran awal sebesar Rp20.121.623.000.- (Dua puluh milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Realisasi triwulan II tahun 2025 sebesar Rp. 6.997.374.273,- atau 34.43 persen.

JENIS BELANJA	TARGET PAGU AWAL (Rp)	TARGET PAGU SETELAH REVISI	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	6.833.861.000	6.833.861.000	3.401.209.799	52.80
Belanja Barang	11.438.540.000	11.639.540.000	2.328.072.144	19.99
Belanja Modal	1.849.222.000	1.849.222.000	1.268.092.330	68.57
Jumlah	20.121.623.000	20.322.623.000	6.997.374.273	34.43

Realisasi PNBP Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh

JENIS BELANJA	TARGET PAGU AWAL (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Pajak Tidak langsung lainnya Deposit	0	6.325.056	0
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	0	-647.500	0





Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	220.000.000	17.684.418	8.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi	0	971.250	0
Jumlah	220.000.000	24.333.224	11.00

b. Tingkat Efisiensi berdasarkan Sasaran Kegiatan

Pengukuran Efisiensi dan Efektifitas Kinerja

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran):

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus:

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi setiap kegiatan dihitung menggunakan persamaan:

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan





Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa waktu (dalam satuan tahun) setelahnya. Pengukuran tingkat efektivitas sifatnya masih berdasarkan angka, bukan realisasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada setiap sasaran kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

- 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Table 106. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	% Capaian Anggaran	% Capaian Indikator	TE	Kategori
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	14.18	109.19	6.70	Tidak Efisien
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	18.15	100.00	4.51	Tidak Efisien
3.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	51.14	101.54	0.99	Efisien
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	8.63	127.72	13.80	Tidak Efisien
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	0.00	107.14	0.00	Belum bisa ditentukan
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	15.56	100.00	5.43	Tidak Efisien





7.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	28.41	100.00	2.52	Tidak Efisien
8.	Layanan Publik UPT yang prima	3.54	0.00	-1.00	Belum bisa ditentukan
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	3.02	0.00	0.00	Belum bisa ditentukan

Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan 9 (sembilan) sasaran kegiatan sampai dengan triwulan II, dengan hasil 1 (satu) sasaran kegiatan Efisien, 5 (lima) sasaran kegiatan Tidak Efisien dan 3 (tiga) sasaran kegiatan Belum bisa ditentukan dikarenakan pada indikator sasaran kegiatan tersebut belum ada targetnya dan realisasi anggarannya. Sasaran kegiatan yang belum ada realisasi anggarannya disebabkan kegiatan dilakukan secara daring.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan selama triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan pertama yaitu, “Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sebesar Rp. 392.986.032,- atau 5.62% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan serta sarana penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah Tidak Efisien. Hal ini karena pada awal triwulan II baru dilakukan buka blokir anggaran.
2. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kedua yaitu, “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi sebesar Rp. 920.000,- atau 0.01% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi fortifikasi, pemeriksaan sarana dalam rangka koordinasi. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak bagi peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua adalah tidak efisien. Pada triwulan berikutnya akan dilakukan koordinasi dengan pelaku usaha untuk menghindari sarana tutup ataupun tidak produksi saat akan diperiksa agar pemeriksaan lebih efektif.
3. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ketiga yaitu, “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sebesar Rp. 1.530.190.820,- atau 21.87% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemenuhan/peremajaan alat-alat laboratorium, peningkatan ruang lingkup pengujian serta koordinasi dan monev pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya semua indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran





untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah efisien, karena capaian sasaran (101.69%) yang dihasilkan melebihi anggaran (21.39%) yang dikeluarkan dan sudah dilakukan beberapa perbaikan alat laboratorium serta pelatihan internal petugas lab.

4. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan keempat yaitu, “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT sebesar Rp. 132.050.934,- atau 1.89% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan KIE kepada masyarakat dan intervensi terhadap komunitas sekolah, desa dan pasar. Pada sasaran kegiatan ini dilakukan KIE tatap muka yang dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu KIE di area Car Free Day, KIE dengan melibatkan unsur pentaheliks, dan KIE di warung kopi melalui inovasi Sanger Ureung Aceh yang berkolaborasi dengan SAKA POM. Kegiatan intervensi terhadap komunitas sekolah, desa dan pasar dilaksanakan mulai Bulan April sesuai dengan surat edaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keempat adalah Tidak efisien, karena kegiatan pada 3 (tiga) indikator Pro PN sekolah, desa serta pasar baru dilakukan pada awal April dan tahap pelaksanaannya mengikuti surat edaran terbaru.
5. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kelima yaitu, “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu belum ada karena pada sasaran kegiatan ini kegiatannya dilakukan secara daring. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan advokasi dan pendampingan UMKM dengan melakukan sosialisasi keamanan pangan sampai dengan Juni secara daring. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kelima adalah tidak efisien, karena capaian sasaran (64.83%) belum memenuhi target pada triwulan II.
6. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan keenam yaitu, “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT sebesar Rp. 73.748.250,- atau 1.05% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan intelijen dan operasi penindakan sarana distribusi kosmetik/OBA ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keenam adalah tidak efisien. Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan meeting tidak dapat dilaksanakan secara luring dan beberapa pertemuan dibatalkan.
7. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu, “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT sebesar Rp. 20.825.679,- atau 0.30% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan operasi siber dan profiling serta pelaporan kerawanan. Kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya realisasi dari indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini. Namun, berdasarkan hasil pengukuran efisiensi sasaran kegiatan ketujuh tidak





efisien. Hal ini karena realisasi pada anggaran ini belum sepenuhnya digunakan untuk kegiatan karena masih berjalan sampai Desember 2025.

- 8. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu, “Layanan Publik UPT yang prima sebesar Rp. 3.971.500,- atau 0.06% dari keseluruhan realisasi anggaran. Adanya efisiensi anggaran sehingga menurunkan jenis layanan informasi, seperti mengurangi jumlah informasi melalui media cetak dan media elektronik. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedelapan adalah tidak efisien, karena capaian indikator pada sasaran ini belum ada pada triwulan II.
- 9. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kesembilan yaitu, “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal sebesar Rp. 4.842.681.058,- atau 69.21% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional kantor. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesembilan adalah tidak efisien, karena capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini belum ada pada triwulan II.

Table 107. Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Output			Input (Anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75	94.67	111.71	613.168.000	158.684.077	25.88
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Akhir Tahun			43.550.000	680.000	1.56
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	93.33	109.80	325.667.000	91.866.126	28.21
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	22.755.000	5.603.946	24.63
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.50	102.94	22.755.000	5.603.946	24.63





6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78.00	80.63	103.37	99.632.750	3.380.015	3.39
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	100	107.53	13.333.750	667.500	5.01
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65	13.333.750	667.500	5.01
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.72	103.07	341.019.500	43.672.272	12.78
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65	341.019.500	43.672.272	12.78
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8	101.38	118.16	318.251.000	38.488.378	12.08
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50.00	50.00	100	5.069.000	920.000	18.15
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.50	72.60	101.54	2.992.448.000	1.530.190.820	51.14
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	98.83	114.20	272.181.000	21.192.951	7.79





15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	60.00	70.00	116.67	436.427.000	22.553.010	5.17
16	Jumlah desa pangan aman	50.00	70.00	140.00	709.656.000	72.311.073	10.19
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	50.00	70.00	140.00	140.558.000	15.993.900	11.38
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	42.00	45.00	107.14	48.359.000	0	0.00
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42.00	42.00	100	473.984.000	73.749.250	15.56
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100	73.305.000	20.825.679	28.41
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	112.285.000	3.971.500	3.54
22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	480.974.000	14.514.600	3.02
23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	110.271.000	0	0.00
24.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	12.287.976.000	4.828.166.458	39.29
25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	22.640.000	0	0.00



Realisasi Anggaran Per Kegiatan Beserta Capaian s.d Triwulan II Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Koordinasi	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (AEA)	Input : Dana Output : Kegiatan	73,305,000 14	20,825,679 6	28.41 42.86	150.85	1	0.51	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pelayanan Publik Lainnya	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (BAH)	Input : Dana Output : Dokumen	112,285,000 188	3,971,500 82	3.54 43.62	1,233	1	11.33	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE (BDC)	Input : Dana Output : Orang	169,905,000 723	15,030,850 503	8.85 69.57	786	1	6.86	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pemantauan Produk	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (BKB)	Input : Dana Output : Laporan	317,000,000 1	14,514,600 0.00	4.58 0.00	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Komunikasi Publik	3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT (BMB)	Input : Dana Output : Jenis Layanan	102,276,000 24	6,162,101 44	6.02 183.33	3,043	1	29.43	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (CAB)	Input : Dana Output : Paket	50,000,000 1	0 0.00	0.00 0.00	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3165.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (CAN)	Input : Dana Output : Unit	100,000,000 7	0 0	0.00 0.00	0	1	-1.00	Tidak Efisien



PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Prasarana Bidang Kesehatan	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (CBV)	Input : Dana Output : Unit	150,000,000 1	0 0	0.00 0.00	0	1	-1.00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Standarisasi Lembaga	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (PDD)	Input : Dana Output : Lembaga	1,443,226,000 1	262,098,490 0.00	18.16 0.00	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Perkara Hukum Badan Usaha	3165.QCD.U12	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Banda Aceh (QCD.U12)	Input : Dana Output : Perkara	473,984,000 4	73,748,250 2	15.56 50.00	321.35	1	2.21	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman (QDB.001)	Input : Dana Output : Lembaga	436,427,000 10	22,553,010 5	5.17 50.00	967.56	1	8.68	Tidak Efisien
			3165.QDB.002	Desa Pangan Aman (QDB.002)	Input : Dana Output : Lembaga	709,656,000 4	72,311,073 1	10.19 25.00	245.35	1	1.45	Tidak Efisien
			3165.QDB.003	Pasar pangan aman berbasis komunitas (QDB.003)	Input : Dana Output : Lembaga	140,558,000 1	15,993,900 0	11.38 0.00	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan	3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans (QDC)	Input : Dana Output : Orang	43,550,000 45	680,000 45	1.56 100.00	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (QDG)	Input : Dana Output : UMKM	48,359,000 13	0 4.00	0.00 30.77	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIA.001)	Input : Dana Output : Produk	371,177,000 355	103,074,018 166	27.77 46.76	168.39	1	0.68	Efisien
			3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (QIA.002)	Input : Dana Output : Produk	613,168,000 890	158,684,077 378	25.88 42.47	164.11	1	0.64	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.001)	Input : Dana Output : Lembaga	53,335,000 54	2,670,000 18	5.01 33.33	665.86	1	5.66	Tidak Efisien
			3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT (QIC.003)	Input : Dana Output : Lembaga	5,069,000 3	920,000 2	18.15 66.67	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
			3165.QIC.004	arana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.004)	Input : Dana Output : Lembaga	1,075,260,000 634	127,877,937 271	11.89 42.74	359.42	1	2.59	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.RAB.001	Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (RAB)	Input : Dana Output : Paket	1,549,222,000 1	1,268,092,330 0	81.85 0.00	107.07	1	0.07	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (3165)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Layanan BMN	6384.EBA.956.001	Layanan BMN (EBA.956)	Input : Dana Output : Layanan	8,000,000 1	0 0	0.00 0.00	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh	Layanan Perkantoran	6384.EBA.994.001	Layanan Perkantoran (EBA.994)	Input : Dana Output : Bulan	12,276,861,000 1	4,828,166,458 0	39.33 0.00	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada Triwulan II Tahun 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh mencatat capaian kinerja yang **sangat baik**, tercermin dari **nilai pencapaian sasaran kegiatan sebesar 106,07 dengan predikat "Istimewa"**. Hasil ini mencerminkan bahwa sebagian besar indikator kinerja periodik mampu mencapai atau melampaui target, menunjukkan efektivitas pelaksanaan program serta konsistensi perencanaan dan monitoring yang kuat.

Balai Besar POM di Banda Aceh berhasil menunjukkan kinerja organisasi yang unggul pada Triwulan II 2025. **Tujuan strategis terlaksana dengan sangat baik**, ditandai dengan capaian **nilai pencapaian sasaran kegiatan 106,07** berpredikat Istimewa. Pencapaian output sebesar 35,96% dan realisasi anggaran 34,43%. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tercermin dari Tingkat Efisiensi sebesar 0,04, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang optimal. Sebagian besar indikator telah dicapai atau melampaui target, sementara indikator lainnya akan dinilai pada TW IV.

Hasil ini memperlihatkan bahwa organisasi bekerja tepat sasaran dalam mengelola program prioritas dan pengawasan.

Sebanyak 7 (tujuh) indikator berkategori Sangat Baik, 4 (empat) indikator berkategori Baik, 8 (delapan) indikator berkategori Tidak dapat disimpulkan, 6 (enam) indikator belum dinilai (akan dinilai pada TW IV). Capaian ini membuktikan bahwa pelaksanaan program pengawasan, pembinaan, edukasi, dan pemberdayaan di bidang obat dan makanan telah berjalan efektif secara substantif

a. Indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik, yaitu:

1. IKSK3 – Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. IKSK5 – Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3. IKSK6 – Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder





4. IKS7 – Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 5. IKS9 – Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 6. IKS13 – Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar
 7. IKS18 – Persentase UMK yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat produksi yang baik
- b. Indikator kinerja dengan kategori Baik, adalah:
1. **IKS4** – Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
 2. IKS12 – Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 3. IKS19 – Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
 4. IKS20 – Persentase laporan analisis kejahatan yang diselesaikan sesuai standar
- c. Indikator kinerja dengan kategori Tidak dapat disimpulkan, yaitu:
1. **IKS1** – Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 2. **IKS8** – Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
 3. Persentase IKS10 – Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 4. IKS11 – Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
 5. IKS14 – Tingkat efektivitas KIE di wilayah kerja UPT
 6. IKS15 – Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 7. IKS16 – Jumlah desa pangan aman
 8. IKS17 – Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.
- d. Indikator kinerja belum ada penilaian. Penilaian di triwulan IV, yaitu:
1. IKS2 – Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO





2. IKS21 – Indeks Pelayanan Publik UPT
3. IKS22 – Nilai Pembangunan Zona Integritas
4. IKS23 – Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
5. IKS24 – Nilai Kinerja Anggaran
6. IKS25 – Indeks Manajemen Risiko

Dari komposisi klasifikasi capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 44% indikator telah dinilai secara definitif dan masuk kategori baik atau sangat baik. Namun, sisanya (56%) masih menunggu validasi lebih lanjut atau penilaian pada periode berikutnya. Evaluasi lanjutan dan penajaman metodologi pengukuran sangat diperlukan untuk menjamin akurasi, konsistensi, dan kontinuitas capaian kinerja dalam mendukung akuntabilitas organisasi secara menyeluruh.

Sepanjang Triwulan II Tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mengalokasikan Anggaran DIPA tahun 2025 sebesar Rp20.322.633.000 yang telah dibelanjakan dengan realisasi anggaran 34,43 persen sebesar Rp 6.997.374.273 dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi 106,07 kategori Istimewa. Realisasi anggaran tersebut memiliki capaian output kegiatan di Triwulan II sebesar 35,96 persen sehingga memiliki tingkat efisiensi TE sebesar 0,04. Meski pelaksanaan anggaran masih berada di bawah 50%, sebagian besar program dan kegiatan tetap berhasil direalisasikan secara optimal.

Adapun tantangan utama dalam pelaksanaan anggaran meliputi efisiensi anggaran awal tahun, keterlambatan pengadaan reagen dan suku cadang, serta kendala administrasi dalam distribusi anggaran ke unit teknis. Untuk itu, strategi penguatan akan difokuskan pada sinkronisasi antara perencanaan output dan realisasi belanja, penguatan pemantauan triwulanan, serta koordinasi intensif antara bidang teknis dan perencanaan.

4.2 Saran

1. Melakukan Penguatan Perencanaan Terpadu Output-Anggaran. Perencanaan kegiatan agar sejalan dengan alokasi anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) agar deviasi halaman III DIPA tetap minimal dan efisiensi maksimal tercapai.



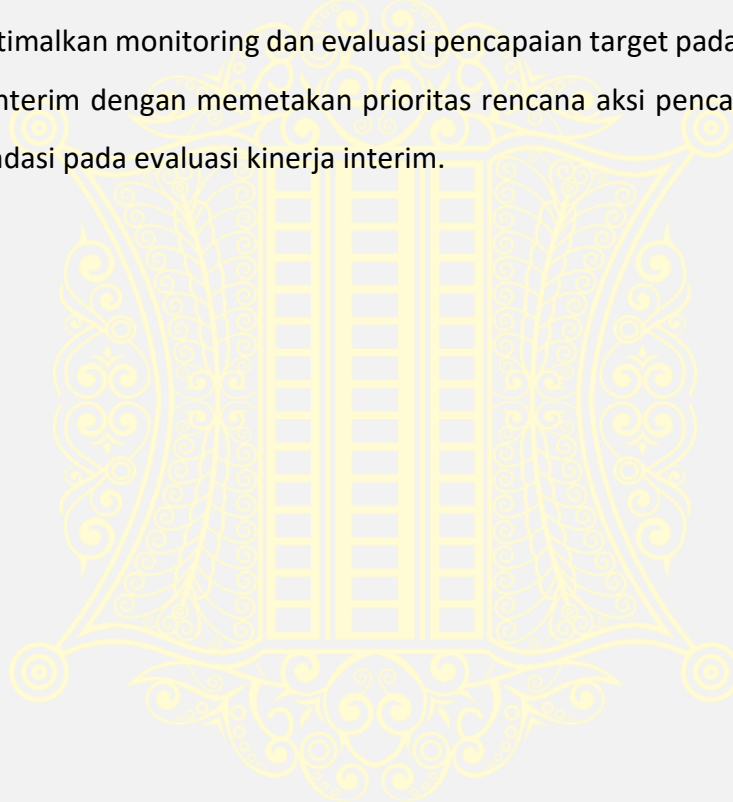


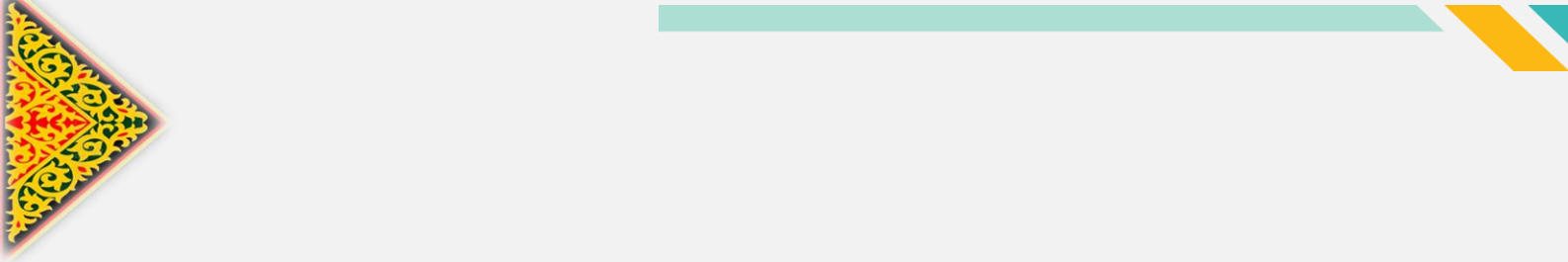
2. Peningkatan Akurasi dan Ketepatan Pelaporan. Pemanfaatan aplikasi dan sistem integrasi antar aplikasi (SIPT, SIMETRIS, SIGARANG) untuk menjamin konsistensi data dan menghindari keterlambatan pelaporan hasil uji dan tindak lanjut, terutama pada indikator berbasis laboratorium.
3. Perkuat Komitmen Stakeholder dalam Tindak Lanjut Rekomendasi. Perlu adanya koordinasi intensif dan komunikasi aktif dengan pelaku usaha dan lintas sektor agar tingkat responsivitas terhadap rekomendasi pengawasan semakin meningkat.
4. Melakukan peningkatan efektivitas Program Prioritas Nasional (PPN). Meningkatkan sinergi pelaksanaan sekolah, desa, dan pasar aman berbasis komunitas dengan memanfaatkan lintas dukungan sektoral dan otoritas lokal, sekaligus mengembangkan model dampak program yang terukur.
5. Evaluasi dan Perluasan Inovasi KIE dan Edukasi Publik. Inovasi seperti Sanger Ureung Aceh dan Podcast Berbisik BPOM perlu diperluas jangkauannya agar edukasi keamanan pangan lebih masif dan inklusif, serta indeks efektivitas KIE terus meningkat.
6. Penguatan Manajemen Risiko dan Zona Integritas. Tindak lanjut sistematis terhadap pengelolaan risiko dan pembangunan ZI agar indeks manajemen risiko dan nilai reformasi birokrasi dapat dicapai sesuai target tahun.
7. Monitoring Efisiensi Per Indikator Secara Real-Time. Lakukan pemantauan berkala terhadap capaian output dibanding realisasi anggaran untuk menjaga efisiensi dan memperbaiki program yang berpotensi tidak efisien.
8. Peningkatan Kapasitas SDM Teknis dan Pengelola Kinerja. Melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan dan pelibatan SDM di seluruh unit, baik teknis, administrasi, maupun pelaporan, agar setiap indikator dapat dicapai secara substansial dan akuntabel.
9. Perencanaan Strategis TW IV Berbasis Refleksi Triwulan. Penyusunan Perencanaan kerja TW IV secara strategis dengan mempertimbangkan hasil evaluasi TW II agar indikator tahunan (seperti IKSK2, IKSK21–IKSK25) dapat tercapai penuh dan proporsional. perencanaan anggaran dengan tepat agar semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.





10. Menyusun langkah-langkah strategis peningkatan capaian Indikator Kinerja yang belum mencapai target dengan menerapkan rencana aksi yang berkesinambungan dan selaras dengan perencanaan kinerja organisasi mencakup analisa terukur penyebab kegagalan atau dukungan keberhasilan capaian indicator kinerja dan rekomendasi peningkatan di interim berikutnya.
11. Melakukan upaya-upaya peningkatan kecepatan dan keakuratan data kinerja melalui mekanisme pengumpulan data kinerja dan evaluasi internal yang terjadwal dan terdokumentasi secara baik pada tiap level manajemen organisasi sesuai dengan perencanaan kinerja interim dan tahunan.
12. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pencapaian target pada siklus pencapaian kinerja interim dengan memetakan prioritas rencana aksi pencapaian kinerja hasil rekomendasi pada evaluasi kinerja interim.





LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDI NOVIANDI

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Banda Aceh

YUDI NOVIANDI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan

TARUNA IKRAR





Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.3 Person
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen





NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8 Persen
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73 Persen
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	90.3 Persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5 Persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen





NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Persen
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.25 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82.78 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.2 Persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 20,121,623,000 (Dua Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3185 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	8,037,762,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12,083,861,000

Banda Aceh, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Banda Aceh

YUDI NOVIANDI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan

TARUNA IKRAR





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#KolaborAKSA
Siap WBBM



@bpom.aceh



@bpom.aceh



bbpom.aceh



aceh.pom.go.id



08116853301



JL. Mohd Daud Beureuh No.110, Bandar
Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh